



PEMERINTAH KOTA BONTANG



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 69 dan pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2019, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang memuat informasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ Tahun Anggaran 2021 juga merupakan laporan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup LKPJ Wali Kota Bontang Tahun 2022 meliputi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, telah banyak target yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bontang pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, semoga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kota

Bontang agar mewujudkan Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua
untuk senantiasa menuju Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab.

Bontang, Maret 2023

Walikota Bontang

Basri Rase, S.IP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Diagram.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	2
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	5
1.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	8
1.2.4 Prioritas Pembangunan	9
1.3 Data Umum Daerah	16
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	16
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	24
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	27
1.3.4 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	27
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	31
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja ..	37
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	38
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	39
2.1 Penjabaran Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	39
2.2 Penjabaran Pengelolaan Belanja Daerah.....	41
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	102
3.1 Urusan Pemerintahan Daerah	102
3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib.....	104
3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	104
3.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	138
3.1.2 Urusan Pemerintahan Pilihan	197
3.1.3 Unsur Pendukung	210
3.1.4 Unsur Penunjang	216
3.1.5 Unsur Pengawasan	235
3.1.6 Unsur Kewilayahan	240
3.1.7 Unsur Pemerintahan Umum.....	247
3.2 Kebijakan strategis Yang Ditetapkan	250
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	252

Bab IV	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	264
Bab V	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Prestasi/Penghargaan.....	265
	5.1 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	265
	5.2 Penghargaan/Prestasi Kota Bontang Tahun 2022..	268
Bab VI	Penutup	273

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaan Pembangunan Kota Bontang.....	8
Tabel 1.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	9
Tabel 1.3	Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019.....	23
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 1.5	Jumlah Penduudk Berdasarkan Kelompok Umur.....	25
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	26
Tabel 1.7	Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan	27
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai ASN Kota Bontang	28
Tabel 1.9	Jumlah PNS Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2022.....	28
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bontang Tahun 2022.....	29
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Pendidikan Kota Bontang Tahun 2022.....	29
Tabel 1.12	Jumlah PNS Berdasarkan golongan Pemerintah Kota Bontang Tahu 2022.....	30
Tabel 1.13	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022.....	30
Tabel 1.14	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	31
Tabel 1.15	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah	31
Tabel 1.16	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah.	32
Tabel 1.17	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Derah	32
Tabel 1.18	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	33
Tabel 1.19	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain PAD yang Sah	34
Tabel 1.20	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pandapatan Transfer	34
Tabel 1.21	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	36
Tabel 1.22	Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022.	37

Tabel 1.23	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2022.....	38
Tabel 2.1	Anggaran Perubahan Pada Pendapatan	40
Tabel 2.2	Anggaran Perubahan Pada Belanja	43
Tabel 2.3	Anggaran Perubahan Tahun 2022.....	44
Tabel 3.1	Pembagian Urusan Pemerintahan	103
Tabel 3.2	Urusan Pendidikan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	107
Tabel 3.3	Urusan Kesehatan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	112
Tabel 3.4	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	119
Tabel 3.5	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	125
Tabel 3.6	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	130
Tabel 3.7	Urusan Sosial Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	136
Tabel 3.8	Urusan Tenaga Kerja Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	141
Tabel 3.9	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	145
Tabel 3.10	Urusan Pangan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	149
Tabel 3.11	Urusan Pertanahan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	153
Tabel 3.12	Urusan Lingkungan Hidup Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	156
Tabel 3.13	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	159
Tabel 3.14	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	161
Tabel 3.15	Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	164
Tabel 3.16	Urusan Perhubungan	167

	Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	
Tabel 3.17	Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	170
Tabel 3.18	Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	173
Tabel 3.19	Urusan Penanaman Modal Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	178
Tabel 3.20	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah raga Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	182
Tabel 3.21	Urusan Statistik Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	185
Tabel 3.22	Urusan Persandian Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	188
Tabel 3.23	Urusan Kebudayaan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	190
Tabel 3.24	Urusan Perpustakaan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	193
Tabel 3.25	Urusan Kearsipan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	196
Tabel 3.26	Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan.....	199
Tabel 3.27	Urusan Pariwisata Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan.....	202
Tabel 3.28	Urusan Pertanian Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan.....	205
Tabel 3.29	Urusan Perdagangan Capaian dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan Pilihan	209
Tabel 3.30	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan.....	212
Tabel 3.31	Urusan Perencanaan Capaian Program dan Kegiatan Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	218
Tabel 3.32	Urusan Keuangan Capaian Program dan Kegiatan Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	222
Tabel 3.33	Urusan Kepegawaian Capaian Program dan Kegiatan Pada Unsur Penunjang	227

	Urusan Pemerintahan.....	
Tabel 3.34	Urusan Pendidikan dan Pelatihan Capaian Program dan Kegiatan Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	231
Tabel 3.35	Urusan Penelitian Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan.....	234
Tabel 3.36	Unsur Pengawasan Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan.....	238
Tabel 3.37	Unsur Kewilayahan Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan	241
Tabel 3.38	Unsur Pemerintahan Umum Capaian Program dan Kegiatan Pada Urusan Pemerintahan	248
Tabel 3.39	Kebijakan Strategis Tahun 2022.....	251
Tabel 3.40	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD LKPD Tahun Anggaran 2021.....	253
Tabel 5.1	Bantuan Perusahaan Dalam Bentuk Corporate Social Responsibility 2022.....	265

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Batas Administrasi Kota Bontang	17
Gambar 1.2	Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang	18
Gambar 1.3	Peta Ketinggian Kota Bontang	18
Gambar 1.4	Peta Kelengkapan Kota Bontang	19
Gambar 1.5	Peta Geologi Kota Bontang	20
Gambar 1.6	Peta DAS Kota Bontang	22
Gambar 1.7	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019.....	24

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Jumlah Penduduk Kota Bontang berdasarkan jenis kelamin per wilayah tahun 2022.....	25
Diagram 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	26
Diagram 1.3	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	27

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasaan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menyajikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan atau koreksi serta bahan masukan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022 ini antara lain memuat; a) Dasar Hukum, Visi dan misi Kepala Daerah dan Data Umum Daerah; b) Penjabaran APBD; c) Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; d) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan penugasan. Keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(KUA) Kota Bontang Tahun 2022, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan APBD Kota Bontang Tahun 2022 baik dalam penyelenggaraan Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga LKPJ dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mengukur seberapa besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Wali kota sudah dapat di realisasikan setiap tahunnya.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Lembaran Negara Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dAerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repcblik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
 15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang



Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2022;

19. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2022

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Aspek pembangunan yang menjadi sasaran utama dalam periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah mencakup aspek pembangunan tata kelola pemerintahan, aspek pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, aspek pembangunan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pada masing-masing aspek pembangunan akan memperbesar harapan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan perspektif aspek utama pembangunan yang merupakan hasil penelaahan terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang, serta isu pembangunan Kota Bontang, maka dengan tujuan untuk memajukan pembanguana Kota Bontang ke depan, melalui proses penelaahan terhadap visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka selanjutnya ditetapkan visi misi RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut:

1.2.1 Visi

Visi Kota Bontang yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”

Visi pembangunan tersebut pada esensinya adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan Kota Bontang lebih berkemajuan pada seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil – hasil pembangunan lebih dapat dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Kota Bontang yang Lebih Hebat merupakan suatu harapan dan citacita bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota yang lebih meningkat kualitas tata kelola pemerintahannya, lebih meningkat kualitas penataan sarana dan prasarana kotanya, lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan budaya kotanya, lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya, lebih unggul SDM-nya dan lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut



pada esensinya merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya. **Hebat Pemerintahannya** merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keinginan ini akan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan dan pengembangan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. **Hebat Kotanya** ditujukan untuk mewujudkan Kota Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. **Hebat Masyarakatnya** dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan kotanya, dan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat yang **Beradab**, yaitu ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. HEBAT dan BERADAB dalam visi di atas merupakan akronim dari kata **H**armoni, **b**ERkelanjutan, **B**erdaya **s**Aing, **BER**sih, **AD**il, **A**manah dan **B**ertanggung jawab yang merupakan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat memberi warna bagi pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya Visi dijabarkan menjadi misi Kota Bontang 2021-2026.

1.2.2 Misi

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Pembangunan “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan tiga Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut:

- a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
- b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya,



dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

- c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaannya misi pembangunan sebagai arahan strategik pencapaian visi, harus dapat dipersepsikan secara tepat untuk mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami setiap butir misi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, maka penjabaran masing-masing Misi dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 : Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan.

Arahan strategik dari agenda pembangunan yang menjadi fokus utama misi pembangunan ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang diharapkan menjadi "*lebih hebat dan beradab*". Agenda pembangunan ini harus dapat memastikan kelangsungan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan filosofisnya yakni ditujukan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu upaya yang progresif melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang **harmoni**. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus mampu secara harmonis, selaras dan serasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat sinergi menyatukan potensi dan peran pembangunan serta mempromosikan kolaborasi atau kerjasama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam lingkup internal pemerintahan, harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan potensi dan peran pemerintahan daerah selaku eksekutif, legislatif dan bersama instansi vertikal sehingga sasaran dan target kinerja pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Semangat dan tekad untuk membangun harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang pembangunan ke depan dalam rangka melaksanakan amanah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni Pemerintahan yang Bersih, Adil, Amanah dan Bertanggung jawab sebagai bagian dari indikator terwujudnya Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya.



Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Arahan strategik dari agenda Misi pembangunan ini adalah bahwa dalam rangka pencapaian Visi, fokus pembangunan juga perlu diarahkan pada upaya untuk wujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Kota Bontang yang lebih hebat ke depan dilaksanakan dalam koridor keseimbangan dan keselarasan antara pentingnya mendorong kemajuan dan pertumbuhan kota dengan tetap menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan. Bontang Harmoni Pemerintah Dunia Usaha Masyarakat.

Untuk menuju pada perwujudan Kota Bontang yang Lebih Hebat, agenda pembangunan diarahkan melalui pemantapan pembangunan ekonomi yang merata, pemantapan potensi sosial dan budaya masyarakat yang produktif, pembangunan infrastruktur yang semakin mantap dan pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui pemantapan bidang-bidang utama pembangunan tersebut diharapkan Kota Bontang yang berkelanjutan, layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.

Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arahan strategik agenda Misi pembangunan ini dalam mendukung pencapaian Visi adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan unggul. Keberhasilan membangun SDM berdaya saing dan unggul akan menjadi akselerator bagi Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mewujudkan Kota Bontang Berdaya Saing dan Sejahtera, peningkatan kualitas SDM sebagai fokus utama pembangunan akan diintervensi melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perlindungan Kota Bontang yang Berkelanjutan, layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan Pemantapan Kualitas Lingkungan berkelanjutan Pemantapan Sosial dan budaya yang produktif Pemantapan Pembangunan Ekonomi yang merata Pembangunan infrastruktur yang mantap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pariwisata, bidang ketenagakerjaan, bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. SDM yang berdaya saing dan unggul akan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, SDM tenaga kerja mendapatkan akses pembinaan dan pelatihan yang tepat sehingga kompetensi tenaga kerja meningkat, dan masyarakat yang

rentan dan kurang mampu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Implementasi kebijakan dan program yang tepat pada masing-masing bidang intervensi tersebut akan menjadi sarana utama untuk mewujudkan Kota Bontang yang *Hebat Masyarakatnya*.

1.2.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		
		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai LPPD
			Opini BPK
	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	
		Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Keteriban Umum	
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup			
Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini		
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah
			Rata-rata lama sekolah
			Usia harapan hidup
	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan

1.2.4 Prioritas Pembangunan

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang, maka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
1	Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal		DISDIKBUD
			SD (Paket setara SD)	103,45	DISDIKBUD
			SMP (Paket setara SMP)	102,66	DISDIKBUD
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4		DISDIKBUD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	DISDIKBUD
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	100%	DISDIKBUD
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	100/100ribu kelahiran hidup	DINKES
			cakupan kepesertaan JKN	100%	DINKES
			Ketersediaan obat esensial (%)	100%	DINKES
			Tercapainya Standard Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD	114 (75%)	RSUD
			Tercapainya Akreditasi Paripurna untuk RS (mempertahankan status akreditasi paripurna)	16 BAB	RSUD
		Angka kematian bayi	12		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin	100%	DINKES
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100%	DINKES		



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
2	Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	35%	DINKES & RSUD
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpustakaan daerah	35.000 Org dan 27 perpustakaan	DPK
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit embung/ penampung air/sumur air tanah/air baku	87%	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	75,15%	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	51%	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,50	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	92,02%	DPUPR
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	75%	DLH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	75%	DPUPR
		PROGRAM PENGENDALIAN	Cakupan pengendalian	93%	DLH
		PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	7%	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase pengendalian bahan berbahaya & beracun dan limbah bahan berbahaya & beracun	100%	DLH



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		BERACUN (LIMBAH B3)			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	4%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20%	DLH
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yg memiliki kinerja baik dlm PPLH	20%	DLH
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan kasus lingkungan hidup	20%	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99%	DLH
3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik	PROGRAM PENATAAN BANGUNANGEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	8,38%	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	90%	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	77%	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0%	DPKPP
			Persentase fasiltasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	0%	DPKPP
			Persentase ketersediaan rumah	30,55%	DPKPP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	0%	DPKPP
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	0,12%	DPKPP

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU jalan lingkungan dalam kondisi baik	91,65%	DPKPP
			Persentase PSU drainase lingkungan dalam kondisi baik	91,84%	DPKPP
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pengaduan Sengketa tanah yang ditangani	100%	DPKPP
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	25%	DPKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tanah Negara yang dimanfaatkan sesuai izin	20%	DPKPP
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase kenaikan rata-rata NJOP Tanah		DPKPP
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas & angkutan jalan	100%	DISHUB
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80%	DPKP
4	Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	19,74%	DKUKMP
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	8,97%	DKUKMP
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	7,50%	DKUKMP
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase kapasitas kelembagaan koperasi	19,23%	DKUKMP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,34%	DKUKMP
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	1,38%	DKUKMP
			Pertumbuhan Jumlah	10%	DKUKMP
5	Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat				



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PENGEMBANGAN UMKM	Pelaku Usaha Mikro		
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	2%	DKUKMP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	4.150.000	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	87.50	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	37,50	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	100	DPMPTSP
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	60%	DISPOPAR
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	197,555	DISPOPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	30%	DISPOPAR
		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	40%	DISPOPAR
			Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan		DISPOPAR
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	100%	DKP3
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	87	DKP3
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100%	DKP3
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar	100%	DKP3



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab	
			asal tumbuhan			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	100%	SETDA	
6	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100%	SETDA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	70%	INSPEKTORAT	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Tingkat Pemenuhan Kebijakan Pengawasan 2. Perangkat daerah dengan kinerja RB baik	100%	INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Persentase masyarakat yang mengikuti penguatan	75%	SATPOL PP	
					36,1	KESBANGPOL
				PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	61	KESBANGPOL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	50	KESBANGPOL	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	73	KESBANGPOL	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase Penanganan Konflik	100	KESBANGPOL	



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95%	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95%	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan	95%	KECAMATAN BONTANG UTARA
			pemerintahan yang dilaksanakan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan koordinasi penyelenggaraan	100	KECAMATAN BONTANG BARAT



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	pemerintah umum		
7	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100%	DSPM
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100%	DSPM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	DSPM
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	DSPM
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	DSPM
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase capaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha	7,09	DISNAKER
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja terlatih		DISNAKER
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja lokal yang ditempatkan	19,4	DISNAKER
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	SETDA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	47,78%	DPPKB
			Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	0,37%	DPPKB

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang 2022 (dokumen RKPD 2022)

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

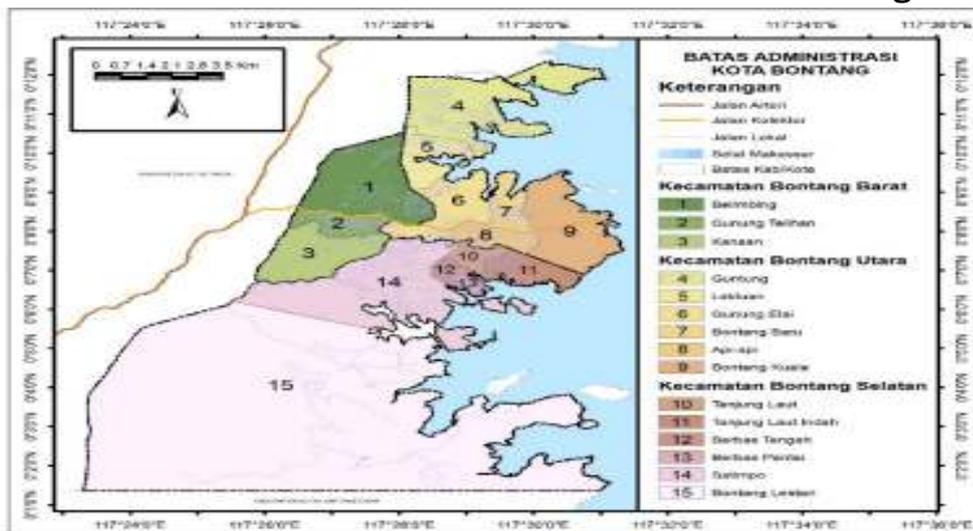
Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun



batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

Pada awalnya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat, yang meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

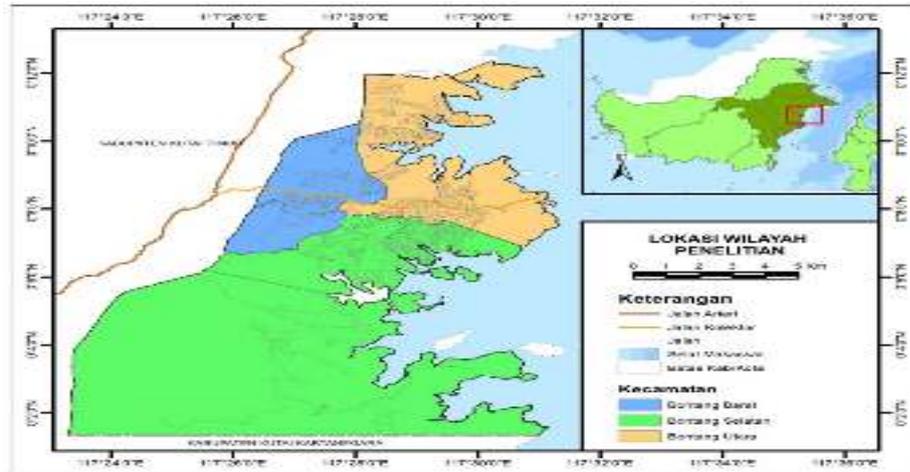
b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak diantara 0°01' Lintang Utara - 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur - 117°38' Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros trans-kalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor perdorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Gusung yang terdapat permukiman di atasnya, pulau mangrove yang

tersebar dari utara hingga selatan, juga terdapat permukiman diatas laut seperti Melahing dan Tihi-Tihi.

Gambar 1.2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang



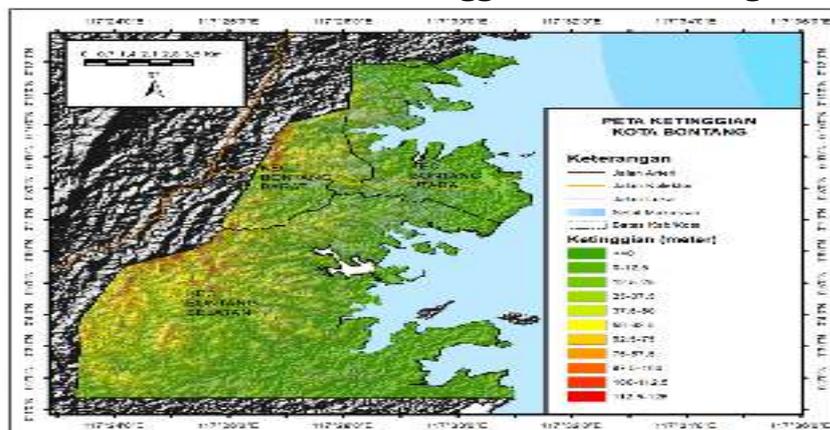
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

c. Topologi

Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m diatas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan kelerengan dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.

Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai kearah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihindarkan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.

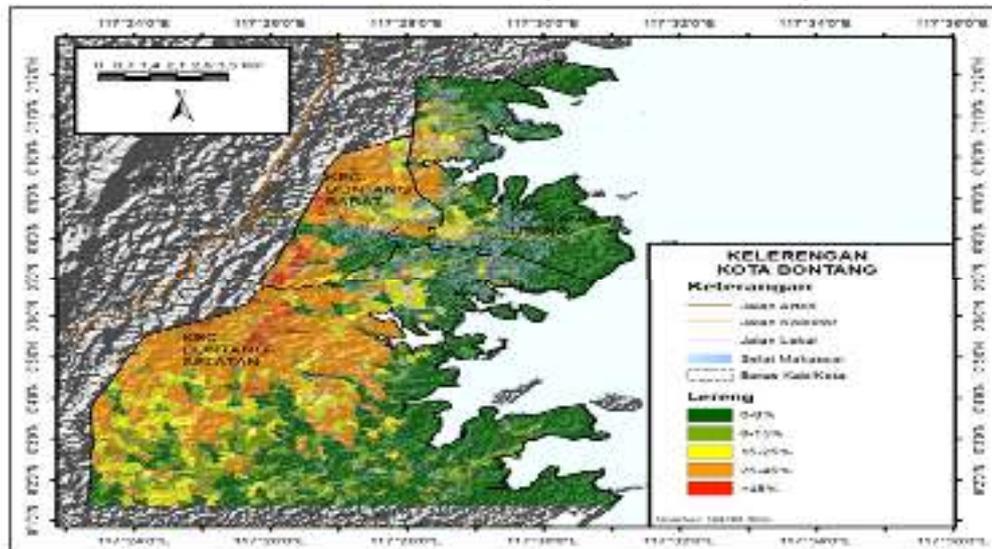
Gambar 1. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039



Gambar 1.4 Peta Kelengkapan Kota Bontang



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

d. Struktur Geologi

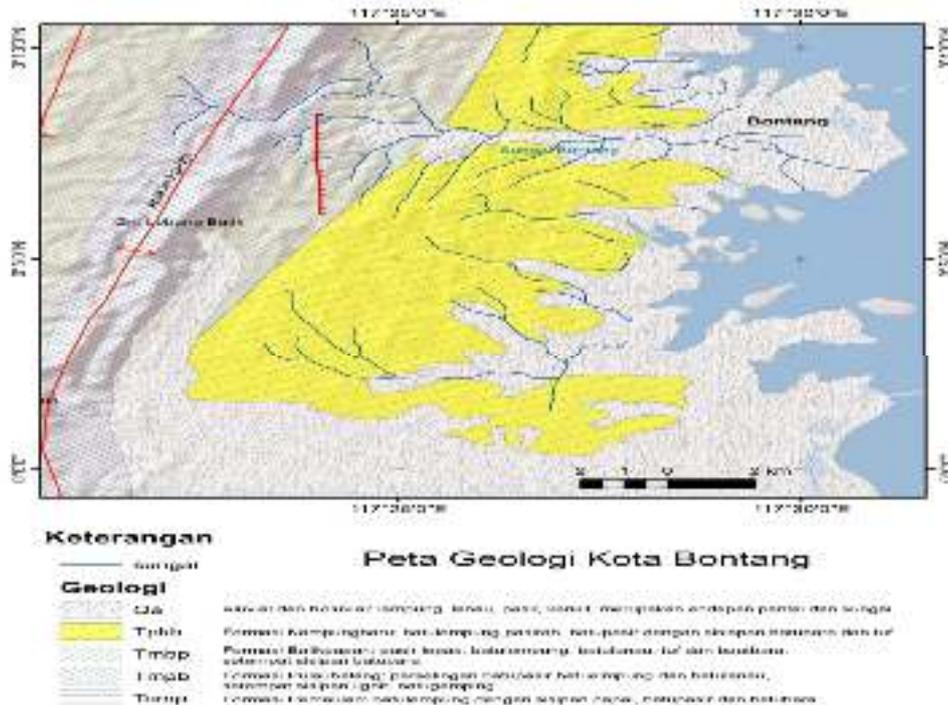
Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

- 1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
- 2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki akuifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.
- 3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
- 4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
- 5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
- 6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.



7) Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.

Gambar 1. 5 Peta Geologi Kota Bontang



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

e. Kondisi Klimatologi

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.

Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.

Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada



stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm³ dengan rata-rata 11 hari hujan per bulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

f. Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Guntung

Luas DAS Guntung kurang lebih 1.195,23 ha. Terletak di wilayah utara Kota Bontang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan Guntung, sebagian Kelurahan Loktuan, dan sebagian Kelurahan Belimbing. Terdapat 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Guntung dan Sungai Kanibungan. Sungai Guntung memiliki panjang kurang lebih 4 km, sedangkan Sungai Kanibungan memiliki panjang kurang lebih 2 km. Lebar kedua sungai tersebut antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah ± 3,5 meter.

2. DAS Bontang

Luas DAS Bontang kurang lebih 4.914 ha. Terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, yakni sebagian Kelurahan Belimbing, Sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, sebagian Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan. Terdapat aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang kurang lebih 18 km dan lebar antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

3. DAS Nyerakat

Luas DAS Nyerakat kurang lebih 9.845,98 km². Terletak di wilayah selatan Kota Bontang yang meliputi 2 (dua) kelurahan, yaitu sebagian Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran kurang lebih 17 km dan lebar sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter.

Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Gambar 1. 6 Peta DAS Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan G.Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampung Baru yang didominasi oleh pasir, dibagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 400 makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuhan kepada batuan Formasi Kampung Baru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu *unconfirmity* (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh formasi batuan Balikpapan.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota

Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi Bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.

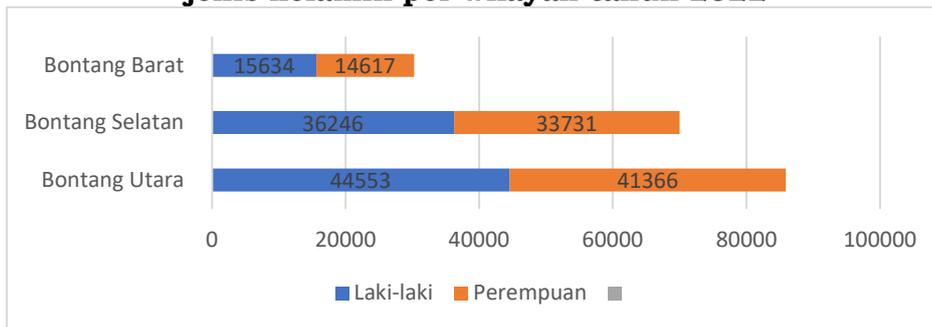
Tabel 1.3 Luasan penggunaan lahan tahun 2019

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
1	Area Parkir	1,11	0,01
2	Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	735,24	4,63
3	Bangunan non-permukiman lain	2,98	0,02
4	Bangunan Permukiman Kota	1.787,79	11,27
5	Danau	9,40	0,06
6	Hutan	27,96	0,18
7	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang	2.331,81	14,70
8	Hutan Mangrove	2.622,44	16,53
9	Hutan Pinus	62,81	0,40
10	IPAL	0,03	0,00
11	Kolam	9,41	0,06
12	Ladang	957,31	6,03
13	Lahan Terbuka Lain	112,30	0,71
14	Lahan Urugan	254,46	1,60
15	Landas Pacu	36,50	0,23
16	Lapangan Diperkeras	1,13	0,01
17	Laut	10,25	0,06
18	Makam	6,18	0,04
19	Masjid	3,97	0,03
20	Padang golf	111,55	0,70
21	Pasar	1,26	0,01
22	Pelabuhan	3,76	0,02
23	Penggalian sirtu	26,39	0,17
24	Pergudangan	11,49	0,07
25	Perkebunan Kelapa Sawit	51,07	0,32
26	Permukaan Diperkeras Lain	32,07	0,20
27	Pipeline	167,75	1,06
28	Rawa	54,09	0,34
29	Rawa Pedalaman	4,19	0,03
30	Rawa Pesisir Bervegetasi	50,34	0,32
31	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	120,38	0,76
32	Sawah	40,40	0,25
33	Semak	5.932,92	37,39
34	Stadion	27,68	0,17
35	Sungai	47,62	0,30
36	Taman	2,45	0,02
37	Taman Bermain	6,96	0,04
38	Tambak Ikan	184,00	1,16

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Bontang Utara	44.553	41.366	85.919
Bontang Selatan	36.246	33.721	69.967
Bontang Barat	15.634	14.617	30.251
Jumlah	96.433	89.704	186.137

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Diagram 1.1 Jumlah Penduduk Kota Bontang berdasarkan jenis kelamin per wilayah tahun 2022

b. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia

Komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2022 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 130.169 jiwa atau 70,01%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 51.152 jiwa atau 27,51% dan kelompok usia 64 tahun sebanyak 4.607 jiwa atau 2,48%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk piramida penduduk dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang pertumbuhan penduduknya kecil disebabkan angka kelahiran dan kematian hampir mendekati seimbang.

Tabel 1.5 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

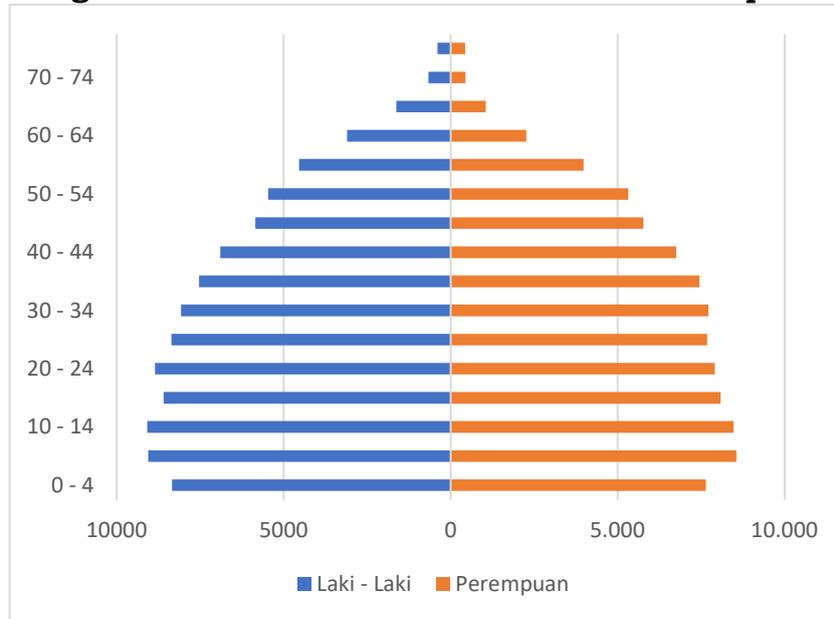
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
>75	389	440
70-74	661	441
65-69	1.627	1.049
60-64	3.097	2.264
55-59	4.536	3.982
50-54	5.458	5.322
45-49	5.845	5.774
40-44	6.892	6.751
35-39	7.532	7.447
30-34	8.074	7.715
25-29	8.355	7.683
20-24	8.848	7.915



Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
15-19	8.590	8.089
10-14	9.082	8.473
5-9	9.053	8.561
0-4	8.342	7.641

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Diagram 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur



c. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjan S1 sebanyak 11.016 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 51.745 jiwa, tidak/belum sekolah sebanyak 52.323 jiwa orang dan tamat SD/ sederajat sebanyak 21.565 jiwa. komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan

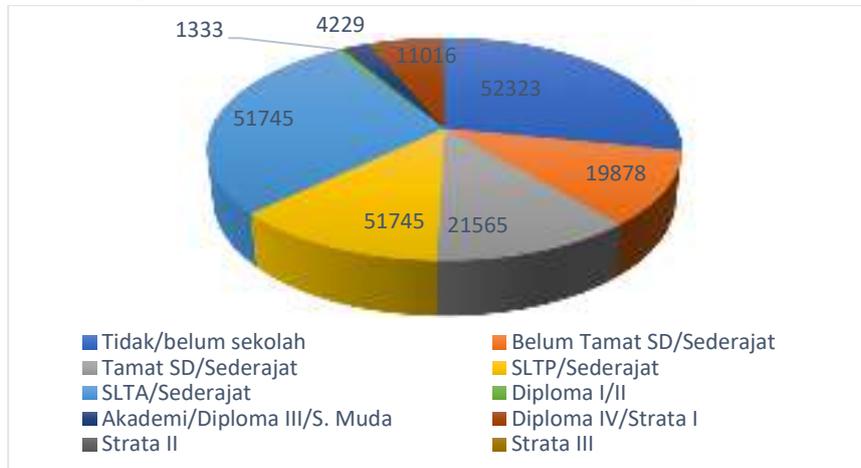
Pendidikan	Jumlah
Tidak/belum sekolah	52.323
Belum Tamat SD/Sederajat	19.878
Tamat SD/Sederajat	21.565
SLTP/Sederajat	23.122
SLTA/Sederajat	51.745
Diploma I/II	1.333
Akademi/Diploma III/S. Muda	4.229
Diploma IV/Strata I	11.016
Strata II	694



Pendidikan	Jumlah
Strata III	23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Diagram 1.3 Penduduk berdasarkan pendidikan



1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah pertumbuhan penduduk Kota Bontang pada tahun 2017-2022 relatif stabil, akan tetapi pada tahun 2017, dengan diberlakukannya KTP elektronik jumlah penduduk Kota Bontang yang tercatat dan diakui mengalami penyesuaian. Pergerakan jumlah penduduk ini selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2017 telah dilakukan pendataan penduduk dengan proses verifikasi data penduduk pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Perkecamatan

KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kecamatan Bontang Utara	79.064	81.169	82.626	84.210	84.956	85.919
Kecamatan Bontang Selatan	68.033	68.436	69.063	70.297	70.210	69.967
Kecamatan Bontang Barat	29.418	29.803	29.929	30.277	30.227	30.251
JUMLAH	176.515	179.408	181.618	100.574	115.183	186.137

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

1.3.4 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang untuk jumlah data Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8 Jumlah Pegawai ASN Kota Bontang

Tahun	Jumlah Pegawai ASN
2020	2.853 Orang
2021	2.777 Orang
2022	2.847 Orang

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

a. Jumlah PNS dan PPPK pada Perangkat Daerah

Jumlah PNS Pemerintah Kota Bontang pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.9 Jumlah PNS pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Kota Bontang Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21	23	44
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17	6	23
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16	2	18
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	28	12	40
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17	29	46
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24	15	39
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21	21	42
8	DINAS KESEHATAN	59	252	311
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	38	24	62
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	18	15	33
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19	10	29
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	38	24	62
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21	26	47
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	54	25	79
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	34	8	42
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	22	33
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	24	13	37
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	19	37
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	213	528	741
20	DINAS PERHUBUNGAN	35	8	43
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	25	33
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	34	12	46
23	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14	20	34
24	INSPEKTORAT DAERAH	24	32	56
25	KECAMATAN BONTANG BARAT	68	82	185
26	KECAMATAN BONTANG SELATAN	69	41	110
27	KECAMATAN BONTANG UTARA	68	54	122



NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
28	RSUD TAMAN HUSADA	114	278	392
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34	4	38
30	SEKRETARIAT DAERAH	69	45	114
31	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29	5	34

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Jumlah PNS terbanyak terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan sebesar 741 orang, karena didominasi oleh tenaga pendidik (guru) sedangkan paling sedikit yaitu pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan jumlah 18 orang. Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Bontang Sebanyak 155 orang.

Tabel. 1.10 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kota Bontang Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	1
2	DINAS KESEHATAN	1	14	15
3	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	0	1	1
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24	93	117
5	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	1
6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	1	1
7	RSUD TAMAN HUSADA	2	15	17
8	SEKRETARIAT DAERAH	2	0	2
TOTAL		31	124	155

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

b. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah kota Bontang menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.11 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kota Bontang Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SD	14	2	16
2	SMP	34	1	35
3	SMA	320	167	487
4	D - I	6	3	9
5	D - II	5	19	24
6	D - III	178	445	623
7	D - IV	22	22	44
8	S - 1	512	869	1381
9	S - 2	130	98	228
TOTAL		1221	1626	2847

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan D IV merupakan tingkat pendidikan yang mendominasi PNS. Lulusan diploma menjad tingkat pendidikan kedua tertinggi, disusul SMA dan Strata dua. Hal ini dipengaruhi juga dengan adanya penerimaan CPNS dari lulusan Strata 1 dan Diploma.

c. Jumlah PNS berdasarkan golongan

Jumlah PNS Pemerintah Kota Bontang menurut golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.12 Jumlah PNS berdasarkan golongan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	I	25	0	25
2	II	316	232	548
3	III	698	1174	1812
4	IV	182	220	402
TOTAL		1221	1626	2847

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Golongan III merupakan golongan dominan dari PNS yaitu sebesar 1812 orang, sedangkan golongan yang paling sedikit ada pada golongan I sebesar 25 orang. Besarnya golongan III ini memiliki kaitan dengan tingkat pendidikan strata 1 yang merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang dimiliki oleh PNS.

d. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS Pemerintah Kota Bontang menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.13 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Fungsional Tertentu	434	1030	1464
2	Fungsional Umum	557	492	1049
3	Struktural	230	104	334
TOTAL		1221	1626	2847

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2022

Jabatan fungsional tertentu merupakan mayoritas jabatan PNS pada Pemerintahan Kota Bontang sebesar 1464 PNS, kemudian fungsional umum sebesar 1049 PNS, sedangkan untuk struktural mengalami penurunan karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.



1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2022, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Bersumber Dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan daerah maka PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.797.622.874.064,59 atau 114,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.566.982.158.682,-. Realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dapat terjadi karena adanya perbaikan ekonomi pasca covid 19 ditingkat Nasional maupun di Kota Bontang. Secara keseluruhan rincian realisasi target pendapatan pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.14 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.309.625.650,00	231.351.605.844,18	105.97
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.318.521.491.813,00	1.487.984.486.922,00	112.85
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.151.041.219,00	78.286.781.298,41	259.65
JUMLAH		1.566.982.158.682,00	1.797.622.874.064,59	114.72

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Komponen Pendapatan Daerah meliputi 3 pos pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp134.539.080.196,35 atau 110,86%, realisasi retribusi daerah sebesar Rp3.959.818.810,90 atau 106,15%, realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.847.655.621,23 atau 100% dan realisasi lain-lain PAD yang sah

sebesar Rp89.005.051.215,70 atau 99,59% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.15 Rincian Target, realisasi dan capaian Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pajak Daerah	121.361.794.949,00	134.539.080.196,35	110,86
2	Retribusi Daerah	3.370.400.620,00	3.959.818.810,90	106,15
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.847.655.621,00	3.847.655.621,23	100,00
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	89.369.774.460,00	89.005.051.215,70	99,59
JUMLAH		218.309.625.650,00	231.351.605.844,18	105,97

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Realisasi PAD secara berturut-turut disumbang oleh realisasi pajak daerah, lain-lain pendapatan asli yang sah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun uraian realisasi masing-masing pos pendapatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 134.539.080.196,35 atau 110,86% melebihi dari yang di targetkan. Selengkapnya rincian target, realisasi dan capaian dari pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 1.16 Rincian Target, realisasi dan capaian Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pajak Hotel	1.446.583.000,00	1.336.071.461,00	93,05
2	Pajak Restoran	11.402.243.000,00	13.691.683.292,50	120,08
3	Pajak Hiburan	887.769.000,00	913.183.926,35	120,86
4	Pajak Reklame	1.642.996.000,00	1.047.690.982,50	63,77
5	Pajak Penerangan Jalan	25.301.992.122,00	28.908.610.820,00	114,25
6	Pajak Parkir	105.933.000,00	110.312.000,00	104,13
7	Pajak Air Tanah	8.259.028.000,00	8.044.059.391,00	97,40
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.050.000,00	105,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	221.858.000,00	244.657.875,00	110,28
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	47.246.000.000,00	54.467.277.421,00	115,28
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.846.392.827,00	25.764.483.027,00	103,70
Jumlah		121.361.794.949,00	134.539.080.196,35	110,86

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022



b. Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp3.959.818.810,90 atau 106,15% dari target Rp3.730.400.620,00 meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp2.531.029.600,90 atau 149,64%, retribusi jasa usaha sebesar Rp787.601.710,00 atau 96,31% dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp641.187.500,00 atau 52,50%. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk retribusi daerah ditahun 2021 dan 2022 yaitu:

1. Penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir
3. Perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepu jalan umum

Tabel 1.17 Rincian Target, realisasi dan capaian Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Retribusi Jasa Umum	1.691.402.500,00	2.531.029.600,90	149,64
2	Retribusi Jasa Usaha	817.800.000,00	787.601.710,00	96,31
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.221.198.120,00	641.187.500,00	52,50
Jumlah		3.730.400.620,00	3.959.818.810,90	106,15

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp3.847.655.621,23 atau 100%, realisasi pembagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bankaltimtara sebesar Rp2.951.079.948,23 atau 76,70% dari target Rp3.847.655.621,00 serta realisasi bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada PT. BME sebesar Rp896.575.673,00 atau 100%. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1.18 Rincian Target, realisasi dan capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)	3.847.655.621,00	2.951.079.948,23	76,70
2	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)	0,00	896.575.673,00	100
Jumlah		3.847.655.621,00	3.847.655.621,00	100

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2022 sebesar Rp89.005.015.215,70 atau 99,59% dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.19 Rincian Target, realisasi dan capaian Lain-lain PAD Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	295.000.000,00	620.517.924,00	210,35
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	2.876.090.568,00	1.959.221.168,00	68,12
3	Jasa Giro	3.898.317.538,00	2.345.318.205,42	60,16
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.707.726,00	538.277.670,00	19.879,33
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.268.912.735,00	442.290.437,76	34,86
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.038.270,00	4.363.790,00	420,29
7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	682.732.263,00	761.541.251,00	111,54
9	Pendapatan BLUD	80.000.000.000,00	81.676.794.433,52	102,10
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	294.975.360,00	606.726.336,00	205,69
Jumlah		89.369.774.460,00	89.005.051.215,70	99,59

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.510.924.647.922,00 atau 112,63% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.341.461.652.813,00. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.20 Rincian Target, realisasi dan capaian Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.131.413.045.813,00	1.300.564.182.246,00	114,95
	Dana Perimbangan	1.115.207.439.813,00	1.284.358.576.246,00	115,17
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	815.108.859.000,00	992.587.903.854,00	121,77
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	67.735.832.000,00	118.875.091.042,00	175,50
	DBH PPh Pasal 21	59.328.965.000,00	62.884.975.179,00	105,99
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	800.700.000,00	1.359.294.689,00	169,76
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	261.000,00	0,00	0,00



No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	39.402.090.000,00	72.296.242.385,00	183,48
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	48.050.832.000,00	104.463.914.734,00	217,40
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	591.897.120.000,00	628.969.650.425,00	106,26
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.934.748.000,00	1.780.424.400,00	30,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	225.524.601.000,00	224.104.355.490,00	99,37
	DAU	225.524.601.000,00	224.104.355.490,00	99,37
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.847.018.905,00	18.939.771.631,00	90,85
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	576.600.000,00	537.300.350,00	93,18
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.411.109.000,00	1.383.618.720,00	98,05
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.071.036.000,00	1.741.008.939,00	84,06
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.801.235.503,00	1.664.923.055,00	92,43
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	490.250.000,00	486.100.000,00	99,15
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.278.595.000,00	1.261.538.750,00	98,67
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	105.938.000,00	98.210.000,00	92,71
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	4.167.934.000,00	3.853.844.800,00	92,46
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.804.072.000,00	2.876.329.900,00	75,61
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	716.122.000,00	645.000.000,00	90,07
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.424.127.402,00	4.391.897.117,00	99,27
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.726.960.908,00	48.726.545.271,00	90,69
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.755.200.000,00	14.021.296.243,00	83,68
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	480.000.000,00	280.000.000,00	58,33
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	24.749.592.000,00	22.989.336.120,00	92,89
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	720.000.000,00	452.500.000,00	62,85
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.889.290.000,00	3.872.884.000,00	99,58
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.079.500.000,00	1.057.150.000,00	97,93
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.511.448.088,00	2.511.448.088,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	406.876.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	47.916.000,00	47.916.000,00	100,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	373.164.400,00	373.164.400,00	100,00



No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	366.049.225,00	366.049.225,00	100,00
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.299.367.280,00	1.299.367.280,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	589.457.915,00	589.457.915,00	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	459.100.000,00	459.100.000,00	100,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	16.205.606.000,00	16.205.606.000,00	100,00
	DID	16.205.606.000,00	16.205.606.000,00	100,00
	DID	16.205.606.000,00	16.205.606.000,00	100,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.048.607.000,00	210.360.465.676,00	100,15
	Pendapatan Bagi Hasil	187.108.446.000,00	187.420.304.676,00	100,17
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.108.446.000,00	187.420.304.676,00	100,17
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.977.305.000,00	26.120.913.000,00	93,36
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.373.009.000,00	21.654.718.000,00	96,79
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	125.893.215.000,00	125.893.215.000,00	100,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	320.155.000,00	200.641.000,00	62,67
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.544.762.000,00	13.550.817.676,00	128,51
	Bantuan Keuangan	22.940.161.000,00	22.940.161.000,00	100,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.940.161.000,00	22.940.161.000,00	100,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	22.940.161.000,00	22.940.161.000,00	100,00
	Jumlah	1.341.461.652.813,00	1.510.924.647.922,00	112,63

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2022 sebesar Rp55.346.620.298,41 atau 767,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.210.880.219,00, selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.21 Rincian Target, realisasi dan capaian Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.210.880.219,00	55.346.620.298,41	767,54
1	Pendapatan Hibah	1.684.139.648,00	2.451.187.971,22	145,55
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.684.139.648,00	2.451.187.971,22	145,55
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.684.139.648,00	2.451.187.971,22	145,55
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Pengembalian Lainnya	1.684.139.648,00	2.451.187.971,22	145,55
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.526.740.571,00	52.895.432.327,19	957,08
	Lain-lain Pendapatan	0,00	46.670.841.704,19	100,00



No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	46.670.841.704,19	100,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	46.670.841.704,19	100,00
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.526.740.571,00	6.224.590.623,00	112,63
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.526.740.571,00	6.224.590.623,00	112,63
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	5.526.740.571,00	6.224.590.623,00	112,63
	Jumlah	7.210.880.219,00	55.346.620.298,41	767,54

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Bontang Tahun 2022 sebesar Rp1.444.607.025.717,71 atau 87,21% dari target sebesar Rp1.656.441.252.306,00, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.22 Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	642.491.331.961,00	548.463.610.192,11	85,37
	Belanja Barang dan Jasa	666.461.320.754,00	600.570.728.166,60	90,11
	Belanja Hibah	41.415.277.746,00	39.655.249.905,00	95,75
	Belanja Bantuan Sosial	5.405.608.000,00	2.882.790.000,00	53,33
	Belanja Bantuan Keuangan	315.000.000,00	312.747.040,00	99,28
	Jumlah Belanja Operasi	1.356.088.538.461,00	1.191.885.125.303,71	87,89
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah	2.405.518.000,00	2.387.756.800,00	99,26
	Belanja Peralatan dan Mesin	93.483.124.709,00	86.758.068.212,00	92,81
	Belanja Gedung dan Bangunan	59.028.310.106,00	57.127.100.859,00	96,78
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.980.483.127,00	101.770.176.243,00	90,08
	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.427.041.879,00	1.462.282.850,00	33,03
	Belanja Aset Lainnya	808.232.865,00	743.975.790,00	92,05
	Jumlah Belanja Modal	273.132.710.686,00	250.249.360.754,00	91,62
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tak Terduga	27.220.003.159,00	2.472.539.660,00	9,08
	Jumlah Belanja Tak Terduga	27.220.003.159,00	2.472.539.660,00	9,08
	JUMLAH	1.656.441.252.306,00	1.444.607.025.717,71	87,21

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022



Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah meliputi:

- a. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat terlaksana atau terlambat pelaksanaannya dikarenakan adanya kebijakan pengaturan anggaran kas dikarenakan adanya berdasarkan hasil perhitungan perkiraan penerimaan TA. 2022.
- b. Terbitnya Perpres 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 dimana paket-paket pekerjaan yang sejenis harus dikonsolidasi, hal tersebut menjadi perhatian perangkat daerah.
- c. Terdapat beberapa kegiatan proyek yang gagal lelang sehingga menyebabkan kegiatan proyek tersebut tidak bisa dikerjakan.
- d. Waktu pelaksanaan belum sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah.
- e. Faktor cuaca serta kelangkaan material yang menghambat proses pekerjaan kegiatan proyek dilapangan.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp20.000.000,00, sedangkan penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun 2022 sebesar Rp109.459.093.624,00 serta adanya penghematan belanja barang dan jasa-barang sebesar Rp62.989.061.599,13. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 1.23 Realisasi pembiayaan daerah Kota Bontang

No	Uraian	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-dana perimbangan	109.459.093.624,00	62.989.061.599,13	57,55
2	Penghematan belanja barang dan jasa-barang	0,00	62.989.061.599,13	100,00
3	Penyertaan modal daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Penjabaran pengelolaan pendapatan daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan secara bruto tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disusun secara nasional dengan mempertimbangkan kekayaan daerah yang disertakan serta memperhatikan fungsi penyertaan modal. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengupayakan pendayagunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dari apa yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2022. Dibeberapa sumber penerimaan pendapatan daerah terjadi penambahan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan akan ditekankan pada pengoptimalan pencapaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dituangkan dalam APBD tahun 2022.

Kebijakan umum dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah kota Bontang mengacu pada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB dan penagihan pajak daerah lainnya.
- d. Mengupayakan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
- e. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan kemandirian daerah Kota Bontang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Sejalan dengan kebijakan diatas, kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.1 Anggaran Perubahan pada Pendapatan

URAIAN	MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	108,446,368,921	121,361,794,949	12,915,426,028
Pendapatan Retribusi Daerah	4,323,926,000	3,730,400,620	(593,525,380)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	3,847,655,621	3,847,655,621
Lain-lain PAD yang Sah	85,097,600,832	89,369,774,460	7,639,744,628
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	197,867,895,753	218,309,625,650	20,441,729,897
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			



URAIAN	MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
Dana Bagi Hasil Pajak	121,940,013,000	127,865,758,000	5,925,745,000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	399,560,562,000	687,243,101,000	287,682,539,000
Dana Alokasi Umum	225,977,741,000	225,524,601,000	(453,140,000)
Dana Alokasi Khusus	0	74,573,979,813	74,573,979,813
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	747,478,316,000	1,115,207,439,813	290,958,578,649
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus	-	-	
Dana Penyesuaian	16,205,606,000	16,205,606,000	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	16,205,606,000	16,205,606,000	-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	162,861,857,000	187,108,446,000	24,246,589,000
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	162,861,857,000	187,108,446,000	24,246,589,000
Total Pendapatan Transfer	926,545,779,000	1,318,521,491,813	315,205,167,649
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	9,673,651,168	30,151,041,219	20,477,390,051
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	9,673,651,168	30,151,041,219	20,477,390,051
JUMLAH	1,134,087,325,921	1,566,982,158,682	356,124,287,597

Pendapatan Daerah dalam perubahan APBD kota Bontang tahun 2022 mengalami peningkatan dari Rp1.134.087.325.921,- menjadi Rp1.566.982.158.682,- atau bertambah sebesar Rp356.124.287.597,-. Peningkatan target pendapatan dalam perubahan APBD tahun 2022 ini Sebagian besar bersumber dari peningkatan target pendapatan transfer yang ditetapkan bertambah sebesar Rp315.205.167.649,-. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah hanya mengalami peningkatan sebesar Rp20.441.729.897,-.

2.2 Penjabaran pengelolaan Belanja daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam memproyeksi belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat, prioritas utama, serta kebijakan pemerintah Kota Bontang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan

pengaturan pola belanja yang proporsional, efektif dan efisien, upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bontang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang;
- b. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Bontang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2-14 tentang pemerintah daerah;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak, memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Belanja hibah dan bantuan sosial, penganggarannya belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomi peraturan kepala daerah tentang hibah dan bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dan hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- h. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- i. Penanganan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

- memperhitungkan yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- j. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah berupa pelayanan medical checkup sebanyak 1(satu) kali setahun;
- k. Pemberian tambahan penghasilan untuk PNS dilingkungan pemerintah Kota Bontang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBD tahun 2022, didalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan kebijakan perubahan alokasi belanja daerah yang secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.2 Anggaran Perubahan pada Belanja

URAIAN	MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	544,611,177,348	642,491,331,961	72,396,825,195
Belanja Barang dan Jasa	534,350,297,118	666,461,320,754	107,553,307,378
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	31,535,578,163	41,415,277,746	3,682,509,583
Belanja Bantuan Sosial	250,000,000	5,405,608,000	5,155,608,000
Belanja Bantuan Keuangan	-	315,000,000	315,000,000
Jumlah Belanja Operasi	1,110,747,052,629	1,356,088,538,461	189,103,250,156
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	-	2,405,518,000	2,405,518,000
Belanja Peralatan dan Mesin	33,852,288,917	93,483,124,709	51,132,298,532
Belanja Gedung dan Bangunan	69,130,283,388	59,028,310,106	(13,638,546,144)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63,512,735,987	112,980,483,127	41,543,812,960
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	4,427,041,879	3,952,776,693
Belanja Aset Lainnya	1,131,814,000	808,232,865	(422,581,135)
Jumlah Belanja Modal	167,627,122,292	273,132,710,686	84,973,278,906
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	15,713,151,000	27,220,003,159	11,506,852,159
Jumlah Belanja Tak Terduga	15,713,151,000	27,220,003,159	11,506,852,159
JUMLAH BELANJA	1.294.087.325.921	1,656,441,252,306	285,583,381,221

Kebijakan perubahan alokasi belanja daerah pada tahun 2022 menetapkan belanja daerah meningkat dari Rp1.294.087.325.921 menjadi Rp1.656.441.252.306,- atau bertambah sebesar Rp285.583.381.221,-.



Peningkatan alokasi belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2022 digunakan untuk penambahan alokasi belanja operasi Rp189.103.250.156,-, alokasi belanja modal sebesar Rp84.973.278.906,- dan belanja tak terduga sebesar Rp11.506.852.159,-.

Secara keseluruhan perubahan alokasi belanja daerah pada tahun anggaran 2022 dijabarkan secara terinci dalam penyelenggaraan urusan, program, kegiatan dan subkegiatan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Tabel anggaran perubahan tahun 2022

URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	696,622,988,584	920,604,682,640	223,981,694,056
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	205,857,210,867	287,395,600,367	81,538,389,500
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	205,857,210,867	287,395,600,367	81,538,389,500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160,322,803,555	214,620,908,140	54,298,104,585
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146,875,787,257	196,156,224,043	49,280,436,786
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146,875,787,257	196,156,224,043	49,280,436,786
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700,000,000	1,689,910,000	989,910,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	700,000,000	1,689,910,000	989,910,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,799,318,234	5,456,297,300	3,656,979,066
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	559,256,341	3,393,539,857	2,834,283,516
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,037,393	60,302,393	20,265,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	63,640,000	63,640,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,200,024,500	1,938,815,050	738,790,550
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	48,473,182	48,473,182
Pengadaan Mebel (SMPN 1 Bontang)	-	25,029,545	25,029,545
Pengadaan Mebel (SMPN 8 Bontang)	-	23,443,637	23,443,637
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,407,362,064	10,662,269,664	254,907,600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	21,010,000	6,010,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	531,910,000	571,910,000	40,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283,590,000	422,487,600	138,897,600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,576,862,064	9,646,862,064	70,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540,336,000	607,733,951	67,397,951
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	540,336,000	607,733,951	67,397,951
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44,413,356,409	71,626,096,704	27,212,740,295
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22,012,438,472	35,566,995,392	13,554,556,920
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	127,171,000	127,171,000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMPN 8 Bontang)	-	-	-
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	889,030,818	1,686,812,636	797,781,818
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	456,549,000	844,174,000	387,625,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	571,533,182	840,053,182	268,520,000
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1,902,029,282	1,938,029,282	36,000,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	365,526,364	548,526,364	183,000,000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2,714,505,860	1,770,500,000	(944,005,860)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Utara)	280,988,949	271,499,006	(9,489,943)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Utara)	246,966,301	238,463,022	(8,503,279)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Utara)	324,959,980	301,999,639	(22,960,341)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Utara)	271,592,567	268,500,000	(3,092,567)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Utara)	300,399,259	298,998,461	(1,400,798)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Utara)	183,975,000	176,000,000	(7,975,000)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Utara)	280,924,558	273,000,000	(7,924,558)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 008 Bontang Utara)	290,798,271	288,000,000	(2,798,271)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Utara)	207,337,395	197,499,942	(9,837,453)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Utara)	216,003,584	224,500,000	8,496,416
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Utara)	123,996,137	122,000,000	(1,996,137)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Selatan)	244,548,520	247,000,000	2,451,480
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Selatan)	293,999,756	294,500,000	500,244
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Selatan)	230,729,318	228,500,000	(2,229,318)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Selatan)	210,585,931	181,500,000	(29,085,931)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Selatan)	194,739,985	177,000,000	(17,739,985)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Selatan)	226,258,234	220,000,000	(6,258,234)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Selatan)	133,484,879	120,000,000	(13,484,879)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Selatan)	247,354,104	267,500,000	20,145,896
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Selatan)	191,799,535	176,480,300	(15,319,235)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Selatan)	224,402,571	215,000,000	(9,402,571)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 012 Bontang Selatan)	210,999,760	204,500,000	(6,499,760)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 013 Bontang Selatan)	207,994,845	194,000,000	(13,994,845)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 014 Bontang Selatan)	63,976,445	96,000,000	32,023,555
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 015 Bontang Selatan)	41,999,802	35,993,450	(6,006,352)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 016 Bontang Selatan)	94,450,880	94,000,000	(450,880)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Barat)	184,999,895	172,988,760	(12,011,135)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Barat)	129,913,977	122,499,758	(7,414,219)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Barat)	185,335,171	182,000,000	(3,335,171)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Barat)	344,383,709	343,500,000	(883,709)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	738,770,000	408,766,850	(330,003,150)
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7,694,520,000	7,586,520,000	(108,000,000)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	290,074,648	344,444,648	54,370,000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Utara)		600,811,692	600,811,692
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Utara)		481,046,630	481,046,630
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Utara)		766,564,358	766,564,358
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Utara)		681,505,666	681,505,666



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Utara)		643,685,540	643,685,540
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Utara)		349,553,456	349,553,456
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Utara)		838,590,350	838,590,350
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 008 Bontang Utara)		715,068,527	715,068,527
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Utara)		409,592,649	409,592,649
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Utara)		605,154,791	605,154,791
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Utara)		59,887,762	59,887,762
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Selatan)		575,543,455	575,543,455
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Selatan)		616,343,416	616,343,416
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Selatan)		467,591,434	467,591,434
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Selatan)		379,565,723	379,565,723
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 005 Bontang Selatan)		338,733,425	338,733,425
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 006 Bontang Selatan)		431,174,692	431,174,692
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 007 Bontang Selatan)		237,574,519	237,574,519
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 009 Bontang Selatan)		529,536,404	529,536,404
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 010 Bontang Selatan)		331,897,506	331,897,506
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 011 Bontang Selatan)		515,958,875	515,958,875
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 012 Bontang Selatan)		404,608,632	404,608,632
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 013 Bontang Selatan)		385,424,801	385,424,801
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 014 Bontang Selatan)		63,491,394	63,491,394
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 015 Bontang Selatan)		17,453,500	17,453,500
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 016 Bontang Selatan)		49,692,550	49,692,550
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 001 Bontang Barat)		406,948,648	406,948,648
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 002 Bontang Barat)		260,533,763	260,533,763
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 003 Bontang Barat)		374,102,416	374,102,416
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 004 Bontang Barat)		700,938,518	700,938,518
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12,756,777,317	21,595,966,677	8,839,189,360
Penambahan Ruang Kelas Baru	149,930,000	-	(149,930,000)
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMPN 1 Bontang)	-	527,824,955	527,824,955
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMPN 8 Bontang)	-	529,410,863	529,410,863
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	359,670,000	665,070,000	305,400,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	666,355,382	845,355,382	179,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	98,690,000	179,644,980	80,954,980
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	219,442,000	122,476,097	(96,965,903)
Pengadaan Mebel Sekolah	199,641,650	249,531,500	49,889,850
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1,498,160,020	1,783,988,237	285,828,217
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,597,653,365	1,985,640,000	387,986,635
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Bontang)	499,715,869	500,999,734	1,283,865
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Bontang)	475,701,392	486,000,000	10,298,608



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3 Bontang)	361,800,487	366,000,000	4,199,513
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Bontang)	323,999,312	324,600,000	600,688
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5 Bontang)	287,729,081	369,600,000	81,870,919
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6 Bontang)	157,634,852	165,000,000	7,365,148
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7 Bontang)	245,860,422	236,399,724	(9,460,698)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8 Bontang)	248,016,914	242,999,016	(5,017,898)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9 Bontang)	191,399,811	192,000,000	600,189
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	216,370,000	363,358,140	146,988,140
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4,190,210,000	4,185,210,000	(5,000,000)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	768,796,760	421,985,365	(346,811,395)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Bontang)		1,354,997,888	1,354,997,888
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Bontang)		1,120,974,838	1,120,974,838
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3 Bontang)		854,366,491	854,366,491
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4 Bontang)		706,803,835	706,803,835
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5 Bontang)		802,135,525	802,135,525
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6 Bontang)		348,008,717	348,008,717
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7 Bontang)		500,007,123	500,007,123
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8 Bontang)		682,346,995	682,346,995
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9 Bontang)		483,231,272	483,231,272
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9,421,300,620	13,160,794,635	3,739,494,015
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	195,871,000	195,870,900	(100)
Pengadaan Perlengkapan PAUD	3,998,750	3,998,750	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (TK Negeri 1 Bontang)	89,999,988	89,999,985	(3)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (TK Negeri 2 Bontang)	28,910,882	25,600,000	(3,310,882)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (TK Negeri 3 Bontang)	-	17,200,000	17,200,000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	9,102,520,000	8,425,247,000	(677,273,000)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	513,588,000	513,588,000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,710,810,000	3,889,290,000	(821,520,000)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	222,840,000	1,302,340,000	1,079,500,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	222,840,000	222,840,000	-
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1,079,500,000	1,079,500,000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	635,842,602	673,387,222	37,544,620
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	635,842,602	673,387,222	37,544,620
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	487,652,602	515,667,367	28,014,765
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	148,190,000	157,719,855	9,529,855
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	485,208,301	475,208,301	(10,000,000)
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	485,208,301	475,208,301	(10,000,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	485,208,301	475,208,301	(10,000,000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	257,756,655,244	339,140,646,390	81,383,991,146
DINAS KESEHATAN	120,131,121,288	141,204,603,646	21,073,482,358
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60,250,580,318	68,706,016,294	8,455,435,976
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,523,750	89,347,625	7,823,875
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,638,750	17,762,625	1,123,875
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57,985,000	57,785,000	(200,000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,900,000	13,800,000	6,900,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,180,759,885	49,315,927,075	3,135,167,190
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46,146,851,635	49,282,418,825	3,135,567,190
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23,520,750	23,120,750	(400,000)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,387,500	10,387,500	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	366,960,000	366,960,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	366,960,000	366,960,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,695,831,623	2,920,812,740	1,224,981,117
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,587,020	4,587,020	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141,421,000	1,605,932,982	1,464,511,982
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	354,775,186	311,769,358	(43,005,828)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198,000,417	173,764,380	(24,236,037)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,240,000	9,240,000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	987,808,000	815,519,000	(172,289,000)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	772,983,632	772,983,632
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	577,665,456	577,665,456
Pengadaan Mebel	-	195,318,176	195,318,176
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,546,394,560	10,501,394,560	(45,000,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385,610,000	340,610,000	(45,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,160,784,560	10,160,784,560	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,746,070,500	4,738,590,662	2,992,520,162
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,503,454,000	1,249,488,800	(253,965,200)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117,150,000	119,420,000	2,270,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125,466,500	3,369,681,862	3,244,215,362
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57,942,427,190	68,441,590,350	10,499,163,160
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,648,716,916	13,705,216,919	5,056,500,003
Pembangunan Puskesmas	4,276,494,500	-	(4,276,494,500)
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	417,696,280	1,096,696,280	679,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	328,700,140	1,635,580,140	1,306,880,000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150,760,000	544,784,271	394,024,271
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	369,210,996	171,975,254	(197,235,742)
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	816,830,000	5,174,395,974	4,357,565,974



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengadaan Obat, Vaksin	827,345,000	2,257,537,000	1,430,192,000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,047,270,000	2,484,838,000	1,437,568,000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	414,410,000	339,410,000	(75,000,000)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,629,949,510	53,011,159,580	5,381,210,070
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	231,179,041	182,107,041	(49,072,000)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80,100,000	80,100,000	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	85,365,000	92,525,000	7,160,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	131,921,240	84,578,047	(47,343,193)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	128,922,024	136,782,014	7,859,990
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	142,800,000	142,799,800	(200)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	57,173,413	51,912,647	(5,260,766)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	77,450,000	83,320,000	5,870,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19,950,000	15,450,000	(4,500,000)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	57,200,000	17,300,000	(39,900,000)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	64,869,810	99,382,800	34,512,990
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	48,019,800	158,532,547	110,512,747
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	6,330,510,968	7,246,386,268	915,875,300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	467,445,564	637,450,191	170,004,627
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	135,183,000	358,952,800	223,769,800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	359,929,479	409,983,452	50,053,973
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	211,150,175	349,106,020	137,955,845
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	103,925,000	302,192,900	198,267,900
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	751,782,000	740,582,166	(11,199,834)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	259,570,160	353,020,000	93,449,840
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26,251,202,200	25,001,080,600	(1,250,121,600)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	1,286,317,769	1,488,328,906	202,011,137
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	1,249,109,669	1,441,327,970	192,218,301
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	1,187,590,179	1,735,734,137	548,143,958
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	1,112,973,643	1,164,966,904	51,993,261
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Barat)	885,487,383	1,030,545,079	145,057,696
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	440,570,821	431,406,289	(9,164,532)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Klinik PNS)	925,010,738	1,371,285,912	446,275,174
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	537,199,659	537,199,641	(18)
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		140,924,900	140,924,900
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	549,999,936	1,007,573,590	457,573,654
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	460,195,695	1,128,628,095	668,432,400
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	425,676,857	619,529,753	193,852,896
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	399,996,913	1,077,922,827	677,925,914
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Barat)	570,240,415	1,201,206,126	630,965,711
Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	601,399,115	839,946,593	238,547,478



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Laboratorium Kesehatan)	830,009,344	829,867,114	(142,230)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	172,522,500	172,521,450	(1,050)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		248,700,001	248,700,001
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	289,429,677	539,387,055	249,957,378
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	18,812,497	18,812,497	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	253,706,000	303,706,000	50,000,000
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	16,911,180	216,868,558	199,957,378
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,374,331,087	1,185,826,796	(188,504,291)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1,028,497,500	597,307,250	(431,190,250)
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	172,948,701	346,444,825	173,496,124
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	172,884,886	242,074,721	69,189,835
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,320,820,901	2,641,097,135	1,320,276,234
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	64,671,501	64,664,735	(6,766)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	64,671,501	64,664,735	(6,766)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,256,149,400	2,576,432,400	1,320,283,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,256,149,400	2,576,432,400	1,320,283,000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	233,689,945	624,845,267	391,155,322
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9,569,900	9,519,900	(50,000)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9,569,900	9,519,900	(50,000)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41,326,500	449,612,500	408,286,000
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	41,326,500	449,612,500	408,286,000
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	152,811,500	139,801,004	(13,010,496)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	152,811,500	139,801,004	(13,010,496)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	29,982,045	25,911,863	(4,070,182)
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	29,982,045	25,911,863	(4,070,182)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	383,602,934	791,054,600	407,451,666
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26,650,000	26,650,000	-
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	26,650,000	26,650,000	-
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108,035,000	515,520,211	407,485,211



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	108,035,000	515,520,211	407,485,211
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248,917,934	248,884,389	(33,545)
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	248,917,934	248,884,389	(33,545)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	137,625,533,956	197,936,042,744	60,310,508,788
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131,561,712,751	186,747,525,905	55,185,813,154
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,080,893	-	(1,080,893)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	480,893	-	(480,893)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,000	-	(100,000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,000	-	(100,000)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,000	-	(100,000)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100,000	-	(100,000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000	-	(100,000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000	-	(100,000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,549,715,858	76,674,534,792	6,124,818,934
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69,741,515,858	75,866,334,792	6,124,818,934
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	808,200,000	808,200,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,000,000	-	(2,000,000)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,000,000	-	(1,000,000)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,000,000	-	(1,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,766,000	727,862,343	707,096,343
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,000,000	612,314,343	611,314,343
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000	-	(100,000)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000	-	(100,000)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000	-	(100,000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,466,000	115,548,000	96,082,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,100,000	191,364,000	190,264,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,000,000	-	(1,000,000)
Pengadaan Mebel	100,000	191,364,000	191,264,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,520,100,000	3,865,500,000	1,345,400,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000	-	(100,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,520,000,000	3,865,500,000	1,345,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466,950,000	811,166,600	344,216,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000	-	(100,000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,000,000	57,500,000	10,500,000
Pemeliharaan Mebel	100,000	-	(100,000)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219,750,000	553,666,600	333,916,600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	200,000,000	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	58,000,000,000	104,477,098,170	46,477,098,170
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	58,000,000,000	104,477,098,170	46,477,098,170



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6,062,721,205	8,125,539,089	2,062,817,884
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6,062,621,205	8,125,539,089	2,062,917,884
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1,000,000	-	(1,000,000)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	400,500,000	452,723,360	52,223,360
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,000,000	75,179,920	74,179,920
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,459,000,000	7,198,614,604	1,739,614,604
Pengadaan Bahan Habis Pakai	100,000	-	(100,000)
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200,021,205	399,021,205	199,000,000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,000,000	-	(1,000,000)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100,000	-	(100,000)
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,000	-	(100,000)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,000,000	3,012,877,750	3,011,877,750
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	2,812,877,750	2,812,877,750
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	2,812,877,750	2,812,877,750
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000	200,000,000	199,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000	200,000,000	199,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100,000	50,100,000	50,000,000
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000	50,100,000	50,000,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100,000	50,100,000	50,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	142,033,702,824	183,511,660,362	41,477,957,538
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	142,033,702,824	183,511,660,362	41,477,957,538
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,479,616,860	19,208,470,041	1,728,853,181
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,124,738,433	14,531,356,037	1,406,617,604
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,122,338,433	14,528,956,037	1,406,617,604
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,400,000	2,400,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	341,032,399	290,155,455	(50,876,944)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	341,032,399	290,155,455	(50,876,944)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,289,915,623	1,304,098,122	14,182,499
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,582,734	6,582,734	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269,407,768	290,157,768	20,750,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,072,253	33,612,253	(1,460,000)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78,365,720	77,314,387	(1,051,333)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,866,000	7,084,000	(12,782,000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	761,824,168	771,330,000	9,505,832
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	118,796,980	118,016,980	(780,000)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	265,155,205	623,822,027	358,666,822
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	142,962,725	142,962,725
Pengadaan Mebel	101,920,004	294,133,191	192,213,187



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163,235,201	186,726,111	23,490,910
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,766,113,200	1,739,713,200	(26,400,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	10,000,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	326,400,000	300,000,000	(26,400,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,429,713,200	1,429,713,200	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692,662,000	719,325,200	26,663,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	529,742,000	563,135,200	33,393,200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132,950,000	127,680,000	(5,270,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,970,000	28,510,000	(1,460,000)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17,044,757,712	40,964,735,253	23,919,977,541
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17,044,757,712	40,964,735,253	23,919,977,541
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2,350,000,000	2,456,458,059	106,458,059
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,350,506,264	2,555,690,885	205,184,621
Pembangunan Tanggul Sungai	-	-	-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	9,203,030,344	28,956,686,070	19,753,655,726
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	100,000,000	347,950,000	247,950,000
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	863,240,360	799,644,360	(63,596,000)
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	235,111,732	235,111,732	-
Normalisasi/Restorasi Sungai	1,942,869,012	5,613,194,147	3,670,325,135
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4,386,426,513	11,642,749,725	7,256,323,212
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4,386,426,513	11,642,749,725	7,256,323,212
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	114,719,816	673,558,896	558,839,080
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	216,000,000	237,000,000	21,000,000
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3,129,491,632	5,945,891,264	2,816,399,632
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	536,059,632	536,739,632	680,000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	218,571,632	4,065,843,632	3,847,272,000
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	171,583,801	183,716,301	12,132,500
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	659,787,816	570,125,286	(89,662,530)
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	659,787,816	570,125,286	(89,662,530)
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	523,567,816	523,567,816	-
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	136,220,000	46,557,470	(89,662,530)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,011,695,890	3,765,229,208	(246,466,682)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,011,695,890	3,765,229,208	(246,466,682)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	258,109,816	258,109,816
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1,471,801,896	1,241,833,236	(229,968,660)
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	-	-
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	191,695,954	-	(191,695,954)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,101,707,392	1,131,676,052	29,968,660
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	-
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	853,292,544	-	(853,292,544)
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	265,000,000	1,005,412,000	740,412,000
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	128,198,104	128,198,104	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9,867,242,288	11,287,425,757	1,420,183,469
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,867,242,288	11,287,425,757	1,420,183,469
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2,502,785,208	2,890,932,060	388,146,852
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	540,500,000	623,100,000	82,600,000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,531,714,576	2,518,562,640	986,848,064
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	804,286,896	914,932,007	110,645,111
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3,733,733,792	3,633,627,234	(100,106,558)
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	251,200,000	251,200,000	-
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150,000,000	102,050,000	(47,950,000)
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	25,800,000	25,800,000	-
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	283,021,816	283,021,816	-
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	44,200,000	44,200,000	-
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	60,769,710,084	46,988,624,989	(13,781,085,095)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	60,769,710,084	46,988,624,989	(13,781,085,095)
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	700,000,000	865,863,972	165,863,972
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	54,813,922,345	38,840,407,361	(15,973,514,984)
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5,255,787,739	7,282,353,656	2,026,565,917
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	25,314,939,661	46,425,301,375	21,110,361,714
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	25,314,939,661	46,425,301,375	21,110,361,714
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500,000,000	615,681,632	115,681,632
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300,000,000	377,130,000	77,130,000
Pembangunan Jalan	6,672,636,896	5,993,723,067	(678,913,829)
Rekonstruksi Jalan	8,506,697,032	18,348,732,767	9,842,035,735
Rehabilitasi Jalan	1,634,474,080	5,950,073,908	4,315,599,828
Pemeliharaan Berkala Jalan	560,000,000	7,201,863,721	6,641,863,721
Pemeliharaan Rutin Jalan	1,500,000,000	2,670,405,094	1,170,405,094
Pembangunan Jembatan	5,281,720,837	4,723,478,392	(558,242,445)
Penggantian Jembatan	100,000,000	99,820,346	(179,654)
Pemeliharaan Berkala Jembatan	259,410,816	444,392,448	184,981,632
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	821,270,000	705,781,496	(115,488,504)
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	198,777,500	198,777,453	(47)
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	198,777,500	198,777,453	(47)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	622,492,500	507,004,043	(115,488,457)
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20,000,000	20,000,000	-
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	602,492,500	487,004,043	(115,488,457)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,678,256,000	1,953,217,232	274,961,232
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,318,882,000	1,651,418,332	332,536,332
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1,143,882,000	1,276,399,700	132,517,700
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	-
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	175,000,000	375,018,632	200,018,632
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	46,760,000	33,284,900	(13,475,100)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	46,760,000	33,284,900	(13,475,100)
Sistem Informasi Penataan Ruang	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	312,614,000	268,514,000	(44,100,000)
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	312,614,000	268,514,000	(44,100,000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40,843,837,880	45,585,748,845	4,741,910,965
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40,843,837,880	45,585,748,845	4,741,910,965
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,805,681,728	13,076,486,181	3,270,804,453
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,491,780	6,377,155	(35,114,625)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,912,278	3,912,242	(24,000,036)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,579,502	2,464,913	(11,114,589)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,349,802,617	7,990,631,244	640,828,627
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,347,552,617	7,988,825,914	641,273,297
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,500,000	1,055,735	(444,265)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750,000	749,595	(405)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61,000,000	854,250,295	793,250,295
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	473,383,545	473,383,545
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61,000,000	380,866,750	319,866,750
Administrasi Umum Perangkat Daerah	628,798,889	2,222,511,006	1,593,712,117
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207,407,477	1,187,029,645	979,622,168
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73,532,589	138,288,776	64,756,187
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,010,823	269,640,585	213,629,762
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,632,000	-	(16,632,000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275,216,000	627,552,000	352,336,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,041,629,792	1,048,883,831	7,254,039
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	9,000,000	3,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	-	(30,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,005,629,792	1,039,883,831	34,254,039
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682,958,650	953,832,650	270,874,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	542,326,400	813,015,300	270,688,900



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140,632,250	140,817,350	185,100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4,979,524,184	4,998,109,411	18,585,227
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	560,000,000	48,824,382	(511,175,618)
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	140,000,000	-	(140,000,000)
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	140,000,000	-	(140,000,000)
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	140,000,000	48,824,382	(91,175,618)
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	140,000,000	-	(140,000,000)
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	977,718,379	541,353,000	(436,365,379)
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	331,394,642	300,213,000	(31,181,642)
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	300,000,000	-	(300,000,000)
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	346,323,737	241,140,000	(105,183,737)
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3,441,805,805	4,407,932,029	966,126,224
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (UPT Rumah Susun Sederhana Sewa)	2,668,329,955	3,697,634,991	1,029,305,036
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT Rumah Susun Sederhana Sewa)	773,475,850	710,297,038	(63,178,812)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8,905,741,939	7,136,002,292	(1,769,739,647)
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100,000,000	264,080,000	164,080,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,000,000	264,080,000	164,080,000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	500,000,000	271,500,000	(228,500,000)
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	250,000,000	-	(250,000,000)
Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	250,000,000	271,500,000	21,500,000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8,305,741,939	6,600,422,292	(1,705,319,647)
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2,618,600,000	2,547,957,517	(70,642,483)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2,813,575,000	2,435,232,775	(378,342,225)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	100,000,000	256,240,000	156,240,000
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2,773,566,939	1,360,992,000	(1,412,574,939)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,007,500,000	253,700,000	(753,800,000)
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1,007,500,000	253,700,000	(753,800,000)
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,007,500,000	253,700,000	(753,800,000)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16,145,390,029	20,121,450,961	3,976,060,932
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	16,145,390,029	20,121,450,961	3,976,060,932
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1,600,000,000	1,663,010,750	63,010,750
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14,295,390,029	18,158,897,711	3,863,507,682
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	250,000,000	299,542,500	49,542,500



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	36,929,438,137	45,223,788,782	8,294,350,645
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13,641,195,774	15,271,160,600	1,629,964,826
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,273,472,854	14,016,414,035	1,742,941,181
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,392,051,492	7,184,674,198	792,622,706
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,392,051,492	7,184,674,198	792,622,706
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350,000,000	334,295,439	(15,704,561)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200,000,000	334,295,439	134,295,439
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	-	(150,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	797,252,962	1,036,807,048	239,554,086
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,013,455	22,026,910	(12,986,545)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148,558,541	338,184,440	189,625,899
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,030,000	85,688,991	(11,341,009)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,278,492	58,748,707	(1,529,785)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456,372,474	532,158,000	75,785,526
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,179,918,400		(4,179,918,400)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000		(10,000,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000		(200,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,969,918,400		(3,969,918,400)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554,250,000		(554,250,000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000		(500,000,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54,250,000		(54,250,000)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	486,890,000	486,890,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	486,890,000	486,890,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4,317,248,800	4,317,248,800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	200,000,000	200,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	4,107,248,800	4,107,248,800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	656,498,550	656,498,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	602,248,550	602,248,550
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	54,250,000	54,250,000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,367,722,920	1,254,746,565	(112,976,355)
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,317,722,920	1,025,093,810	(292,629,110)
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	250,000,000	77,577,500	(172,422,500)
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	272,135,393	219,065,450	(53,069,943)
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	178,329,630	287,364,000	109,034,370
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	416,000,000	426,457,360	10,457,360



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	201,257,897	14,629,500	(186,628,397)
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50,000,000	229,652,755	179,652,755
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50,000,000	229,652,755	179,652,755
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,941,001,014	7,189,684,936	1,248,683,922
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,062,218,966	5,861,950,275	799,731,309
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,708,969,960	3,093,113,320	384,143,360
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,708,969,960	3,093,113,320	384,143,360
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122,250,890	45,818,178	(76,432,712)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122,250,890	45,818,178	(76,432,712)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	490,934,018	838,687,129	347,753,111
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,377,658	-	(8,377,658)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	134,831,195	134,831,195
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,398,749	91,398,749	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,157,611	50,257,185	(14,900,426)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326,000,000	562,200,000	236,200,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980,618,400	1,128,122,400	147,504,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,100,000	5,100,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116,700,000	116,700,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858,818,400	1,006,322,400	147,504,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759,445,698	756,209,248	(3,236,450)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	739,445,698	746,209,248	6,763,550
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	878,782,048	1,327,734,661	448,952,613
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	10,800,000	10,800,000	-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10,800,000	10,800,000	-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	259,900,000	716,411,634	456,511,634
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	72,000,000	24,000,000	(48,000,000)
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	662,411,634	662,411,634
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	187,900,000	30,000,000	(157,900,000)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	608,082,048	600,523,027	(7,559,021)
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	349,862,250	303,122,500	(46,739,750)
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	258,219,798	297,400,527	39,180,729
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17,347,241,349	22,762,943,246	5,415,701,897
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,619,268,599	18,109,564,448	3,490,295,849
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412,500	14,400,000	13,987,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412,500	14,400,000	13,987,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,897,160,575	6,886,913,706	989,753,131
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,896,748,075	6,867,297,456	970,549,381
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	412,500	19,616,250	19,203,750
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	878,483,123	1,616,730,888	738,247,765



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	878,483,123	1,616,730,888	738,247,765
Administrasi Umum Perangkat Daerah	621,653,591	780,867,684	159,214,093
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,973,724	14,893,724	(80,000)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206,885,275	211,735,089	4,849,814
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142,272,592	130,734,871	(11,537,721)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,800,000	30,800,000	20,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246,722,000	392,704,000	145,982,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	199,936,530	199,936,530
Pengadaan Mebel	-	199,936,530	199,936,530
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,154,977,710	7,419,874,390	1,264,896,680
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,410,000	7,410,000	1,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272,400,000	285,698,400	13,298,400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,876,167,710	7,126,765,990	1,250,598,280
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,066,581,100	1,190,841,250	124,260,150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	681,866,100	911,726,750	229,860,650
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,200,000	27,200,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	326,870,000	221,715,000	(105,155,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,645,000	30,199,500	(445,500)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,727,972,750	4,653,378,798	1,925,406,048
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,640,251,523	4,326,103,744	1,685,852,221
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	750,000	-	(750,000)
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	304,899,988	289,622,000	(15,277,988)
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	387,270,880	360,346,399	(26,924,481)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1,932,330,655	3,088,753,345	1,156,422,690
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15,000,000	587,382,000	572,382,000
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	38,773,454	29,448,454	(9,325,000)
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9,360,000	-	(9,360,000)
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	29,413,454	29,448,454	35,000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	48,947,773	297,826,600	248,878,827
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	21,862,173	271,501,000	249,638,827
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	27,085,600	26,325,600	(760,000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13,202,143,632	19,747,237,894	6,545,094,262
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13,202,143,632	19,747,237,894	6,545,094,262
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,536,539,567	10,920,548,949	1,384,009,382
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,403,638,882	6,785,008,992	381,370,110
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,403,638,882	6,785,008,992	381,370,110
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,532,000	107,468,900	51,936,900
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55,532,000	107,468,900	51,936,900



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	745,531,741	1,101,218,630	355,686,889
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238,393,174	448,046,079	209,652,905
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,900,973	87,614,411	41,713,438
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,025,594	41,080,140	12,054,546
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432,212,000	524,478,000	92,266,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,019,356,944	2,503,940,277	484,583,333
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000	5,500,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,090,000	50,690,000	600,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,963,766,944	2,447,750,277	483,983,333
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312,480,000	422,912,150	110,432,150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283,340,000	393,772,150	110,432,150
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,140,000	29,140,000	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	335,388,364	333,503,273	(1,885,091)
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	335,388,364	333,503,273	(1,885,091)
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	39,616,363	41,540,000	1,923,637
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	55,832,725	56,223,635	390,910
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	195,259,276	192,771,456	(2,487,820)
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	44,680,000	42,968,182	(1,711,818)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,528,608,629	2,546,004,675	17,396,046
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2,391,163,175	2,434,364,675	43,201,500
Penyediaan Permakanan	2,089,193,175	1,904,681,675	(184,511,500)
Penyediaan Alat Bantu	138,540,000	134,205,000	(4,335,000)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	51,510,000	64,142,000	12,632,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	51,210,000	51,210,000	-
Pemberian Layanan Rujukan	60,710,000	280,126,000	219,416,000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	137,445,454	111,640,000	(25,805,454)
Penyediaan Permakanan	21,690,000	-	(21,690,000)
Penyediaan Sandang	21,665,454	-	(21,665,454)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	42,690,000	36,440,000	(6,250,000)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31,400,000	18,600,000	(12,800,000)
Pemberian Layanan Rujukan	20,000,000	56,600,000	36,600,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	508,379,438	5,653,601,488	5,145,222,050
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	508,379,438	5,653,601,488	5,145,222,050
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	251,209,993	349,999,993	98,790,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	178,159,445	178,159,445	-
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	79,010,000	5,125,442,050	5,046,432,050
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	293,227,634	293,579,509	351,875
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	231,537,634	231,889,509	351,875
Penyediaan Makanan	209,847,634	210,199,509	351,875



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Sandang	21,690,000	21,690,000	-
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	61,690,000	61,690,000	-
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	61,690,000	61,690,000	-
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	193,776,753,066	246,694,692,015	52,917,938,949
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8,747,764,399	11,947,584,760	3,199,820,361
DINAS KETENAGAKERJAAN	8,747,764,399	11,947,584,760	3,199,820,361
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,236,198,777	8,686,597,972	1,450,399,195
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,306,460,720	6,021,697,626	715,236,906
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,306,460,720	6,021,697,626	715,236,906
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000	263,850,000	243,850,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000	263,850,000	243,850,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	292,472,057	521,067,912	228,595,855
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,594,843	118,810,937	85,216,094
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,599,194	42,146,955	3,547,761
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,918,020	29,918,020	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,360,000	330,192,000	139,832,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	199,538,134	199,538,134
Pengadaan Mebel	-	199,538,134	199,538,134
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,493,612,000	1,513,848,900	20,236,900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000	3,500,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,000,000	48,000,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,442,112,000	1,462,348,900	20,236,900
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,654,000	166,595,400	42,941,400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,054,000	160,395,400	41,341,400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,600,000	6,200,000	1,600,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,252,886,875	2,830,328,741	1,577,441,866
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,252,886,875	2,830,328,741	1,577,441,866
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1,252,886,875	2,830,328,741	1,577,441,866
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	37,479,811	40,494,811	3,015,000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	25,479,890	28,494,890	3,015,000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	25,479,890	28,494,890	3,015,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	11,999,921	11,999,921	-
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	11,999,921	11,999,921	-
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	221,198,936	390,163,236	168,964,300
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	221,198,936	390,163,236	168,964,300
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149,999,630	149,999,630	-
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,999,306	8,999,306	-



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	62,200,000	231,164,300	168,964,300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8,449,819,859	10,103,449,165	1,653,629,306
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8,449,819,859	10,103,449,165	1,653,629,306
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,287,581,817	8,133,782,384	846,200,567
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,489,434,802	6,100,974,596	611,539,794
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,486,714,802	6,098,254,596	611,539,794
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,720,000	2,720,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,000,000	-	(33,000,000)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33,000,000	-	(33,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,081,815	528,633,018	230,551,203
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,225,326	163,845,984	74,620,658
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,206,489	27,387,034	9,180,545
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,650,000	337,400,000	146,750,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,181,038,400	1,129,858,224	(51,180,176)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	7,000,000	2,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,600,000	-	(6,600,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,169,438,400	1,122,858,224	(46,580,176)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286,026,800	374,316,546	88,289,746
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265,776,800	325,197,000	59,420,200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,250,000	20,250,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	28,869,546	28,869,546
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	373,199,993	295,032,988	(78,167,005)
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	373,199,993	295,032,988	(78,167,005)
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	373,199,993	295,032,988	(78,167,005)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	152,015,300	828,384,238	676,368,938
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	71,330,000	50,970,000	(20,360,000)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	71,330,000	50,970,000	(20,360,000)
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	80,685,300	777,414,238	696,728,938
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80,685,300	430,685,138	349,999,838
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	346,729,100	346,729,100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	461,809,400	506,691,040	44,881,640
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,118,000	-	(55,118,000)
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55,118,000	-	(55,118,000)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	304,142,227	395,727,124	91,584,897
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	304,142,227	395,727,124	91,584,897



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	102,549,173	110,963,916	8,414,743
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	102,549,173	110,963,916	8,414,743
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85,223,712	85,223,712	-
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	85,223,712	85,223,712	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	64,893,803	64,893,803	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20,329,909	20,329,909	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	342,711,233	254,334,803	(88,376,430)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	170,814,609	150,392,184	(20,422,425)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20,393,789	-	(20,393,789)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150,420,820	150,392,184	(28,636)
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,191,073	1,800,000	(17,391,073)
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,191,073	1,800,000	(17,391,073)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	152,705,551	102,142,619	(50,562,932)
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,300,776	102,142,619	(158,157)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,404,775	-	(50,404,775)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15,442,053,458	19,704,282,743	4,262,229,285
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	15,442,053,458	19,704,282,743	4,262,229,285
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,996,905,242	16,856,035,098	2,859,129,856
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,466,146,758	10,995,326,271	529,179,513
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,466,146,758	10,995,326,271	529,179,513
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	197,890,000	197,890,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	197,890,000	197,890,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	837,583,884	2,092,520,977	1,254,937,093
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163,325,516	998,086,427	834,760,911
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,758,215	113,177,644	89,419,429
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87,834,153	105,343,906	17,509,753
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,716,000	1,716,000	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,200,000	13,635,000	9,435,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556,750,000	860,562,000	303,812,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,258,293,600	2,825,193,600	566,900,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,720,000	21,220,000	7,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,700,000	16,700,000	3,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,230,873,600	2,787,273,600	556,400,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434,881,000	745,104,250	310,223,250



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	424,266,000	714,856,750	290,590,750
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,615,000	30,247,500	19,632,500
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,313,336,682	2,716,442,814	1,403,106,132
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	347,890,939	723,607,461	375,716,522
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	347,890,939	723,607,461	375,716,522
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	315,156,094	283,269,808	(31,886,286)
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	315,156,094	283,269,808	(31,886,286)
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	650,289,649	1,709,565,545	1,059,275,896
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	328,969,750	628,253,350	299,283,600
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	321,319,899	1,081,312,195	759,992,296
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	65,934,449	65,927,942	(6,507)
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	65,934,449	65,927,942	(6,507)
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	65,934,449	65,927,942	(6,507)
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	65,877,085	65,876,889	(196)
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	65,877,085	65,876,889	(196)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	65,877,085	65,876,889	(196)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	587,392,204	644,715,076	57,322,872
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	587,392,204	644,715,076	57,322,872
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	341,727,279	345,371,854	3,644,575
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	341,727,279	345,371,854	3,644,575
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	152,926,909	156,615,261	3,688,352
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	188,800,370	188,756,593	(43,777)
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	212,773,946	246,354,946	33,581,000
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	212,773,946	246,354,946	33,581,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	212,773,946	246,354,946	33,581,000
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	32,890,979	52,988,276	20,097,297
Penerbitan Izin Membuka Tanah	32,890,979	52,988,276	20,097,297
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	32,890,979	52,988,276	20,097,297
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41,029,167,546	44,900,735,840	3,871,568,294
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41,029,167,546	44,900,735,840	3,871,568,294
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,808,941,270	16,091,799,395	3,282,858,125
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,830,000	1,830,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,830,000	1,830,000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,360,148,841	8,826,749,156	466,600,315
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,358,148,841	8,824,749,156	466,600,315
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	2,000,000	-



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270,000,000	235,000,000	(35,000,000)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	270,000,000	235,000,000	(35,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	808,908,436	1,545,443,578	736,535,142
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181,679,581	633,261,605	451,582,024
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,944,832	16,095,223	(30,849,609)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,894,023	30,896,750	3,002,727
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552,390,000	865,190,000	312,800,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,226,217,060	1,156,217,060	(70,000,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	7,500,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,000,000	75,000,000	(21,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,122,717,060	1,073,717,060	(49,000,000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,141,836,933	4,326,559,601	2,184,722,668
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,826,775,300	4,020,445,100	2,193,669,800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,770,000	100,890,000	120,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214,291,633	205,224,501	(9,067,132)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	300,363,550	363,373,550	63,010,000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	149,990,000	-	(149,990,000)
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	149,990,000	-	(149,990,000)
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150,373,550	363,373,550	213,000,000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	150,373,550	363,373,550	213,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	502,000,759	346,980,610	(155,020,149)
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	387,562,214	327,970,610	(59,591,604)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	201,450,000	161,440,000	(40,010,000)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	9,915,909	6,325,000	(3,590,909)
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	176,196,305	160,205,610	(15,990,695)
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	114,438,545	19,010,000	(95,428,545)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	114,438,545	19,010,000	(95,428,545)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11,587,205,144	10,891,783,356	(695,421,788)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11,587,205,144	10,891,783,356	(695,421,788)
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,000,000	-	(100,000,000)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11,437,205,144	10,841,783,356	(595,421,788)
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	50,000,000	50,000,000	-
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36,767,950	7,222,500	(29,545,450)
Penyimpanan Sementara Limbah B3	36,767,950	7,222,500	(29,545,450)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	36,767,950	7,222,500	(29,545,450)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	15,100,000	-	(15,100,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15,100,000	-	(15,100,000)
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	9,600,000	-	(9,600,000)
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,500,000	-	(2,500,000)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	3,000,000	-	(3,000,000)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	127,101,812	-	(127,101,812)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127,101,812	-	(127,101,812)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	107,101,812	-	(107,101,812)
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20,000,000	-	(20,000,000)
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	159,553,827	131,486,327	(28,067,500)
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159,553,827	131,486,327	(28,067,500)
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	159,553,827	131,486,327	(28,067,500)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	64,716,250	25,990,886	(38,725,364)
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	64,716,250	25,990,886	(38,725,364)
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	64,716,250	25,990,886	(38,725,364)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15,427,416,984	17,042,099,216	1,614,682,232
Pengelolaan Sampah	15,427,416,984	17,042,099,216	1,614,682,232
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	234,450,000	434,450,000	200,000,000
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14,533,659,132	15,585,153,182	1,051,494,050
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	99,996,592	59,821,592	(40,175,000)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	24,975,000	-	(24,975,000)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	534,336,260	962,674,442	428,338,182
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,502,451,572	11,419,221,738	2,916,770,166
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,502,451,572	11,419,221,738	2,916,770,166
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,131,629,075	9,124,591,290	992,962,215
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,197,884,346	6,688,812,379	490,928,033
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,197,884,346	6,688,812,379	490,928,033
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000	245,928,575	235,928,575
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	245,928,575	245,928,575
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000	-	(10,000,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	502,568,572	476,872,202	(25,696,370)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,070,995	5,070,995	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,398,248	103,550,536	(46,847,712)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,750,513	35,175,350	(14,575,163)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93,416,816	82,903,321	(10,513,495)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203,932,000	250,172,000	46,240,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,288,505	455,397,504	389,108,999
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	452,090,000	452,090,000
Pengadaan Mebel	62,981,001	-	(62,981,001)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,307,504	3,307,504	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,023,826,752	1,013,378,080	(10,448,672)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,200,000	9,200,000	(10,000,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229,200,000	229,200,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775,426,752	774,978,080	(448,672)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331,060,900	244,202,550	(86,858,350)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219,211,600	188,638,050	(30,573,550)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,900,000	11,900,000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,949,300	43,664,500	(23,284,800)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,000,000	-	(33,000,000)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	344,935,600	2,282,598,799	1,937,663,199
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	344,935,600	2,282,598,799	1,937,663,199
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	249,671,600	540,292,228	290,620,628
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95,264,000	1,742,306,571	1,647,042,571
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	25,886,897	12,031,649	(13,855,248)
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	13,232,002	3,232,002	(10,000,000)
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	13,232,002	3,232,002	(10,000,000)
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,654,895	8,799,647	(3,855,248)
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,654,895	8,799,647	(3,855,248)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	838,955,927	1,120,730,139	281,774,212
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	838,955,927	1,120,730,139	281,774,212
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	838,955,927	1,120,730,139	281,774,212
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	838,955,927	1,120,730,139	281,774,212
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	51,240,000	49,922,000	(1,318,000)
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	158,936,335	59,581,335	(99,355,000)
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	126,689,838	168,739,838	42,050,000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	502,089,754	842,486,966	340,397,212
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	424,512,892	4,209,775,594	3,785,262,702
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	424,512,892	4,209,775,594	3,785,262,702
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160,788,212	237,624,312	76,836,100



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	70,787,500	70,728,600	(58,900)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	70,787,500	70,728,600	(58,900)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90,000,712	166,895,712	76,895,000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		2,495,000	2,495,000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		74,400,000	74,400,000
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	90,000,712	90,000,712	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	60,725,000	1,824,994,290	1,764,269,290
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	60,725,000		
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	60,725,000		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		308,267,740	308,267,740
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4,355,000	4,355,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		24,931,820	24,931,820
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang		70,640,920	70,640,920
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		46,800,000	46,800,000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		121,500,000	121,500,000
Pengendalian Program KKBPK		40,040,000	40,040,000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		72,000,000	72,000,000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		72,000,000	72,000,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		1,375,726,550	1,375,726,550
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		16,575,000	16,575,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		319,424,100	319,424,100
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		948,595,000	948,595,000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		15,900,000	15,900,000
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		75,232,450	75,232,450
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		69,000,000	69,000,000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		69,000,000	69,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	202,999,680	2,147,156,992	1,944,157,312
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	126,206,180	2,079,363,492	1,953,157,312
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)		330,000,000	330,000,000
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	36,364,540	236,364,540	200,000,000
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	33,349,140	549,581,484	516,232,344
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan		694,560,000	694,560,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	56,492,500	268,857,468	212,364,968
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	76,793,500	67,793,500	(9,000,000)
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	76,793,500	67,793,500	(9,000,000)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17,636,045,793	21,635,469,602	3,999,423,809
DINAS PERHUBUNGAN	17,636,045,793	21,635,469,602	3,999,423,809
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,732,046,611	14,355,272,185	2,623,225,574
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,215,500	3,215,500	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,266,000	1,266,000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,949,500	1,949,500	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,939,884,772	7,161,515,673	221,630,901
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,936,935,382	7,158,566,283	221,630,901
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	949,500	949,500	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	949,500	949,500	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,050,390	1,050,390	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285,610,000	1,419,293,535	1,133,683,535
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	387,923,535	387,923,535
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	285,610,000	1,031,370,000	745,760,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	502,990,095	815,784,933	312,794,838
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	283,632	283,632	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,854,245	57,354,448	1,500,203
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,231,700	110,311,700	53,080,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82,762,848	92,539,153	9,776,305
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306,857,670	555,296,000	248,438,330
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,396,086,970	3,327,226,970	(68,860,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,518,170	4,558,170	1,040,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244,900,000	244,900,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,147,668,800	3,077,768,800	(69,900,000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604,259,274	1,628,235,574	1,023,976,300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	529,274,000	1,538,248,500	1,008,974,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65,185,274	65,185,274	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,800,000	24,801,800	15,001,800
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5,903,999,182	7,280,197,417	1,376,198,235
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,903,999,182	7,100,235,182	1,196,236,000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,317,782,670	2,612,250,670	294,468,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	199,890,000	-	(199,890,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,386,326,512	4,487,984,512	1,101,658,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	179,962,235	179,962,235
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	179,962,235	179,962,235
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,400,324,418	19,630,707,134	1,230,382,716
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,400,324,418	19,630,707,134	1,230,382,716
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,678,026,244	7,750,579,662	72,553,418
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,061,541,206	5,039,775,093	(21,766,113)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,054,583,156	5,032,817,043	(21,766,113)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,479,025	3,479,025	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,479,025	3,479,025	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219,282,500	139,282,000	(80,000,500)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133,072,500	33,072,000	(100,000,500)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86,210,000	106,210,000	20,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	882,466,648	850,782,401	(31,684,247)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,249,435	3,249,435	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233,243,137	106,111,574	(127,131,563)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108,863,051	115,910,741	7,047,690
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,966,025	53,611,651	3,645,626
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,665,000	7,665,000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479,480,000	564,234,000	84,754,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,057,452,640	1,266,599,168	209,146,528
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,290,000	8,690,000	4,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600,000	2,000,000	1,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,052,562,640	1,255,909,168	203,346,528
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457,283,250	454,141,000	(3,142,250)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243,865,000	356,891,000	113,026,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,770,000	12,770,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,648,250	84,480,000	(116,168,250)
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,602,675,860	3,397,836,066	795,160,206
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,602,675,860	3,397,836,066	795,160,206
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	25,871,002	34,871,002	9,000,000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	221,089,525	221,089,525	-
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	288,214,633	174,096,631	(114,118,002)
Pelayanan Informasi Publik	134,188,128	239,299,431	105,111,303
Layanan Hubungan Media	1,674,320,000	2,307,520,000	633,200,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	22,760,000	22,760,000	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	236,232,572	236,232,541	(31)
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	161,966,936	161,966,936
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	8,119,622,314	8,482,291,406	362,669,092
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,119,622,314	8,482,291,406	362,669,092
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	159,951,700	159,340,836	(610,864)
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	6,623,450,353	7,037,437,452	413,987,099
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	639,944,363	639,809,555	(134,808)
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	49,338,300	-	(49,338,300)
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	49,910,800	-	(49,910,800)
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	407,648,400	406,998,400	(650,000)
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	189,378,398	238,705,163	49,326,765
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20,807,506,531	30,443,507,601	9,636,001,070
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	20,807,506,531	30,443,507,601	9,636,001,070
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,976,414,524	25,529,673,739	6,553,259,215
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500,000	500,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500,000	500,000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,836,077,568	12,363,943,163	2,527,865,595
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,834,577,568	12,362,443,163	2,527,865,595
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000	500,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500,000	500,000	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500,000	500,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	669,800,000	1,301,616,545	631,816,545
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	249,890,000	496,140,545	246,250,545
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	419,910,000	805,476,000	385,566,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,174,608,956	1,871,427,071	696,818,115
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,431,810	4,431,810	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	742,733,253	1,106,037,210	363,303,957
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,374,617	19,374,617	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,889,276	19,889,276	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,190,000	129,922,158	110,732,158
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Pasar)	140,000,000	140,000,000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,440,000	19,440,000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,550,000	432,332,000	222,782,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	779,000,000	779,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	779,000,000	779,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,973,164,000	8,474,182,960	1,501,018,960
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	10,000,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,800,000	52,800,000	-



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pasar)	1,758,000,000	2,248,200,000	490,200,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,152,364,000	6,163,182,960	1,010,818,960
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322,264,000	739,004,000	416,740,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266,394,000	659,684,000	393,290,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,180,000	47,630,000	23,450,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,690,000	31,690,000	-
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21,092,208	21,092,208	-
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21,092,208	21,092,208	-
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	21,092,208	21,092,208	-
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10,000,000	10,000,000	-
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	-
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	-
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		404,200,000	404,200,000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		404,200,000	404,200,000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		404,200,000	404,200,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	500,000,040	500,000,040	-
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	500,000,040	500,000,040	-
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	500,000,040	500,000,040	-
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,299,999,759	3,978,541,614	2,678,541,855
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1,299,999,759	3,978,541,614	2,678,541,855
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1,299,999,759	3,978,541,614	2,678,541,855
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9,655,415,329	12,349,984,256	2,694,568,927
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,655,415,329	12,349,984,256	2,694,568,927
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,875,796,819	10,093,607,917	1,217,811,098
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,308,041,324	6,561,528,832	253,487,508
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,308,041,324	6,561,528,832	253,487,508
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,500,000	222,840,000	198,340,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,500,000	222,840,000	198,340,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	508,752,627	1,029,464,845	520,712,218
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298,514,733	659,231,401	360,716,668
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,836,146	72,381,455	33,545,309
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,921,748	71,171,989	250,241
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,480,000	226,680,000	126,200,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,737,934,868	1,968,492,540	230,557,672
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	10,000,000	3,000,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474,000,000	369,000,000	(105,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,256,934,868	1,589,492,540	332,557,672
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,568,000	311,281,700	14,713,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229,068,000	229,061,700	(6,300)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,500,000	82,220,000	14,720,000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	140,347,400	309,521,607	169,174,207
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	91,123,400	210,312,607	119,189,207
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	91,123,400	210,312,607	119,189,207
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	49,224,000	99,209,000	49,985,000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	49,224,000	99,209,000	49,985,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	237,930,045	605,144,500	367,214,455
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	237,930,045	605,144,500	367,214,455
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	237,930,045	605,144,500	367,214,455
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	203,718,020	197,715,000	(6,003,020)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	203,718,020	197,715,000	(6,003,020)
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	28,115,000	161,480,000	133,365,000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	43,000,300	36,235,000	(6,765,300)
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	132,602,720	-	(132,602,720)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	98,505,745	506,117,932	407,612,187
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	98,505,745	506,117,932	407,612,187
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	35,005,487	35,005,487	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	63,500,258	385,844,753	322,344,495
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		85,267,692	85,267,692
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99,117,300	637,877,300	538,760,000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,117,300	637,877,300	538,760,000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	99,117,300	637,877,300	538,760,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23,591,208,392	35,606,748,504	12,015,540,112
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	23,591,208,392	35,606,748,504	12,015,540,112
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,479,178,781	14,551,103,648	2,071,924,867
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,248,000	93,404,000	44,156,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,248,000	93,404,000	44,156,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,747,221,498	6,273,026,355	525,804,857
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,741,721,498	6,267,526,355	525,804,857
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	3,000,000	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,500,000	2,500,000	-



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,069,983,091	1,518,546,546	448,563,455
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	313,750,000	313,750,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,069,983,091	1,204,796,546	134,813,455
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,075,482,329	1,256,434,984	180,952,655
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	587,653,475	742,341,928	154,688,453
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,064,470	65,834,470	(5,230,000)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,498,384	58,636,586	(11,861,798)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346,266,000	389,622,000	43,356,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,316,406,027	3,318,379,827	1,973,800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	15,000,000	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	637,200,000	786,170,000	148,970,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,669,206,027	2,517,209,827	(151,996,200)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,220,837,836	2,091,311,936	870,474,100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	293,227,600	370,408,800	77,181,200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138,395,000	206,150,000	67,755,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	789,215,236	1,514,753,136	725,537,900
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,969,265,319	5,358,924,906	3,389,659,587
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,760,208,819	3,672,617,178	1,912,408,359
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	53,805,909	-	(53,805,909)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	-	707,229,050	707,229,050
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	-	582,677,168	582,677,168
Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	149,722,500	-	(149,722,500)
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1,556,680,410	2,382,710,960	826,030,550
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209,056,500	1,686,307,728	1,477,251,228
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	209,056,500	1,686,307,728	1,477,251,228
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8,842,750,286	15,208,323,706	6,365,573,420
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	751,500,858	827,901,126	76,400,268
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	751,500,858	827,901,126	76,400,268
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,576,397,304	5,703,342,221	4,126,944,917
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1,192,677,504	2,520,812,921	1,328,135,417
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	383,719,800	3,182,529,300	2,798,809,500
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	194,472,500	247,907,500	53,435,000
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	35,600,000	15,440,000	(20,160,000)
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	158,872,500	232,467,500	73,595,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5,586,327,416	7,224,999,059	1,638,671,643
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5,586,327,416	7,224,999,059	1,638,671,643
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	734,052,208	1,204,173,800	470,121,592



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	734,052,208	1,204,173,800	470,121,592
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300,014,006	488,396,244	188,382,238
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300,014,006	488,396,244	188,382,238
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300,014,006	488,396,244	188,382,238
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	198,537,565	248,343,200	49,805,635
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	198,537,565	248,343,200	49,805,635
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	198,537,565	248,343,200	49,805,635
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	198,537,565	248,343,200	49,805,635
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	154,017,565	203,823,200	49,805,635
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	44,520,000	44,520,000	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	194,244,500	994,182,136	799,937,636
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	194,244,500	994,182,136	799,937,636
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	194,244,500	994,182,136	799,937,636
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194,244,500	994,182,136	799,937,636
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132,022,000	131,968,636	(53,364)
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62,222,500	862,213,500	799,991,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9,277,296,724	9,703,122,988	425,826,264
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9,277,296,724	9,703,122,988	425,826,264
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8,097,901,628	8,394,327,892	296,426,264
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	185,000,000	753,708,481	568,708,481
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	185,000,000	753,708,481	568,708,481
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	871,853,000	1,331,100,455	459,247,455
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	871,853,000	1,331,100,455	459,247,455
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,041,048,628	6,309,518,956	(731,529,672)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	7,041,048,628	6,309,518,956	(731,529,672)
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1,179,395,096	1,308,795,096	129,400,000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,179,395,096	1,308,795,096	129,400,000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1,179,395,096	1,308,795,096	129,400,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9,533,812,519	11,121,888,101	1,588,075,582
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9,533,812,519	11,121,888,101	1,588,075,582
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,455,117,695	9,743,193,277	1,288,075,582
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,230,538,322	6,001,531,817	770,993,495
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,230,538,322	6,001,531,817	770,993,495
Administrasi Umum Perangkat Daerah	510,699,191	814,847,528	304,148,337
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,939,483	12,932,130	(7,353)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145,078,937	391,548,660	246,469,723
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,700,836	10,700,836	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,600,871	35,600,824	(27,000,047)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42,666,068	40,696,578	(1,969,490)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236,712,996	323,368,500	86,655,504



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,919,415,600	2,002,065,600	82,650,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,890,000	3,890,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266,300,000	348,950,000	82,650,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,649,225,600	1,649,225,600	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794,464,582	924,748,332	130,283,750
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375,472,000	259,065,750	(116,406,250)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,100,000	48,100,000	(5,000,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,892,582	452,582,582	251,690,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165,000,000	165,000,000	-
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,078,694,824	1,378,694,824	300,000,000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	781,377,551	1,043,270,524	261,892,973
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	235,038,240	222,138,241	(12,899,999)
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	309,274,769	272,556,282	(36,718,487)
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	123,508,543	141,310,000	17,801,457
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,586,000	330,586,000	300,000,000
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	22,959,999	49,360,000	26,400,001
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	60,010,000	27,320,001	(32,689,999)
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	297,317,273	335,424,300	38,107,027
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9,848,800	9,848,800	-
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	287,468,473	325,575,500	38,107,027
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	460,243,438	910,243,438	450,000,000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	460,243,438	910,243,438	450,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	450,251,427	900,251,427	450,000,000
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86,839,500	286,839,500	200,000,000
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	24,980,000	24,980,000	-
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	61,859,500	261,859,500	200,000,000
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	10,944,400	10,944,400	-
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	10,944,400	10,944,400	-
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	352,467,527	602,467,527	250,000,000
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	65,031,099	305,030,999	239,999,900
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	287,436,428	297,436,528	10,000,100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9,992,011	9,992,011	-
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	9,992,011	9,992,011	-
penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	9,992,011	9,992,011	-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22,453,978,000	24,922,769,112	2,468,791,112
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,606,347,690	8,284,570,404	(321,777,286)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	8,606,347,690	8,284,570,404	(321,777,286)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4,706,300,862	3,508,027,339	(1,198,273,523)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,060,000	-	(50,060,000)
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	50,060,000	-	(50,060,000)
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,311,675,512	2,890,743,989	(1,420,931,523)
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	4,311,675,512	2,890,743,989	(1,420,931,523)
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	344,565,350	617,283,350	272,718,000
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT Tempat Pelelangan Ikan)	344,565,350	617,283,350	272,718,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,506,251,825	3,487,676,177	981,424,352
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2,075,851,637	2,960,145,189	884,293,552
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	2,002,552,094	2,899,072,919	896,520,825
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	73,299,543	61,072,270	(12,227,273)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	430,400,188	527,530,988	97,130,800
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000	497,130,800	97,130,800
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30,400,188	30,400,188	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,393,795,003	1,288,866,888	(104,928,115)
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	294,380,000	549,922,681	255,542,681
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	294,380,000	549,922,681	255,542,681
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,099,415,003	738,944,207	(360,470,796)
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,099,415,003	738,944,207	(360,470,796)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3,823,209,860	3,737,401,624	(85,808,236)
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	3,823,209,860	3,737,401,624	(85,808,236)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,335,468,694	1,245,928,815	(89,539,879)
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,163,668,694	1,154,511,565	(9,157,129)
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	89,232,000	89,232,000	-
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	961,104,194	952,530,115	(8,574,079)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	113,332,500	112,749,450	(583,050)
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	171,800,000	91,417,250	(80,382,750)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	121,385,000	-	(121,385,000)
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,415,000	91,417,250	41,002,250
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	837,688,666	584,418,863	(253,269,803)
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	837,688,666	584,418,863	(253,269,803)
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	837,688,666	584,418,863	(253,269,803)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	8,510,000	8,510,000
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	8,510,000	8,510,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	8,510,000	8,510,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,650,052,500	1,898,543,946	248,491,446
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,650,052,500	1,898,543,946	248,491,446
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1,600,030,000	1,848,964,496	248,934,496
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50,022,500	49,579,450	(443,050)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3,692,739,169	5,689,786,580	1,997,047,411
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	3,692,739,169	5,689,786,580	1,997,047,411
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,176,305,298	2,000,329,460	824,024,162
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	378,578,126	967,468,126	588,890,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	378,578,126	967,468,126	588,890,000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	131,807,571	117,803,391	(14,004,180)
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	131,807,571	117,803,391	(14,004,180)
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	665,919,601	915,057,943	249,138,342
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	665,919,601	915,057,943	249,138,342
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,247,221,186	1,457,216,054	209,994,868
Pembangunan Prasarana Pertanian	1,247,221,186	1,457,216,054	209,994,868
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (UPT Rumah Potong Hewan)	292,221,181	802,215,443	509,994,262
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	955,000,005	655,000,611	(299,999,394)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	566,510,391	912,937,792	346,427,401
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	254,993,660	509,132,510	254,138,850
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	254,993,660	509,132,510	254,138,850
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	261,516,731	278,806,731	17,290,000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	261,516,731	278,806,731	17,290,000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	124,998,551	74,998,551
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	50,000,000	124,998,551	74,998,551
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	99,678,894	99,678,894	-
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	99,678,894	99,678,894	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	99,678,894	99,678,894	-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	603,023,400	1,219,624,380	616,600,980
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	603,023,400	1,219,624,380	616,600,980
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	564,978,407	681,579,387	116,600,980
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	38,044,993	538,044,993	500,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6,388,781,281	7,211,010,504	822,229,223
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	6,388,781,281	7,211,010,504	822,229,223
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	214,860,000	361,635,000	146,775,000
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	214,860,000	361,635,000	146,775,000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	214,860,000	361,635,000	146,775,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6,016,357,281	6,391,810,124	375,452,843
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,604,362,381	4,630,944,850	(973,417,531)
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,499,999,781	-	(2,499,999,781)
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)	350,000,000	1,572,872,250	1,222,872,250
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)	2,754,362,600	3,058,072,600	303,710,000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	411,994,900	1,760,865,274	1,348,870,374
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	90,000,000	-	(90,000,000)
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)	321,994,900	1,760,865,274	1,438,870,374
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	157,564,000	457,565,380	300,001,380
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	157,564,000	457,565,380	300,001,380
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	157,564,000	457,565,380	300,001,380
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	168,342,667,503	199,859,384,215	31,516,716,712
SEKRETARIAT DAERAH	99,388,307,582	126,535,419,214	27,147,111,632
SEKRETARIAT DAERAH	99,388,307,582	126,535,419,214	27,147,111,632
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63,400,381,438	82,709,010,134	19,308,628,696
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409,060,000	416,596,046	7,536,046
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	409,060,000	416,596,046	7,536,046
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,383,674,816	23,654,525,513	3,270,850,697
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,383,674,816	23,654,525,513	3,270,850,697
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330,740,000	410,606,554	79,866,554
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150,000,000	250,406,554	100,406,554
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180,740,000	160,200,000	(20,540,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,192,151,313	10,412,239,358	4,220,088,045
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69,587,180	169,456,000	99,868,820
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	931,426,071	4,734,353,340	3,802,927,269
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145,479,514	145,479,514	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122,836,048	122,516,848	(319,200)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	440,375,000	470,113,656	29,738,656
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,482,447,500	4,770,320,000	287,872,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	507,830,273	7,386,364,339	6,878,534,066
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	3,505,610,000	3,505,610,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1,898,610,000	1,898,610,000
Pengadaan Mebel	507,830,273	1,982,144,339	1,474,314,066
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,883,310,208	26,485,944,147	1,602,633,939
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,295,000	2,295,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,718,200,000	5,769,670,819	1,051,470,819
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,162,815,208	20,713,978,328	551,163,120
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,268,805,189	4,623,843,900	1,355,038,711
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	597,067,999	787,573,200	190,505,201



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,212,687,190	1,815,619,700	602,932,510
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	917,720,000	1,077,230,000	159,510,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	541,330,000	943,421,000	402,091,000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	931,709,094	993,975,594	62,266,500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	773,709,094	774,469,094	760,000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	158,000,000	158,000,000	-
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	61,506,500	61,506,500
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2,385,081,885	3,223,110,950	838,029,065
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,406,965,086	2,132,188,608	725,223,522
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	978,116,799	1,090,922,342	112,805,543
Penataan Organisasi	516,405,650	511,506,150	(4,899,500)
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	120,139,500	116,160,000	(3,979,500)
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	260,008,000	259,088,000	(920,000)
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	136,258,150	136,258,150	-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3,591,613,010	4,590,297,583	998,684,573
Fasilitasi Keprotokolan	2,325,218,513	3,123,903,086	798,684,573
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	431,974,497	431,974,497	-
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	834,420,000	1,034,420,000	200,000,000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34,806,683,385	42,439,947,640	7,633,264,255
Administrasi Tata Pemerintahan	762,762,608	1,562,478,868	799,716,260
Penataan Administrasi Pemerintahan	156,457,000	155,607,000	(850,000)
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	444,166,415	1,244,732,675	800,566,260
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	162,139,193	162,139,193	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	31,456,775,371	38,140,608,500	6,683,833,129
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25,203,872,427	29,932,723,694	4,728,851,267
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	526,402,933	625,858,931	99,455,998
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5,726,500,011	7,582,025,875	1,855,525,864
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,169,630,000	1,350,289,722	180,659,722
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	203,780,000	259,882,000	56,102,000
Fasilitasi Bantuan Hukum	945,000,000	888,883,188	(56,116,812)
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20,850,000	201,524,534	180,674,534
Fasilitasi Kerjasama Daerah	1,417,515,406	1,386,570,550	(30,944,856)
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1,267,515,406	1,236,570,550	(30,944,856)
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	150,000,000	150,000,000	-
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,181,242,759	1,386,461,440	205,218,681
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	417,351,200	417,209,381	(141,819)
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	134,392,564	134,316,200	(76,364)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	282,958,636	282,893,181	(65,455)
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	224,511,496	224,471,496	(40,000)
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	79,625,497	79,610,497	(15,000)
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	62,651,999	62,626,999	(25,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	82,234,000	82,234,000	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	333,382,018	538,782,018	205,400,000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	218,614,587	418,614,587	200,000,000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	89,032,313	89,032,313	-
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25,735,118	31,135,118	5,400,000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	205,998,045	205,998,545	500
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	38,137,500	21,335,000	(16,802,500)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60,760,545	157,260,045	96,499,500
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	107,100,000	27,403,500	(79,696,500)
SEKRETARIAT DPRD	68,954,359,921	73,323,965,001	4,369,605,080
SEKRETARIAT DPRD	68,954,359,921	73,323,965,001	4,369,605,080
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,748,160,421	50,459,722,501	3,711,562,080
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499,557,151	320,472,150	(179,085,001)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	316,534,651	225,814,650	(90,720,001)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,272,500	2,217,500	(55,000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180,750,000	92,440,000	(88,310,000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,156,057,971	6,056,850,186	900,792,215
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,149,390,471	6,050,360,436	900,969,965
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,272,500	1,777,500	(495,000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,272,500	2,589,750	317,250
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,122,500	2,122,500	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,449,610,000	1,953,520,405	503,910,405
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	226,410,000	618,300,405	391,890,405
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,198,300,000	1,159,010,000	(39,290,000)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24,900,000	176,210,000	151,310,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,672,226,760	8,183,346,120	1,511,119,360
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156,782,402	136,581,565	(20,200,837)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,375,370,290	1,614,365,643	238,995,353
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	115,435,413	474,475,003	359,039,590
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	432,077,955	353,600,909	(78,477,046)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	628,423,200	743,042,000	114,618,800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	177,947,000	129,292,000	(48,655,000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,786,190,500	4,731,989,000	945,798,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606,253,041	685,407,299	79,154,258
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,272,727	27,272,727	-
Pengadaan Mebel	537,640,314	618,204,572	80,564,258
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,340,000	39,930,000	(1,410,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,726,086,200	8,560,588,240	(165,497,960)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,000,000	24,500,000	6,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,393,910,000	1,403,910,000	10,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297,691,000	123,613,300	(174,077,700)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,016,485,200	7,008,564,940	(7,920,260)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,425,993,500	2,996,695,526	570,702,026
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,000,000	175,276,000	61,276,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606,436,000	720,562,000	114,126,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	620,000,000	760,290,000	140,290,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	885,557,500	508,157,500	(377,400,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	832,410,026	632,410,026
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19,001,521,604	19,000,787,926	(733,678)
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18,621,061,604	18,622,687,926	1,626,322
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	304,450,000	302,090,000	(2,360,000)
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	76,010,000	76,010,000	-
Layanan Administrasi DPRD	2,210,854,194	2,702,054,649	491,200,455
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	91,822,500	92,832,500	1,010,000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1,082,270,000	1,158,100,000	75,830,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,036,761,694	1,451,122,149	414,360,455
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22,206,199,500	22,864,242,500	658,043,000
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,488,320,000	1,509,087,500	20,767,500
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	94,875,000	96,565,000	1,690,000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	133,510,000	256,087,500	122,577,500
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	18,975,000	18,975,000	-
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1,228,310,000	1,124,810,000	(103,500,000)
Penyusunan Tata Tertib DPRD	12,650,000	12,650,000	-
Pembahasan Kebijakan Anggaran	578,737,500	604,207,500	25,470,000
Pembahasan KUA dan PPAS	91,437,500	93,127,500	1,690,000
Pembahasan APBD	154,687,500	166,577,500	11,890,000
Pembahasan APBD Perubahan	154,687,500	166,577,500	11,890,000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	177,925,000	177,925,000	-
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	223,514,500	245,675,000	22,160,500
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	23,375,000	23,487,500	112,500
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	78,540,000	100,588,000	22,048,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	33,566,500	33,566,500	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	33,566,500	33,566,500	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	33,566,500	33,566,500	-
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6,325,000	6,325,000	-
Pengawasan Penggunaan Anggaran	14,575,000	14,575,000	-
Peningkatan Kapasitas DPRD	5,763,590,000	4,978,840,000	(784,750,000)
Pendalaman Tugas DPRD	526,610,000	651,610,000	125,000,000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4,355,350,000	3,287,240,000	(1,068,110,000)
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	524,860,000	617,540,000	92,680,000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	356,770,000	422,450,000	65,680,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,408,287,500	1,988,473,250	580,185,750
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9,487,500	9,573,750	86,250
Pelaksanaan Reses	1,398,800,000	1,978,899,500	580,099,500
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2,530,000	2,553,000	23,000
Pengawasan Kode Etik DPRD	2,530,000	2,553,000	23,000
Pembahasan Kerja Sama Daerah	25,300,000	25,386,250	86,250
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	9,487,500	9,573,750	86,250
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	15,812,500	15,812,500	-
Fasilitasi Tugas DPRD	12,715,920,000	13,510,020,000	794,100,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12,715,920,000	13,510,020,000	794,100,000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	80,105,268,273	109,254,890,314	29,149,622,041
PERENCANAAN	12,149,493,947	14,575,818,044	2,426,324,097
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12,149,493,947	14,575,818,044	2,426,324,097
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,022,328,945	12,315,728,292	2,293,399,347
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,768,596,956	7,317,078,738	548,481,782
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,768,596,956	7,317,078,738	548,481,782
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	309,022,005	504,330,615	195,308,610
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179,522,005	258,379,715	78,857,710
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129,500,000	245,950,900	116,450,900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,869,500,142	2,891,330,369	1,021,830,227
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,987,890	4,987,890	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432,851,073	852,717,578	419,866,505
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64,473,650	64,473,650	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,049,029	82,608,251	(2,440,778)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,993,000	14,993,000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,267,145,500	1,871,550,000	604,404,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	516,342,728	516,342,728
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	516,342,728	516,342,728
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667,262,992	657,912,992	(9,350,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000	9,000,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	658,262,992	648,912,992	(9,350,000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407,946,850	428,732,850	20,786,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	372,966,850	415,412,850	42,446,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,980,000	13,320,000	(21,660,000)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,491,126,152	1,317,766,202	(173,359,950)
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,144,497,602	692,334,902	(452,162,700)
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	15,675,000	15,675,000	-
Pelaksanaan Konsultasi Publik	36,637,800	26,737,800	(9,900,000)
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	17,500,000	339,900	(17,160,100)
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	121,124,802	73,124,802	(48,000,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	8,000,000	4,647,500	(3,352,500)
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	945,560,000	571,809,900	(373,750,100)
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	141,499,800	220,602,700	79,102,900
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50,000,000	50,000,000	-
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	21,000,000	99,702,900	78,702,900
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	70,499,800	70,899,800	400,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	205,128,750	404,828,600	199,699,850
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	74,510,600	59,510,600	(15,000,000)
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	46,345,150	-	(46,345,150)
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84,273,000	345,318,000	261,045,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	636,038,850	942,323,550	306,284,700
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	134,998,850	475,993,850	340,995,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19,999,900	19,999,900	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19,999,800	19,999,800	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19,999,750	19,999,750	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	14,999,800	348,649,800	333,650,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14,999,900	14,999,900	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14,999,900	14,999,900	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14,999,900	14,999,900	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14,999,900	22,344,900	7,345,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80,941,150	77,528,650	(3,412,500)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,999,950	11,999,950	-
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12,000,000	12,000,000	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11,999,750	11,999,750	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	12,000,000	12,000,000	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,077,450	5,009,700	(6,067,750)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7,288,000	1,941,750	(5,346,250)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7,288,000	7,288,000	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7,288,000	15,289,500	8,001,500
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	420,098,850	388,801,050	(31,297,800)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16,099,750	13,196,250	(2,903,500)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10,000,000	2,504,550	(7,495,450)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12,999,750	12,790,650	(209,100)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	24,999,800	75,748,550	50,748,750
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,999,750	7,742,250	(4,257,500)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12,000,000	3,810,000	(8,190,000)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12,000,000	12,000,000	-
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	319,999,800	261,008,800	(58,991,000)
KEUANGAN	50,840,413,941	75,839,383,633	24,998,969,692
BADAN PENDAPATAN DAERAH	16,503,600,500	22,643,933,511	6,140,333,011
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,962,657,759	17,576,540,314	3,613,882,555
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,145,000	18,145,000	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,135,000	4,135,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,875,000	2,875,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,875,000	2,875,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,260,000	8,260,000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,473,131,611	12,318,794,284	1,845,662,673
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,413,265,006	12,228,700,864	1,815,435,858
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56,421,605	86,648,420	30,226,815
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,445,000	3,445,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,300,000	132,300,000	100,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32,300,000	132,300,000	100,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	559,428,508	2,065,651,018	1,506,222,510
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	11,525,749	(3,474,251)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,821,005	1,164,773,249	1,066,952,244
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,453,500	121,029,330	86,575,830
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,179,003	24,368,140	2,189,137
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000	-	(8,400,000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381,575,000	743,954,550	362,379,550
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,410,000	200,870,572	140,460,572
Pengadaan Mebel	60,410,000	200,870,572	140,460,572
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,487,432,000	2,392,882,000	(94,550,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313,210,000	301,210,000	(12,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,168,222,000	2,085,672,000	(82,550,000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331,810,640	447,897,440	116,086,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269,860,640	397,897,440	128,036,800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	50,000,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,950,000	-	(11,950,000)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,540,942,741	5,067,393,197	2,526,450,456



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2,540,942,741	5,067,393,197	2,526,450,456
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	379,094,171	2,105,216,650	1,726,122,479
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	161,890,000	250,860,000	88,970,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	540,587,792	538,659,395	(1,928,397)
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	199,210,000	441,115,464	241,905,464
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	740,380,688	740,140,688	(240,000)
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	167,732,000	372,012,000	204,280,000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	278,180,000	489,430,000	211,250,000
Penagihan Pajak Daerah	25,683,090	21,774,000	(3,909,090)
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	48,185,000	108,185,000	60,000,000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34,336,813,441	53,195,450,122	18,858,636,681
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,530,448,499	14,873,412,007	2,342,963,508
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,130,000	16,130,000	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,510,000	6,510,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,960,000	3,960,000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,660,000	5,660,000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,816,421,776	8,221,546,944	405,125,168
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,753,669,776	8,015,455,194	261,785,418
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56,190,000	199,529,750	143,339,750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,202,000	4,202,000	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,360,000	2,360,000	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,000,000	204,020,000	200,020,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,000,000	204,020,000	200,020,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172,850,000	366,864,000	194,014,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	172,850,000	366,864,000	194,014,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,424,378,775	2,452,614,272	1,028,235,497
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68,584,154	68,584,154	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260,204,034	721,910,266	461,706,232
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214,213,973	231,487,612	17,273,639
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149,974,214	186,568,407	36,594,193
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,052,400	39,818,000	765,600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692,350,000	1,204,245,833	511,895,833
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,420,002	60,530,625	6,110,623
Pengadaan Mebel	54,420,002	60,530,625	6,110,623
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,429,926,096	2,654,196,616	224,270,520
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	10,000,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445,800,000	361,200,000	(84,600,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,974,126,096	2,282,996,616	308,870,520
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612,321,850	897,509,550	285,187,700



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	379,524,500	477,747,700	98,223,200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95,372,000	147,421,100	52,049,100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137,425,350	272,340,750	134,915,400
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	19,564,716,491	35,678,200,276	16,113,483,785
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,169,406,261	3,623,726,273	1,454,320,012
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	268,800,000	268,800,000	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	270,500,000	270,500,000	-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	91,779,590	91,779,591	1
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	855,314,000	1,143,750,400	288,436,400
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	479,868,161	989,870,480	510,002,319
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	130,240,510	130,700,502	459,992
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	32,248,000	77,498,000	45,250,000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	40,656,000	650,827,300	610,171,300
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	480,196,010	513,438,010	33,242,000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	39,288,000	78,538,000	39,250,000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	42,942,010	42,942,010	-
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24,976,000	82,968,000	57,992,000
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	177,550,000	25,550,000	(152,000,000)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	195,440,000	283,440,000	88,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,201,963,220	4,006,032,834	2,804,069,614
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	160,143,300	273,843,300	113,700,000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	61,195,280	122,766,000	61,570,720
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	97,101,640	181,351,640	84,250,000
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	160,880,000	160,880,000	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	2,641,500,000	2,641,500,000
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	55,183,000	87,253,894	32,070,894
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	8,710,000	79,200,000	70,490,000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	658,750,000	459,238,000	(199,512,000)
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15,713,151,000	27,535,003,159	11,821,852,159
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	315,000,000	315,000,000
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15,713,151,000	27,220,003,159	11,506,852,159
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,241,648,451	2,643,837,839	402,189,388
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,241,648,451	2,643,837,839	402,189,388
Penyusunan Standar Harga	612,580,376	767,116,834	154,536,458



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	113,777,509	92,832,627	(20,944,882)
Penatausahaan Barang Milik Daerah	192,078,000	206,078,000	14,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah	322,058,250	322,058,250	-
Penilaian Barang Milik Daerah	187,981,250	257,981,250	70,000,000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	43,060,591	43,060,591	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	296,223,500	370,254,382	74,030,882
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46,558,975	70,494,975	23,936,000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38,730,000	221,746,930	183,016,930
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	388,600,000	292,214,000	(96,386,000)
KEPEGAWAIAN	11,568,140,485	13,449,710,487	1,881,570,002
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11,568,140,485	13,449,710,487	1,881,570,002
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,181,905,985	11,415,523,790	2,233,617,805
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,000,000	3,800,000	(7,200,000)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,000,000	3,800,000	(7,200,000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,328,419,386	8,224,348,534	895,929,148
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,328,419,386	8,224,348,534	895,929,148
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	460,242,500	702,117,050	241,874,550
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,190,000	199,434,550	100,244,550
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	324,000,000	382,700,000	58,700,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37,052,500	119,982,500	82,930,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	602,127,415	973,591,759	371,464,344
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,089,302	92,732,468	18,643,166
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,428,804	49,150,990	15,722,186
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140,470,809	199,433,801	58,962,992
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354,138,500	632,274,500	278,136,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198,963,696	758,444,203	559,480,507
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197,842,498	756,855,125	559,012,627
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,121,198	1,589,078	467,880
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265,885,088	321,560,642	55,675,554
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,250,000	11,252,286	3,002,286
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,500,000	69,000,000	(3,500,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,135,088	241,308,356	56,173,268
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,267,900	431,661,602	116,393,702
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169,579,600	284,259,900	114,680,300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142,690,800	144,761,702	2,070,902
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,997,500	2,640,000	(357,500)
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,386,234,500	2,034,186,697	(352,047,803)
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	443,240,000	461,009,197	17,769,197
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	18,025,000	1,050,000	(16,975,000)
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	272,250,000	274,329,197	2,079,197



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	54,450,000	67,660,000	13,210,000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	21,025,000	55,560,000	34,535,000
Pengelolaan Data Kepegawaian	77,490,000	62,410,000	(15,080,000)
Mutasi dan Promosi ASN	789,129,500	683,525,000	(105,604,500)
Pengelolaan Mutasi ASN	10,400,000	10,400,000	-
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	198,404,500	230,755,000	32,350,500
Pengelolaan Promosi ASN	580,325,000	442,370,000	(137,955,000)
Pengembangan Kompetensi ASN	909,150,000	439,690,000	(469,460,000)
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	817,200,000	339,860,000	(477,340,000)
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	91,950,000	99,830,000	7,880,000
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	244,715,000	449,962,500	205,247,500
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	38,410,000	80,160,000	41,750,000
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	177,867,500	269,390,000	91,522,500
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	6,000,000	45,250,000	39,250,000
Pembinaan Disiplin ASN	10,375,000	8,100,000	(2,275,000)
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12,062,500	47,062,500	35,000,000
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4,177,857,000	4,098,466,050	(79,390,950)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,177,857,000	4,098,466,050	(79,390,950)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,177,857,000	4,098,466,050	(79,390,950)
Pengembangan Kompetensi Teknis	1,226,531,000	1,954,580,050	728,049,050
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1,226,531,000	1,954,580,050	728,049,050
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2,951,326,000	2,143,886,000	(807,440,000)
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2,951,326,000	2,143,886,000	(807,440,000)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,369,362,900	1,291,512,100	(77,850,800)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,369,362,900	1,291,512,100	(77,850,800)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,369,362,900	1,291,512,100	(77,850,800)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1,054,073,450	869,613,500	(184,459,950)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	200,000,000	200,000,000	-
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	200,000,000	201,836,500	1,836,500
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	6,499,800	51,679,000	45,179,200
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	647,573,650	416,098,000	(231,475,650)
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	315,289,450	421,898,600	106,609,150
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	49,999,900	72,904,000	22,904,100
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	254,289,750	337,994,800	83,705,050
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	10,999,800	10,999,800	-
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10,688,829,865	12,924,826,992	2,235,997,127



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	10,688,829,865	12,924,826,992	2,235,997,127
INSPEKTORAT DAERAH	10,688,829,865	12,924,826,992	2,235,997,127
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,287,112,848	11,316,844,242	2,029,731,394
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,626,490,813	9,587,215,213	1,960,724,400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,626,490,813	9,587,215,213	1,960,724,400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	504,230,000	327,506,000	(176,724,000)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	504,230,000	327,506,000	(176,724,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	623,870,843	869,601,837	245,730,994
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,172,135	2,172,135	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181,156,161	181,156,161	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,580,079	14,830,079	(2,750,000)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,904,092	144,535,086	55,630,994
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,382,376	47,382,376	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000	2,100,000	(6,300,000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278,276,000	477,426,000	199,150,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55,680,000	55,680,000	-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	55,680,000	55,680,000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171,475,192	171,475,192	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	4,500,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,500,000	31,500,000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,525,000	15,525,000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,950,192	119,950,192	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305,366,000	305,366,000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305,366,000	305,366,000	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	823,513,517	1,086,779,250	263,265,733
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	724,573,517	987,839,250	263,265,733
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	298,350,000	298,350,000	-
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	312,663,517	575,929,250	263,265,733
Reviu Laporan Kinerja	39,950,000	39,950,000	-
Reviu Laporan Keuangan	32,810,000	32,810,000	-
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	40,800,000	40,800,000	-
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	98,940,000	98,940,000	-
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	98,940,000	98,940,000	-
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	578,203,500	521,203,500	(57,000,000)
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	50,843,500	50,843,500	-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	14,943,500	14,943,500	-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	35,900,000	35,900,000	-
Pendampingan dan Asistensi	527,360,000	470,360,000	(57,000,000)
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	235,290,000	264,590,000	29,300,000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	114,530,000	83,230,000	(31,300,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	177,540,000	122,540,000	(55,000,000)
UNSUR KEWILAYAHAN	112,685,093,723	130,693,333,618	18,008,239,895
KECAMATAN	112,685,093,723	130,693,333,618	18,008,239,895
KECAMATAN BONTANG UTARA	42,654,161,762	52,501,498,938	9,847,337,176
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,973,946,494	25,462,397,704	2,488,451,210
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,369,721,150	18,957,533,474	1,587,812,324
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,369,721,150	18,957,533,474	1,587,812,324
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	511,900,872	158,265,996	(353,634,876)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	462,500,872	65,689,996	(396,810,876)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49,400,000	92,576,000	43,176,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	706,915,844	1,162,034,124	455,118,280
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	5,000,000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342,268,199	388,239,399	45,971,200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,000,000	28,493,642	1,493,642
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61,710,645	135,118,634	73,407,989
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,764,000	5,764,000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,173,000	599,418,449	334,245,449
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	359,100,000	179,065,332	(180,034,668)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	69,025,332	(130,974,668)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159,100,000	110,040,000	(49,060,000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,829,543,628	4,726,405,567	896,861,939
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368,210,000	203,360,000	(164,850,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,461,333,628	4,523,045,567	1,061,711,939
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,765,000	279,093,211	82,328,211
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,325,000	99,678,543	1,353,543
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,950,000	7,950,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,490,000	171,464,668	80,974,668
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,953,647,313	6,585,105,886	2,631,458,573
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	489,449,316	482,714,770	(6,734,546)
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	440,000,000	433,265,454	(6,734,546)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49,449,316	49,449,316	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,459,197,997	6,095,491,116	2,636,293,119
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	42,350,000	42,350,000	-
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	74,200,000	74,200,000	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111,529,600	111,529,600	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Guntung)	666,207,758	904,149,425	237,941,667
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Loktuan)	447,089,240	1,558,349,280	1,111,260,040



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Elai)	479,493,708	720,184,385	240,690,677
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Baru)	786,610,105	942,547,772	155,937,667
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Api-Api)	528,104,730	800,086,131	271,981,401
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Kuala)	323,612,856	942,094,523	618,481,667
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5,000,000	6,900,000	1,900,000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5,000,000	6,900,000	1,900,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,825,857,802	18,287,715,421	3,461,857,619
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4,045,562,250	7,547,595,369	3,502,033,119
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Guntung)	13,425,000	13,425,000	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Loktuan)	14,336,000	13,776,000	(560,000)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	14,455,500	14,455,500	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	13,870,000	13,870,000	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Api-Api)	16,912,000	16,912,000	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	11,642,000	11,642,000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Guntung)	252,406,000	280,611,000	28,205,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	562,745,822	1,251,005,742	688,259,920
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	310,565,239	833,348,804	522,783,565
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	336,888,317	877,888,317	541,000,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	579,999,042	1,059,359,918	479,360,876
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Guntung)	136,536,600	156,536,600	20,000,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Loktuan)	510,710,303	488,369,078	(22,341,225)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	341,034,000	884,320,068	543,286,068
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	375,172,300	499,851,415	124,679,115
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	375,944,127	723,403,927	347,459,800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	178,920,000	408,820,000	229,900,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10,780,295,552	10,740,120,052	(40,175,500)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	348,675,055	264,716,873	(83,958,182)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Guntung)	465,499,200	465,499,200	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Loktuan)	1,231,108,800	1,230,904,752	(204,048)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Elai)	1,033,248,000	1,034,258,000	1,010,000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Baru)	708,043,200	708,043,200	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Api-Api)	1,055,764,800	1,055,764,800	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Kuala)	500,088,000	500,088,000	-



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Guntung)	477,450,000	485,450,000	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Loktuan)	1,379,289,600	1,387,276,500	7,986,900
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Elai)	1,193,900,100	1,193,900,100	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Baru)	742,691,270	753,681,100	10,989,830
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Api-Api)	1,114,041,600	1,122,041,600	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Kuala)	530,495,927	538,495,927	8,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	797,649,653	1,578,931,609	781,281,956
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	793,329,653	1,424,611,609	631,281,956
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Guntung)	45,400,000	210,400,000	165,000,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Loktuan)	102,670,000	131,460,000	28,790,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Gunung Elai)	48,400,000	53,400,000	5,000,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Bontang Baru)	106,530,250	492,081,740	385,551,490
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Api-Api)	453,655,703	495,596,169	41,940,466
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Bontang Kuala)	36,673,700	41,673,700	5,000,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,320,000	154,320,000	150,000,000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,320,000	154,320,000	150,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103,060,500	587,348,318	484,287,818
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	103,060,500	587,348,318	484,287,818
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30,000,000	279,897,818	249,897,818
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Guntung)	14,000,000	14,000,000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Loktuan)	14,000,000	14,000,000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Elai)	11,415,000	257,315,000	245,900,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Baru)	14,000,000	2,490,000	(11,510,000)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Api-Api)	14,000,000	14,000,000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Kuala)	5,645,500	5,645,500	-
KECAMATAN BONTANG SELATAN	42,753,218,912	48,014,181,085	5,260,962,173
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,737,830,891	25,340,519,149	2,602,688,258
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,396,592	3,396,592	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,698,296	1,698,296	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,698,296	1,698,296	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,319,589,440	17,963,364,513	1,643,775,073
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,314,494,552	17,958,269,625	1,643,775,073
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,698,296	1,698,296	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,698,296	1,698,296	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,698,296	1,698,296	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18,000,000	215,000,000	197,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18,000,000	215,000,000	197,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,083,079,435	1,320,086,660	237,007,225
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,997,298	14,997,298	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	681,699,749	656,269,102	(25,430,647)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,996,948	19,996,948	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,919,840	48,804,712	(11,115,128)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,325,600	11,325,600	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295,140,000	568,693,000	273,553,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260,290,501	512,805,711	252,515,210
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260,290,501	512,805,711	252,515,210
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,480,920,922	4,513,519,422	32,598,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600,000	-	(600,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239,970,000	209,760,000	(30,210,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,240,350,922	4,303,759,422	63,408,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572,554,001	812,346,251	239,792,250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92,874,000	283,666,250	190,792,250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,950,000	9,950,000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184,910,001	233,910,001	49,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284,820,000	284,820,000	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,168,982,859	7,438,223,155	3,269,240,296
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	525,699,685	537,617,185	11,917,500



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	449,999,685	461,997,185	11,997,500
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75,700,000	75,620,000	(80,000)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3,634,290,674	6,891,613,470	3,257,322,796
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	28,995,000	28,995,000	-
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	90,000,000	63,894,000	(26,106,000)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17,448,003	332,527,603	315,079,600
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Satimpo)	466,539,158	1,246,755,329	780,216,171
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Laut)	651,331,612	827,134,377	175,802,765
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Lestari)	931,068,239	1,151,945,739	220,877,500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	405,536,024	867,250,949	461,714,925
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Berbas Tengah)	572,825,958	1,303,670,320	730,844,362
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Berbas Pantai)	470,546,680	1,069,440,153	598,893,473
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8,992,500	8,992,500	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8,992,500	8,992,500	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,495,397,560	14,800,977,703	(694,419,857)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5,174,415,827	4,364,211,870	(810,203,957)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Satimpo)	11,495,300	11,495,300	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	15,912,250	15,912,250	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	11,980,000	11,980,000	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	12,674,800	12,674,800	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Berbas Tengah)	24,980,900	24,980,900	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	24,625,000	24,625,000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Satimpo)	486,227,077	736,112,077	249,885,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	852,534,254	76,690,000	(775,844,254)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	548,056,792	548,056,792	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Berbas Tengah)	1,399,893,498	549,893,498	(850,000,000)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	529,245,732	533,583,115	4,337,383
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Satimpo)	172,119,598	192,119,598	20,000,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	264,167,252	394,148,637	129,981,385
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	151,271,500	127,064,000	(24,207,500)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	199,924,325	546,166,654	346,242,329



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Berbas Tengah)	300,677,400	350,677,400	50,000,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	168,630,149	208,031,849	39,401,700
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10,320,981,733	10,436,765,833	115,784,100
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	144,312,500	210,803,418	66,490,918
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Satimpo)	562,560,000	562,560,000	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tanjung Laut)	932,587,200	932,587,200	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Lestari)	509,193,600	509,193,600	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	796,915,200	796,915,200	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Berbas Tengah)	1,424,452,800	1,424,452,800	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Berbas Pantai)	619,665,600	619,665,600	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Satimpo)	663,099,620	671,099,620	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Tanjung Laut)	1,007,900,000	1,017,193,182	9,293,182
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Lestari)	503,950,000	511,950,000	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	875,304,013	883,304,013	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Berbas Tengah)	1,644,446,000	1,652,446,000	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Berbas Pantai)	636,595,200	644,595,200	8,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	181,097,002	181,097,002	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	144,000,000	144,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Satimpo)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Tanjung Laut)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Bontang Lestari)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Berbas Tengah)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Berbas Pantai)	24,000,000	24,000,000	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37,097,002	37,097,002	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	37,097,002	37,097,002	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	169,910,600	253,364,076	83,453,476
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	169,910,600	253,364,076	83,453,476
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20,000,000	20,000,000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Satimpo)	24,995,600	39,995,600	15,000,000



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Tanjung Laut)	25,000,000	29,992,500	4,992,500
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Lestari)	24,970,000	39,970,000	15,000,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	24,945,000	53,405,976	28,460,976
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Berbas Tengah)	25,000,000	40,000,000	15,000,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Berbas Pantai)	25,000,000	30,000,000	5,000,000
KECAMATAN BONTANG BARAT	27,277,713,049	30,177,653,595	2,899,940,546
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,829,074,980	17,050,664,373	221,589,393
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,396,592	3,396,200	(392)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,698,296	1,698,100	(196)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,698,296	1,698,100	(196)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,011,218,380	10,562,138,398	550,920,018
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,008,671,380	10,559,602,048	550,930,668
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	849,000	845,450	(3,550)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	849,000	845,450	(3,550)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	849,000	845,450	(3,550)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300,914,000	495,406,468	194,492,468
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,914,000	144,256,468	43,342,468
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000	351,150,000	151,150,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	908,934,210	1,111,577,190	202,642,980
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,246,994	15,241,440	(5,554)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	354,068,500	486,231,076	132,162,576
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139,747,944	59,856,044	(79,891,900)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,140,772	36,241,130	3,100,358
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,117,500	7,117,500	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359,612,500	506,890,000	147,277,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000	110,671,092	60,671,092
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38,773,364	38,773,364



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	71,897,728	21,897,728
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,113,592,947	4,142,977,244	(970,615,703)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,000	-	(500,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324,080,000	230,000,000	(94,080,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,789,012,947	3,912,977,244	(876,035,703)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441,018,851	624,497,781	183,478,930
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173,446,600	229,779,100	56,332,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,360,000	7,450,000	(910,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	218,382,251	327,468,681	109,086,430
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,830,000	59,800,000	18,970,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,349,573,363	3,809,732,516	1,460,159,153
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	436,629,897	487,628,370	50,998,473
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	418,901,875	418,901,794	(81)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17,728,022	68,726,576	50,998,554
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1,885,154,831	3,279,631,646	1,394,476,815
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	31,003,454	31,003,454	-
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	268,132,075	282,120,868	13,988,793
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,715,905	81,290,905	61,575,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanaan)	548,325,869	798,778,426	250,452,557
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)	411,396,928	549,206,628	137,809,700
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Belimbing)	606,580,600	1,537,231,365	930,650,765
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	27,788,635	42,472,500	14,683,865
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	27,788,635	42,472,500	14,683,865
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7,856,022,025	9,039,891,821	1,183,869,796
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,507,733,985	3,309,736,377	802,002,392
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Kanaan)	13,500,000	13,500,000	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	15,492,150	15,492,150	-
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Belimbing)	14,500,000	14,500,000	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	75,000,000	-	(75,000,000)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	690,000,000	751,147,800	61,147,800
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	760,818,365	1,627,911,629	867,093,264
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kanaan)	44,981,008	60,206,008	15,225,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Telihan)	261,560,000	329,560,000	68,000,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Belimbing)	631,882,462	497,418,790	(134,463,672)



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5,348,288,040	5,730,155,444	381,867,404
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	353,394,800	603,349,600	249,954,800
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kanaan)	487,852,800	507,432,904	19,580,104
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Telihan)	732,732,000	805,784,500	73,052,500
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Belimbing)	1,288,424,400	1,298,324,400	9,900,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Kanaan)	359,999,850	367,999,850	8,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Telihan)	793,440,000	806,820,000	13,380,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Belimbing)	1,332,444,190	1,340,444,190	8,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	142,714,500	136,662,235	(6,052,265)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72,000,000	115,689,600	43,689,600
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Kanaan)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Gunung Telihan)	24,000,000	24,000,000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (Kelurahan Belimbing)	24,000,000	67,689,600	43,689,600
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70,714,500	20,972,635	(49,741,865)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	70,714,500	20,972,635	(49,741,865)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100,328,181	140,702,650	40,374,469
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,328,181	140,702,650	40,374,469
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43,328,181	105,702,650	62,374,469
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Kanaan)	15,000,000	15,000,000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Telihan)	20,000,000	20,000,000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Belimbing)	22,000,000	-	(22,000,000)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9,411,746,907	11,486,673,400	2,074,926,493
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,411,746,907	11,486,673,400	2,074,926,493
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,411,746,907	11,486,673,400	2,074,926,493
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,500,636,727	7,723,113,997	1,222,477,270
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,445,500	23,081,400	8,635,900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,556,750	17,174,250	5,617,500



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,888,750	5,907,150	3,018,400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,254,565,486	4,595,801,103	341,235,617
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,249,102,986	4,582,512,921	333,409,935
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,731,250	6,393,750	3,662,500
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,731,250	6,894,432	4,163,182
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117,380,000	248,390,767	131,010,767
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17,300,000	203,390,767	186,090,767
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,080,000	45,000,000	(55,080,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	912,655,141	1,617,958,127	705,302,986
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237,756,148	256,672,841	18,916,693
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,899,000	9,898,751	(249)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,419,863	49,419,863	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,272,130	38,486,672	(4,785,458)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	572,308,000	1,263,480,000	691,172,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	265,690,000	265,690,000	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	265,690,000	265,690,000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697,435,600	691,435,600	(6,000,000)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	10,000,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,650,000	48,650,000	(6,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632,785,600	632,785,600	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238,465,000	280,757,000	42,292,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193,170,000	235,462,000	42,292,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22,000,000	22,000,000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,295,000	23,295,000	-
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	592,210,000	1,322,817,057	730,607,057
Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	592,210,000	1,322,817,057	730,607,057
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	306,065,000	667,122,157	361,057,157
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	286,145,000	655,694,900	369,549,900
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,148,350,020	910,637,515	(237,712,505)
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,148,350,020	910,637,515	(237,712,505)
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1,146,600,020	908,887,515	(237,712,505)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	1,750,000	1,750,000	-



URAIAN	APBD 2022		BERTAMBAH / BERKURANG
	MURNI	PERUBAHAN	
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	136,915,183	366,912,299	229,997,116
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136,915,183	366,912,299	229,997,116
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	104,108,139	335,190,914	231,082,775
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32,807,044	31,721,385	(1,085,659)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	522,847,338	604,724,893	81,877,555
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	522,847,338	604,724,893	81,877,555
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	336,429,588	267,739,143	(68,690,445)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	181,007,750	331,575,750	150,568,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5,410,000	5,410,000	-
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	510,787,639	558,467,639	47,680,000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	510,787,639	558,467,639	47,680,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	507,375,639	555,055,639	47,680,000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3,412,000	3,412,000	-
JUMLAH	1,294,087,325,921	1,656,441,252,306	285,583,381,221

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melahirkan desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan dengan pemerintah daerah. Makna yang terkandung dalam asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan urusan umum pemerintahan oleh pemerintah daerah terkait otonomi mengatur dan otonomi mengurus urusan pemerintahan.

Urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

3.1. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, terdiri dari pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan industri.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan**

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN
2	KESEHATAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	TENAGA KERJA
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PANGAN
4	PERTANAHAN
5	LINGKUNGAN HIDUP
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	PERHUBUNGAN
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	PENANAMAN MODAL
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	STATISTIK
15	PERSANDIAN
16	KEBUDAYAAN
17	PERPUSTAKAAN
18	KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PARIWISATA
3	PERTANIAN
4	PERDAGANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
1	PERENCANAAN
2	KEUANGAN
3	KEPEGAWAIAN
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bontang melaksanakan 24 urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya dilaksanakan pula 4 (empat) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, selanjutnya dijabarkan secara ringkas pencapaian masing-masing urusan pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib

3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mencakup penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang wajib diterima oleh setiap orang sebagai warga negara, dimana di dalamnya telah diatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 6 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelaksanaan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang dilaksanakan untuk mendorong terjadinya percepatan perbaikan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dengan sasaran meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Kota Bontang dalam kebijakannya menjabarkan pelaksanaan urusan Pendidikan sebagai implementasi misi ke-3 yaitu “Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua, ditetapkan indikator sasaran yakni nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2022 realisasi nilai IPM mencapai 80,94 meningkat 0,35 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang telah mencapai 80,59. Realisasi IPM tahun 2022 tersebut pada bidang Pendidikan mencakup realisasi Rata-rata Lama Sekolah untuk penduduk 15 tahun keatas mencapai 10,81 tahun atau meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Adapun untuk harapan lama sekolah pada tahun 2022 tercapai 13,18 tahun atau meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pendidikan dasar pada tahun 2022 Angka Kelulusan jenjang SD/MI tercapai 99,36 persen dan SMP/Mts tercapai 97,94 persen.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pendidikan dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 15 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.287.395.600.367,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.214.308.398.354,- atau 74,57%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 98,52%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan

dapat dilihat pada lampiran tabel 3.2 Urusan Pendidikan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Permasalahan

- Untuk indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2022 hanya mencapai target 59,68% dari target yang ditetapkan sebesar 78,65%. Hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia nasuk SD/MI tidak kurang dari 7 tahun, sehingga orang tua cenderung menunda Pendidikan PAUD, dan kurangnya pemahaman pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi orang tua yang memiliki Anak Usia Dini (AUD) masih rendah.
- Belum ada regulasi wajib PAUD pra SD minimal 1 tahun

b. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi manfaat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada orang tua/keluarga yang memiliki Anak Usia Dini (AUD) yang berkerjasama dengan Lembaga/Organisasi yang terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Segera mengusulkan dan menyusun regulasi wajib PAUD pra SD minimal 1 tahun.



Tabel 3.2 Urusan Pendidikan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11		
			URUSAN PENDIDIKAN			287.395.600.367		214.308.398.354	98,52	74,57					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	214.620.908.140	100,00	155.392.073.847	100,00	72,40				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	196.156.224.043	100	137.902.004.037	100,00	70,30				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.689.910.000	100	1.599.200.000	100,00	94,63				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	5.456.297.300	100	5.094.697.435	100,00	93,37				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	48.473.182	100	47.722.230	100,00	98,45				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	10.662.269.664	100	10.202.197.469	100,00	95,69				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	607.733.951	100	546.252.676	100,00	89,88				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (Paket setara SD)	103,45	persen	71.626.096.704	102,30	57.815.043.978	98,89	80,72				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			APK SMP (Paket setara SMP)	102,66	persen		106,60		103,84					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			APK PAUD	78,65	persen		59,68		75,88					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	56	sekolah	35.566.995.392		30.308.031.104	-	85,21				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola	27	sekolah	21.595.966.677		18.586.148.420	-	86,06				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang dikelola	149	sekolah	13.160.794.635	149	8.700.934.074	100,00	66,11	DAK Non fisik untuk sekolah swasta (mekanisme hibah) sehingga tidak tercatat			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	50	sekolah	1.302.340.000	50	219.930.380	100,00	16,89	dalam pelaporan daerah tetapi tercatat pada sistem BOP SALUR		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid	508	rasio	673.387.222	571,49	644.133.274	112,50	95,66	DAK Non fisik untuk sekolah swasta (mekanisme hibah) sehingga tidak tercatat dalam pelaporan daerah tetapi tercatat pada sistem BOP Kesetaraan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Rasio guru/murid per kelas rata- rata	52.2	persen	673.387.222	78.35	644.133.274	150.10	95,66			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82.14	persen		84		101.97				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	100	persen	475.208.301	100,00	457.147.255	100,00	96,20			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit	17	dokumen	475.208.301	17	457.147.255	100,00	96,20			

2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Kota Bontang yakni untuk memastikan setiap masyarakat Kota Bontang mendapatkan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Sebagai bagian dari pencapaian sasaran pembangunan SDM, penyelenggaraan urusan Kesehatan menjadi salah satu indikator komposit dari pencapaian tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator dimaksud adalah pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2022 UHH Kota Bontang mencapai 74,57 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2021 yang telah mencapai 74,55. Penyelenggaraan urusan Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh masyarakat melalui program-program prioritas bidang kesehatan yang telah direncanakan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 9 program yang diimplementasikan dalam 30 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.339.140.646.390,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.296.553.325.369 atau 87,44%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 98,40%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.3 Urusan Kesehatan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Permasalahan

- Terdapat kenaikan Incident Rate Demam Berdarah Dengue (IR DBD) dari target tahun 2022 250 Rasio/100 ribu penduduk, menjadi 316 Rasio/100 ribu penduduk dimana peningkatan kasus ini disebabkan karena kualitas lingkungan belum baik ditandai dengan angka bebas jentik kurang dari 95% dan pemberantasan sarang belum dilakukan secara serentak dan terus menerus oleh Kepala Keluarga, misalnya menentukan untuk satu rumah ada satu Jumantik, serta dilakukan secara terpadu dimasyarakat. Selanjutnya tingginya curah hujan juga berpengaruh mempercepat menetasnya jentik ditempat penampungan air,
- Prevalensi balita gizi kurang, balita gizi kurus dan baduta gizi kurus disebabkan pada usia anak 36 bulan, pola asuh dan pola makan tidak sesuai standar sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan usia anak, banyak bumil KEK dan anemia,

pemantauan pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas yang belum memenuhi standar atau pasien yang belum mendapatkan layanan sesuai standar, selanjutnya pada usia anak antara 12-24 bulan sering rawan mengalami infeksi dan atau gangguan status gizi. Karena pada usia ini terjadi perubahan pola makan dari ASI menjadi makanan padat, beberapa baduta mengalami susah makan, serta adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu faktor determinan antara lain cakupan ASI Eksklusif yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 68,86%.

- Ukuran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD sebesar 107 indikator atau 70,39 %, dari target tahun 2022 dengan jumlah 114 indikator atau 75%, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya sarana prasarana dalam mendukung mutu pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian indikator SPM, serta masih belum adanya tim khusus untuk tingkat kepatuhan pelaporan kegiatan yang menyebabkan tingkat kepatuhan kurang maksimal di RSUD.
- Tidak terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Kegiatan RSUD pada tahun 2022 dikarenakan tidak sesuai antara rencana belanja dan harga satuan yang tersedia di SIPD serta sub kegiatan yang muncul di APBDP, sehingga masih belum maksimalnya komunikasi dan sinkronisasi antara pelaksanaan dilapangan dengan administrasi di RSUD.
- Pada kegiatan yang ada di BLUD terealisasi 100% sesuai target.

b. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

- Terkait IR DBD, perlu adanya kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kebersihan dirumah masing-masing, serta setiap keluarga memiliki satu orang Jumantik, sehingga pemberantasan sarang nyamuk dapat dilaksanakan.
- Pada tahun 2023 Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam pelaksanaan inovasi pengembangan nyamuk berwolfbachia.
- Pemberian PMT bagi Bumil KEK, edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat FE selama kehamilan, peningkatan pelayanan ANC sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, maksimalkan pelayanan kelas ibu hamil dan penyuluhan calon pengantin.



- Pola pengasuhan yang baik dan benar dalam bentuk pelayanan kesehatan melalui KIE, orientasi pertumbuhan dan perkembangan bagi kader posyandu, guru PAUD, ibu hamil, ibu balita, calon pengantin, remaja putri perlu dilakukan secara intensif oleh semua pihak terintegrasi dalam program di masing-masing unit terkait (Kesehatan, PPKB, Pendidikan, Kemenag, Kominfo dan lain - lain).
- Mengusulkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan bagian indikator SPM, serta mengadakan tim khusus tingkat kepatuhan SPM RSUD.
- Melakukan mengusulkan Standar Harga Satuan di SIPD dan lebih awal untuk melakukan sinkronisasi antara pelaksanaan dilapangan dengan administrasi.



Tabel 3.3 Urusan Kesehatan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN KESEHATAN			339.140.646.390		296.553.325.369	98,40	87,44				
			Dinas Kesehatan			141.204.603.646		118.982.442.001	98,17	84,26				
	Dinas Kesehatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DINKES)	100	persen	68.706.016.294	100,00	61.926.438.591	100,00	90,13			
	Dinas Kesehatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	89.347.625	100	4.460.000	100,00	4,99			
	Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	49.315.927.075	100	44.135.508.665	100,00	89,50			
	Dinas Kesehatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	366.960.000	100	366.754.500	100,00	99,94			
	Dinas Kesehatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	2.920.812.740	100	2.647.850.484	100,00	90,65			
	Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	772.983.632	100	641.846.500	100,00	83,03			
	Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	10.501.394.560	100	9.585.297.196	100,00	91,28			
	Dinas Kesehatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	4.738.590.662	100	4.544.721.246	100,00	95,91			
	Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	250	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	68.441.590.350	119,19	53.583.406.905	47,68	78,29			
	Dinas Kesehatan			Cakupan kepesertaan JKN	100	persen		104,30		104,30				
	Dinas Kesehatan			Ketersediaan obat esensial	100	persen		100,00		100,00				



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Kesehatan			Angka kematian bayi	11	Rasio		11,03		100,23				
	Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP sesuai standar	100	persen	13.705.216.919	100	12.586.800.653	100,00	91,84			
	Dinas Kesehatan			Rasio FKTP per satuan penduduk	1:25.000	rasio		1:25.000		100,00				
	Dinas Kesehatan			Persentase FKTR sesuai standar	100	persen		100		100,00				
	Dinas Kesehatan			ketersediaan alat esensial	100	persen		100		100,00				
	Dinas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB	92	persen	53.011.159.580	86	39.879.132.688	93,48	75,23			
	Dinas Kesehatan			Prevalensi HIV	0,17	persen		0,2		117,65				
	Dinas Kesehatan			IR DBD	250	rasio		317		126,80				
	Dinas Kesehatan			Prevalensi Hipertensi	25	persen		3,64		14,56				
	Dinas Kesehatan			Prevalensi balita gizi kurang	7,36	persen		8,10		110,05				
	Dinas Kesehatan			Prevalensi balita Gizi kurus	12,27	persen		15,13		123,31				
	Dinas Kesehatan			Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Terakreditasi	100	persen		100,00		100,00				
	Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan sistem informasi kesehatan terpadu/terintegrasi	100	persen	539.387.055	100	342.062.200	100,00	63,42			
	Dinas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKTL) Berizin	100	persen	1.185.826.796	100	775.411.364	100,00	65,39			
	Dinas Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	100	persen	2.641.097.135	100,00	2.372.052.488	100,00	89,81			
	Dinas Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan SDM Kesehatan	1	tahun	64.664.735	1	58.432.776	100,00	90,36			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	100	persen	2.576.432.400	100	2.313.619.712	100,00	89,80			
	Dinas Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100	persen	624.845.267	100,00	354.133.600	100,00	56,68			
	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana produksi dan distribusi obat berizin dan memenuhi standar	100	persen	9.519.900	100	6.220.000	100,00	65,34			
	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PIRT yang berizin yang memenuhi standar	70	persen	449.612.500	70	244.164.600	100,00	54,31			
	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan	85	persen	139.801.004	85	82.536.500	100,00	59,04			
	Dinas Kesehatan		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	persentase sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar	95	persen	25.911.863	59	21.212.500	62,11	81,86			
	Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	35	persen	791.054.600	46,60	746.410.417	133,14	94,36			
	Dinas Kesehatan		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Pedoman/ regulasi/ rekomendasi penerapan	6	buah	26.650.000	6	26.650.000	100,00	100,00			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kebijakan GERMAS									
	Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)	75	persen	515.520.211	55	477.806.028	73,33	92,68		
	Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	60	persen	248.884.389	70	241.954.389	116,67	97,22		
			Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada				197.936.042.744		177.570.883.368	82,31	89,71		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (RSUD)	100	persen	186.747.525.905	100,00	167.562.598.252	100,00	89,73		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	76.674.534.792	100	68.960.303.196	100,00	89,94		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	727.862.343	100	717.559.609	100,00	98,58		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	191.364.000	100	190.587.000	100,00	99,59		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	3.865.500.000	100	3.453.671.198	100,00	89,35		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	811.166.600	100	793.751.830	100,00	97,85		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat pemenuhan layanan BLUD	100	persen	104.477.098.170	100	93.446.725.419	100,00	89,44		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian SPM RSUD	114 (75%)	persen	8.125.539.089	107 (70,39)	8.035.102.260	93,86	98,89		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada			Status akreditasi RSUD	Paripurna	Status		paripurna		100,00			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada			Kinerja keuangan	19	Skor		19,00		100,00				
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				8.125.539.089		8.035.102.260	#DIV/0!	98,89			
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (RSUD)	100	persen	3.012.877.750	100,00	1.973.182.856	100,00	65,49			
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	100	persen	2.812.877.750	100	1.776.332.856	100,00	63,15			
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan sesuai standar mutu dan kompetensi	100	persen	200.000.000	100	196.850.000	100,00	98,43			
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	35	persen	50.100.000	-	-	-	-	Tercapai kinerja, keuangan tidak tercapai		
	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sadar Hidup Sehat Masyarakat Kota Bontang	1	kegiatan	50.100.000	1	-	100	-	Tidak sesuai antara rencana belanja dan harga satuan yang tersedia di SIPD, serta dikarenakan sub kegiatan yang muncul di APBD, sehingga masih kurangnya komunikasi dan sinkronisasi	Melakukan pengusulan standar harga satuan di SIPD dan lebih awal untuk melakukan sinkronisasi antara pelaksanaan di lapangan dengan administrasi RSUD	



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
											antara pelaksanaan dilapangan dengan administrasi di RSUD		

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh, yang dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan pesisir, menguatkan upaya penanggulangan banjir dan bencana lainnya, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur lainnya.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 10 program yang diimplementasikan dalam 18 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.183.511.660.362,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.166.782.448.940,00 atau 90,88% serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 98,47%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.4 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Kapasitas air baku saat ini belum mencukupi akan kebutuhan air baku untuk air minum yang menyebabkan pelayanan air minum menjadi kurang optimal. Dari kebutuhan air sebanyak 555 liter/detik baru mampu menyediakan sebesar 412 liter/detik.
- Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses untuk pengolahan air limbah domestiknya sehingga masih melakukan praktik BABS. Saat ini masih terdapat 2.345 KK yang masih melakukan praktik BABS yang tersebar di 8 Kelurahan di Kota Bontang.
- Menurunnya jalan dalam kondisi mantap akibat meningkatnya volume lalu lintas, terutama jalan menuju kantor pemerintahan dan kawasan industri Bontang Lestari. Panjang jalan mantap mengalami penurunan dimana pada tahun sebelumnya sepanjang 169,39 km sekarang menjadi 155,75 km dari seluruh jalan sepanjang 195,75 km.
- Masih belum optimalnya penanggulangan banjir yang ditandai dengan masih seringnya terjadi banjir baik banjir kiriman, banjir

lokal maupun banjir rob. Masih terdapat 283,75 ha area tergenang banjir.

b. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Kukar-Bontang (Bendungan Marangkayu) dan SPAM Regional Kutim-Bontang (Bekas Kolam Tambang PT. Indominco) sebagai alternatif untuk penyediaan air minum di Kota Bontang.
- Menyediakan fasilitas pengolahan air limbah domestik secara komunal atau terpusat kepada masyarakat yang belum memiliki akses dengan optimalisasi kapasitas IPAL komunal yang sudah ada maupun membangun IPAL komunal baru.
- Melakukan rehabilitasi/rekonstruksi untuk jalan yang mengalami kerusakan dan melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan jalan.
- Meningkatkan penataan aliran sungai dan normalisasi waduk untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, perbaikan dan pengembangan sistem drainase perkotaan dan lingkungan, serta pembangunan folder dan kolam depresi.



**Tabel 3.4 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			183.511.660.362		166.782.448.940	98,47	90,88				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemuhanlayanan penunjangurusan pemerintahdaerah	100	persen	19.208.470.041	100,00	17.523.171.823	100,00	91,23			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	14.531.356.037	100	13.193.354.576	100,00	90,79			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	290.155.455	100	163.700.000	100,00	56,42	Kegiatan diklat pegawai yang ditargetkan 29 orang hanya terealisasi 15 orang dikarenakan adanya bidang yang menganggarkan sendiri untuk melaksanakan diklat teknisnya	Anggaran diklat pegawai seluruhnya dimasukkan di kegiatan rutin (sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.304.098.122	100	1.288.571.772	100,00	98,81			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	623.822.027	100	603.593.624	100,00	96,76			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.739.713.200	100	1.621.303.465	100,00	93,19			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	719.325.200	100	652.648.386	100,00	90,73			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	87	persen	40.964.735.253	74,20	33.753.660.384	85,29	82,40	Penurunan kapasitas produksi dari sumur dalam yang disebabkan rusaknya 2 sumur dalam yang ada	Penambahan kapasitas air baku dengan pembangunan sumur dalam baru (sumber air tanah) untuk jangka pendek dan penggunaan sumber air permukaan untuk jangka menengah dan panjang	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Persentase kapasitas aliran sungai	67	persen		67,81		101,21				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	82,9	persen		82,13		99,07		Normalisasi danau tidak mencapai volume yang direncanakan. Dari	Meningkatkan volume normalisasi danau	



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
											target normalisasi 10.000 m3 hanya terrealisasi 6.700 m3		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai	911	meter 40.964.735.253	1.026	33.753.660.384	112,62	82,40	Realisasi anggaran tidak tersempit maksimal karena adanya 2 paket kegiatan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun dan dilakukan perpanjangan waktu melewati tahun anggaran	Mempercepat proses lelang kegiatan (melakukan proses lelang kegiatan diawal tahun)	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	82,19	persen 11.642.749.725	85,40	10.529.443.518	103,91	90,44			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumbangan Rumah Untuk Rumah Tangga	275	rumah 11.642.749.725	290	10.529.443.518	105,45	90,44			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Penambahan jaringan Pipa Distribusi	4721	meter	9.757		206,66				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	49	persen 570.125.286	50,00	562.671.600	102,04	98,69			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tanggayang terlayani persampahannya	200	Rumah tangga 570.125.286	200	562.671.600	100,00	98,69			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,5	persen 3.765.229.208	94,30	3.590.811.685	98,74	95,37	Tidak ada penambahan sumbangan rumah (SR) baru. Anggaran difokuskan untuk operasi dan pemeliharaan untuk jaringan dan SR eksisting	Penambahan SR dengan optimalisasi / pemanfaatan idle capacity IPAL komunal eksisting	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumbangan rumah untuk rumah tangga	0	sr 3.765.229.208	0	3.590.811.685	#DIV/0!	95,37			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Jumlah SR Terpelihara	796	sr	629		79,02				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Panjang Pipa Terpelihara	630	meter	630		100,00				



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	92,02	persen	11.287.425.757	93,61	10.731.684.062	101,73	95,08			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	639	meter	11.287.425.757	650	10.731.684.062	101,72	95,08			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	59,02	persen	46.988.624.989	54,69	44.893.405.304	92,66	95,54			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, di rehab dan direnovasi	42	unit	46.988.624.989	42	44.893.405.304	100,00	95,54			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90	persen	46.425.301.375	79,57	42.669.023.352	88,41	91,91	Jalan yang mengalami kerusakan lebih besar dari panjang jalan yang dibangun/ direkonstruksi/ rehabilitasi	Melakukan rehabilitasi/ rekonstruksi untuk jalan yang mengalami kerusakan dan melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan jalan	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	92,8	persen		93,41		100,66				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Jalan Yang Dibangun dan Direhabilitasi	1904	meter	46.425.301.375	1.962	42.669.023.352	103,07	91,91			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Panjang Jalan dan Jembatan Yang Dibangun, Direkonstruksi dan Direhabilitasi	15036	meter		19326,77		128,54				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Unit Jembatan Yang Dibangun dan Dipelihara	2	unit		2		100,00				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	77	persen	705.781.496	77,08	681.903.627	100,10	96,62			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampilkonstruksi yang telah tersertifikasi	70	orang	198.777.453	70	192.731.250	100,00	96,96			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan ketertiban usaha pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi	100	persen	507.004.043	100	489.172.377	100,00	96,48			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			Tingkat ketertibanusaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	1	dokumen		1		100,00				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Kesesuaian Tata Ruang	88,6	persen	1.953.217.232	94,17	1.846.673.585	106,29	94,55			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan	1	dokumen	1.651.418.332	1	1.554.572.450	100,00	94,14			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang Diterbitkan	100	dokumen	33.284.900	100	27.897.000	100,00	83,81			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1	dokumen	268.514.000	1	264.204.135	100,00	98,39			

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh, yang dilakukan dengan meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 5 program yang diimplementasikan dalam 14 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.45.585.748.845,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.41.984.455.277,- atau 92,10% serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 98,46%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.5 urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Permasalahan

- Penataan kawasan permukiman belum optimal ditandai dengan masih adanya perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 36,85 ha.
- Masih adanya backlog hunian sebanyak 8.636 unit rumah.
- Belum semua penduduk mempunyai akses hunian yang layak dimana masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 1.271 unit rumah.

b. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- Meningkatkan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kolaborasi pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota sesuai dengan kewenangannya, dan mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh baru.
- Menyediakan hunian yang layak huni dan terjangkau dengan pembangunan rusunawa maupun rumah khusus.
- Perbaiki terhadap rumah tidak layak huni yang ada melalui pendanaan APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.



Tabel 3.5 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			45.585.748.845		41.984.455.277	98,46	92,10			
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	13.076.486.181	100,00	12.116.735.855	100,00	92,66		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	6.377.155	100	6.007.300	100,00	94,20		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	7.990.631.244	100	7.175.695.468	100,00	89,80		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	854.250.295	100	813.180.795	100,00	95,19		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	2.222.511.006	100	2.196.916.231	100,00	98,85		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.048.883.831	100	1.048.853.041	100,00	100,00		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	953.832.650	100	876.083.020	100,00	91,85		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban	6	persen	4.998.109.411	100,00	4.280.710.885	1.666,67	85,65		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
				bencana kabupaten/kota									
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	8,5	persen		10,00		117,65			
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	1	Dokumen	48.824.382	1		100,00	-	Sub kegiatan dilakukan tanpa menggunakan anggaran (nonbudgeting)	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah rehabilitasi korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun	2	rumah	541.353.000	0		-	-	Anggaran tidak direalisasikan karena tidak ada rumah terdampak bencana yang ditetapkan oleh walikota atau relokasi program pemerintah	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & Jiwa penghuni rumah susun umum & khusus yg dibina	406	jiwa	4.407.932.029	323	4.280.710.885	79,56	97,11	Belum semua kamar rusunawa terisi penghuni	- melakukan sosialisasi terkait hunian rusunawa - meningkatkan sarana dan prasarana rusunawa
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	26,99	persen	7.136.002.292	25,24	6.185.503.217	93,52	86,68		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	1	dokumen	264.080.000	1	130.433.914	100,00	49,39		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	1	dokumen	271.500.000	1	228.918.153	100,00	84,32		
	Dinas Perumahan, Kawasan		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di	0,8	ha	6.600.422.292	1,87	5.826.151.150	233,75	88,27		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
	Permukiman dan Pertanahan		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani									
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	2,67	persen	253.700.000	2,47	212.115.380	107,50	83,61		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0	rumah	253.700.000	0	212.115.380	100	83,61		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	92,38	persen	20.121.450.961	92,47	19.189.389.940	100,09	95,37		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	92,14	persen		91,83		99,66		Pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan yang direncanakan sepanjang 2.300 m hanya terealisasi 1.757m	Meningkatkan kegiatan rehabilitasi drainase lingkungan yang mengalami kerusakan atau aliran air tidak lancar
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	54	persen		54,00		100,00			
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana TPU	27	jenis	20.121.450.961	27	19.189.389.940	100,00	95,37		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Panjang drainase yang dibangun/direhab	1000	meter		1.757,52		175,75			
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Panjang jalan yang dibangun/direhab	2000	meter		2.582,30		129,12			

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara umum menjadi sasaran strategis daerah dalam rangka menciptakan kodusifitas wilayah melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial masyarakat. urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menetapkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yakni penanganan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian 100 persen. Hal ini bermakna bahwa gangguan trantibum yang terjadi selama tahun 2022 dapat ditangani seluruhnya.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 26 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.45.223.788.782,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.41.934.069.685 atau 92,73%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 101,29%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.6 urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Klasifikasi BPBD Kota Bontang masih pada tipe B;
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia BPBD Kota Bontang;
- Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana;
- Masih terdapat 2 dari 38 kejadian kebakaran yang belum memenuhi waktu tanggap (response time) 15 menit;
- Baru 8 kelurahan yang sudah memiliki Balakar (Barisan Relawan Kebakaran);
- Akses yang tidak memadai menuju lokasi kejadian kebakaran (jalan kecil dan yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadaman);



- Belum meratanya kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas dalam pelaksanaan tugas dalam pemenuhan SPM;
- Keterbatasan pada sarana untuk komunikasi (Repeater HT) dan alat transportasi untuk penegakan perda dan pengawasan pejabat.

b. Upaya Mengatasi Permasalahan

- Menyusun Perda untuk revisi kelembagaan BPBD untuk meningkatkan klasifikasi menjadi tipe A;
- Penambahan anggaran pengadaan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahun anggaran 2023;
- Mengusulkan tambahan formasi kepegawaian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana dengan memenuhi kebutuhan perlengkapan pendampingan dan pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana;
- Mengkaji ulang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Bontang di tahun 2023;
- Mendorong pembentukan relawan kebakaran di semua kelurahan dan pembinaanya;
- Melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh mobil pemadam dan menyiapkan sarana yang sesuai dengan kondisi di lokasi tersebut;
- Mengoptimalkan dan meningkatkan SDM melalui kegiatan pelatihan dasar bagi Satpol PP yang dilaksanakan oleh Kemendagri sebagai wujud pemerintahan konkuren yang fokus pada pelayanan dasar dan;
- Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan tanggung jawab Satpol PP.



**Tabel 3.6 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			45.223.788.782		41.934.069.685	101,29	92,73			
			Satuan Polisi Pamong Praja			15.271.160.600		14.036.551.268					
	Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100	persen	14.016.414.035	100,00	12.928.488.688	100,00	92,24		
	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	7.184.674.198	90,51	6.503.113.143	90,51	90,51		
	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	334.295.439	100	309.239.000	100,00	92,50		
	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.036.807.048	100	918.253.439	100,00	88,57		
	Satuan Polisi Pamong Praja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	486.890.000	100	455.040.000	100,00	93,46		
	Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	4.317.248.800	100	4.268.308.438	100,00	98,87		
	Satuan Polisi Pamong Praja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	656.498.550	100	474.534.668	100,00	72,28		
	Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	persen	1.254.746.565	100,00	1.108.062.580	100,00	88,31		
	Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75	persen		86,67		115,56			
	Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan	100	persen	1.025.093.810	100	921.402.580	100,00	89,88		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
				Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daerah									
	Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	100	persen	229.652.755	100	186.660.000	100,00	81,28		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah			7.189.684.936		6.428.199.474				
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	100	persen	5.861.950.275	100,00	5.381.023.444	100,00	91,80		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	3.093.113.320	100	2.816.049.891	100,00	91,04		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	45.818.178	100	43.870.000	100,00	95,75		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	838.687.129	100	765.094.914	100,00	91,23		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.128.122.400	100	1.071.511.213	100,00	94,98		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	756.209.248	100	684.497.426	100,00	90,52		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	100	persen	1.327.734.661	100,00	1.047.176.030	100,00	78,87		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	persen	10.800.000	100	10.800.000	100,00	100,00		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	716.11.634	100	626.803.530	3,82	87,49	Kondisi masih pandemi COVID sehingga belum memungkinkan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana di tingkat RT	Membuat video pelatihan, melakukan kegiatan sesuai prokes jika kondisi pandemic mulai menurun	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	persen	600.523.027	100	409.572.500	100,00	68,20			
			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				22.762.943.246		21.469.318.943					
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (DPKP)	100	persen	18.109.564.448	100,00	16.995.932.692	100,00	93,85			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	14.400.000	100	14.385.883	100,00	99,90			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.886.913.706	100	6.207.718.881	100,00	90,14			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.616.730.888	100	1.586.783.320	100,00	98,15			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	780.867.684	100	758.927.584	100,00	97,19			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	199.936.530	100	197.669.910	100,00	98,87			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	7.419.874.390	100	7.239.173.219	100,00	97,56			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	1.190.841.250	100	991.273.895	100,00	83,24			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	persen	4.653.378.798	94,74	4.473.386.251	94,74	96,13			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.326.103.744		4.147.869.130	#DIV/0!	95,88			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	persen	29.448.454	100,00	29.199.500	100,00	99,15			
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100	persen	297.826.600	100	296.317.621	100,00	99,49			

6. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dengan indikator tingkat kemiskinan. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data BPS (*Bontang Dalam Angka tahun 2022*), angka kemiskinan Kota Bontang mengalami penurunan dari 4,62 pada tahun 2021 menjadi 4,54% pada tahun 2022. Realisasi tingkat kemiskina tersebut masih lebih tinggi dari target Kota Bontang yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 yaitu 4,03% di tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi permasalahan kemiskinan di Kota Bontang antara lain: penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dengan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, ketidakmauan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk keluar dari garis kemiskinan, adanya *mindset* warga Bontang yang menganggap mata pencaharian hanya dari sector formal dan kurangnya kompetensi untuk berwirausaha atau mencari pekerjaan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Sosial dilaksanakan melalui 5 program yang diimplementasikan dalam 11 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.19.747.237.894,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.16.657.053.550,- atau 84,35%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemaberdayaan Masyarakat. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.7 urusan sosial.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Pemberian santunan kematian bagi warga Kota Bontang: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak berdasarkan data valid yang bersumber dari Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bontang.

- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa melalui pemberitahuan ke Dinas Sosial. Dengan demikian DSPM tidak dapat memantau efektif atau tidaknya terkait penyaluran BPNT. Permasalahan baru muncul Ketika terdapat KPM yang terdaftar sebagai penerima tetapi saldo yang bersangkutan Rp 0.
- Kurang validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikarenakan pengurusan surat pindah langsung melalui Disdukcapil tanpa sepengetahuan RT untuk pengurusan surat pindah domisili sehingga tidak ada *update* data ditingkat RT.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial antara lain:

- Pembuatan aplikasi Data Base PMKS Kota Bontang yang terverifikasi dan validasi sebagai dasar syarat penerima Santunan Kematian sehingga terintegrasi antara data base PMKS dengan data ahli waris calon penerima santunan kematian.
- Melakukan koordinasi secara intensif antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Kota Bontang terkait jadwal penyaluran bantuan sosial dan melakukan konfirmasi ke Himbara dalam hal ini bank penyalur BNI terkait saldo Rp 0 di rekening KPM. Melakukan pembaharuan dan verifikasi validasi data secara berkala terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Tabel 3.7 Urusan Sosial
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN SOSIAL			19.747.237.894		16.657.053.550	100,00	84,35			
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	10.920.548.949	100,00	10.212.847.179	100,00	93,52		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.785.008.992	100	6.371.175.510	100,00	93,90		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	107.468.900	100	93.088.551	100,00	86,62		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.101.218.630	4	954.178.407	4,00	86,65		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	2.503.940.277	100	2.437.821.531	100,00	97,36		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	422.912.150	100	356.583.180	100,00	84,32		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	persen	333.503.273	100,00	259.720.657	100,00	77,88		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	4	jenis	333.503.273	4	259.720.657	100,00	77,88	Pelaksanaan kegiatan banyak yang bersumber dari dana pusat dan Provinsi	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	persen	2.546.004.675	100,00	2.388.936.292	100,00	93,83		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial	Jumlah pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta	5	jenis	2.434.364.675	5	2.287.362.446	100,00	93,96		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
				gelandangan pengemis di luar panti sosial									
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah pelayanan rehabilitasi sosial	5	jenis	111.640.000	5	101.573.846	100,00	90,98		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	persen	5.653.601.488	100,00	3.507.124.794	100,00	62,03		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100	persen		100,00		100,00			
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	100	persen	5.653.601.488	100	3.507.124.794	100,00	62,03	Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT BBM pada SK Wali Kota tidak mengambil dana BLT BBM	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100	persen	293.579.509	100,00	288.424.628	100,00	98,24		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	2	jenis	231.889.509	2	226.763.100	100,00	97,79		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	1	jenis	61.690.000	1	61.661.528	100,00	99,95		

3.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah selain dari urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 18 urusan dengan penjelasan realisasi kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan dukungan perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pelatihan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan.

Sebagai urusan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis daerah yakni menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang, program-program yang dilaksanakan diharapkan memiliki dampak terhadap meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Bontang. Berdasarkan realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT), angka TPT mengalami penurunan dari 9,92 persen pada tahun 2021 menjadi 7,81 persen pada tahun 2022. Penurunan TPT ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi di Kota Bontang pada tahun 2022.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 4 program yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.11.947.584.760,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.11.489.453.263,- atau 96,17%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 273,23%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.8 urusan tenaga kerja.

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dimaksudkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan

tenaga kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan, ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah pada urusan ketenagakerjaan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Jumlah pendaftar pelatihan kompetensi lebih besar dibandingkan dengan jumlah kuota peserta pelatihan.
- Belum adanya metode baku dalam pengukuran produktifitas kerja sehingga mempengaruhi kualitas kinerja dan produktifitas tenaga kerja.
- Belum adanya lembaga sertifikasi tingkat daerah kab/kota, saat ini lembaga tersebut adanya pada tingkat level propinsi. Hal ini mempengaruhi terhadap kompetensi lembaga/LPK dalam memberikan pelatihan/bimbingan terhadap pencari-pencari kerja di daerah kab/kota tersebut.
- Terbatasnya jumlah tenaga fungsional mediator hubungan industrial untuk menangani kasus-kasus sengketa/perselisihan ketenagakerjaan.
- Sarana dan prasarana masih belum tersedia maksimal, karena anggaran guna pembiayaan tersebut belum tersedia, sehingga mempengaruhi pembinaan secara optimal ke perusahaan-perusahaan.
- Tim deteksi dini tingkat kota belum terbentuk, dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembiayaan terhadap kompensasi SDM tersebut.
- Terbatasnya lowongan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja
- Kurangnya kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan/dunia usaha.
- Kompetensi/keahlian pencari kerja tidak sesuai syarat yang diinginkan/kebutuhan pemberi kerja.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Melakukan penyusunan dokumen rencana kebutuhan tenaga kerja tingkat daerah secara sistematis guna dijadikan dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan



program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

- Melakukan kegiatan pengukuran produktifitas tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing secara global dengan menerapkan prinsip produktifitas yakni efektif, efisien dan berkualitas.
- Melakukan peningkatan pembinaan terhadap lembaga swasta/LPK guna peningkatan kompetensi lembaga pelatihan tersebut.
- Penambahan jumlah tenaga fungsional mediator dan pengantar kerja
- Memberikan pelatihan dan Bimtek terhadap SDM jabatan mediator guna peningkatan kualitas mutu SDM/pegawai.
- Melakukan sosialisasi dan informasi terkait peraturan ketenagakerjaan
- Melakukan penambahan anggaran guna pengadaan sarana-prasarana penunjang kinerja SDM pegawai.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dan penyelenggaraan program magang.
- Membuat kegiatan Event “Job Fair” untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, cepat, tepat sasaran, efektif dan lebih terjangkau.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan membuka pelayanan malam, guna mempermudah bagi para pencari kerja untuk mengurus syarat mencari kerja seperti kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/1).
- Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan perusahaan dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan tenaga kerja daerah.
- Intensifikasi pengumpulan, pengolahan dan penyebar luasan informasi pasar kerja melalui inovasi “HANDAK BEGAWI”, merupakan kerja sama dalam bentuk MoU pelatihan/pemagangan antar DISNAKER dengan perusahaan dan pelatihan tersebut tidak menggunakan APBD.



Tabel 3.8 Urusan Tenaga Kerja
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN TENAGA KERJA			11.947.584.760		11.489.453.263	273,23	96,17			
	Dinas Ketenagakerjaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	8.686.597.972	100,00	8.260.161.219	100,00	95,09		
	Dinas Ketenagakerjaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.021.697.626	100	5.654.374.221	100,00	93,90		
	Dinas Ketenagakerjaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	263.850.000	100	242.860.000	100,00	92,04		
	Dinas Ketenagakerjaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	521.067.912	100	520.344.560	100,00	99,86		
	Dinas Ketenagakerjaan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	199.538.134	100	189.074.650	100,00	94,76		
	Dinas Ketenagakerjaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.513.848.900	100	1.490.889.557	100,00	98,48		
	Dinas Ketenagakerjaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	166.595.400	100	162.618.231	100,00	97,61		
	Dinas Ketenagakerjaan		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja	0,37	persen	2.830.328.741	2,07	2.830.008.632	559,46	99,99		
	Dinas Ketenagakerjaan			Persentase pencari kerja yang dilatih	1,61	persen		5,00		310,56			
	Dinas Ketenagakerjaan		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	231	orang	2.830.328.741	100	2.830.008.632	43,29	99,99		
	Dinas Ketenagakerjaan		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	19,4	persen	40.494.811	26,50	37.466.900	136,60	92,52		
	Dinas Ketenagakerjaan		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Mendapat Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota	100	persen	28.494.890	100	25.717.700	100,00	90,25		
	Dinas Ketenagakerjaan		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Jumlah data dan informasi pasar kerja yang dikelola	100	persen	11.999.921	100	11.749.200	100,00	97,91		
	Dinas Ketenagakerjaan		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	7,09	persen	390.163.236	18,40	361.816.512	259,52	92,73		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
	Dinas Ketenagakerjaan		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang dicegah dan diselesaikan	100	persen	390.163.236	100	361.816.512	100,00	92,73			

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu fokus layanan urusan wajib Pemerintah non pelayanan dasar dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan serta melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan buruk lainnya melalui penguatan, pembinaan serta peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.10.103.449.165,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.9.549.103.085,- atau 94,51%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 134,67%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.9 urusan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Penerapan Juknis/Juklak/SOP/Peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum diterapkan dengan baik;
- Kurangnya pagu anggaran dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota);
- Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan UPTD dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) khususnya Psikolog;
- Belum optimalnya koordinasi antara Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan DWP;
- Belum adanya Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak yang tersandarisasi.
- Kurangnya pemahaman OPD terkait Kota Layak Anak (KLA);
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam perlindungan khusus anak.



b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- Melakukan koordinasi dan Sosialisasi tentang PUG dan PPRG kepada Lembaga Pemerintah dan Swasta;
- Penambahan pagu anggaran dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota);
- Mengajukan usulan penambahan tenaga SDM dalam Pelayanan UPTD dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) khususnya Psikolog ke BKPSDM;
- Melakukan Koordinasi secara intensif dengan Pengurus DWP.
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD yang terkait dalam Gugus tugas KLA.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam perlindungan khusus anak.



**Tabel 3.9 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			10.103.449.165		9.549.103.085	134,67	94,51			
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	8.133.782.384	100,00	7.930.296.911	100,00	97,50		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.100.974.596	100	5.987.143.884	100,00	98,13		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	528.633.018	100	471.409.573	100,00	89,18		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.129.858.224	100	1.105.316.958	100,00	97,83		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	374.316.546	100	366.426.496	100,00	97,89		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	47,78	persen	295.032.988	47,78	255.650.870	100,00	86,65		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	0,375	persen		0,41		109,33			
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100	persen	295.032.988	100	255.650.870	100,00	86,65		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100	persen	828.384.238	100,00	643.098.814	100,00	77,63		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	50.970.000	100	49.767.875	100,00	97,64		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	persen	777.414.238	100	593.330.939	100,00	76,32		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	20	persen	506.691.040	66,67	452.722.110	333,35	89,35		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	100	persen	395.727.124	100	351.847.496	100,00	88,91		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota									
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	100	persen	110.963.916	100	100.874.614	100,00	90,91		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Predikat	85.223.712	Nindya	80.067.300	100,00	93,95		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	persen	85.223.712	30	80.067.300	30,00	93,95		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	persen	254.334.803	100,00	187.267.080	100,00	73,63		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	150.392.184	30	103.547.500	30,00	68,85		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Persentase penyelesaian kasus anak	100	persen	1.800.000		-	-	-		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	persen	102.142.619	100	83.719.580	100,00	81,96		

3. Urusan Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi penduduk. Perwujudan ketersediaan pangan dilakukan dengan salah satunya melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Pada aspek keterjangkauan pangan, kebijakan yang ditempuh dilaksanakan dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga serta pemerataan distribusi pangan.

Pelaksanaan Urusan Pangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pangan antara lain: Pencapaian skor pola pangan harapan, meningkatkannya ketersediaan cadangan pangan, distribusi, akses, diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat serta penanganan daerah yang mengalami kerawanan pangan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pangan dilaksanakan melalui 4 program yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.19.704.282.743,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.18.859.507.392,- atau 95,71%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 101,36%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.10 urusan urusan pangan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan penyediaan cadangan pangan pemerintah masih minim.
- Kualitas konsumsi penduduk Kota Bontang belum tercapai maksimal, sehingga diperlukan upaya penyuluhan, sosialisasi yang terus menerus untuk pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan
- Masih belum adanya wadah untuk melakukan pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, sehingga untuk pengujian masih menggunakan laboratorium di luar daerah.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pangan antara lain:

- Pengadaan CPP dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah;
- Diusulkan untuk pembuatan laboratorium mini; dan



- Anggaran akan lebih diarahkan untuk peningkatan pencapaian penganeekaragaman konsumsi pangan, bekerja sama dengan TP PKK Kota Bontang.



Tabel 3.10 Urusan Pangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PANGAN			19.704.282.743		18.859.507.392	101,36	95,71			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKP3)	100	persen	16.856.035.098	100,00	16.250.620.742	100,00	96,41		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	10.995.326.271	100	10.574.202.128	100,00	96,17		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	197.890.000	100	196.290.000	100,00	99,19		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	2.092.520.977	100	2.028.226.482	100,00	96,93		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	2.825.193.600	100	2.793.347.956	100,00	98,87		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	745.104.250	100	658.554.176	100,00	88,38		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	87	nilai	2.716.442.814	89,80	2.493.772.731	103,22	91,80		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian			Ketersediaan Energi dan Protein	2400; 63	AKE=kk al/AKP= gram		2486,48; 99,62		103,60			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5	dokumen	723.607.461	100	668.997.009	2.000,0 0	92,45		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	50	ton	283.269.808	15,297	218.013.911	30,59	76,96		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPNG tahun 2012	88	persen	1.709.565.545	109,31	1.606.761.811	124,22	93,99			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100	persen	65.927.942	100,00	64.901.419	100,00	98,44			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1	dokumen	65.927.942	1	64.901.419	100,00	98,44			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100	persen	65.876.889	100,00	50.212.500	100,00	76,22			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	persen	65.876.889	100	50.212.500	100,00	76,22			

4. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
2. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota;
5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
6. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota;
7. Inventarisasi pemanfaatan kosong dalam kabupaten/kota dan tanah Daerah;
8. Penerbitan izin membuka tanah; dan
9. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tanah menurut PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, didefinisikan sebagai permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Dengan demikian pertanahan yang dimaksud merupakan segala sesuatu yang terkait dengan objek tanah dalam wilayah kabupaten/kota.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pertanahan dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.644.715.076,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.640.071.853,- atau 99,28%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.11 urusan pertanahan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa dan ganti kerugian/santunan tanah



memerlukan waktu penyelesaian relatif lama, bahkan dapat melebihi 1 tahun anggaran tergantung pada dinamika kesepakatan para pihak; dan

- Belum terlaksananya penatagunaan tanah berupa pola pengelolaan tata guna tanah dalam rangka pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Bontang, terutama bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- Membangun basis data pertanahan dalam satu sistem informasi yang sinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Bontang;
- Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media sosial dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi pertanahan kepada aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat secara kolaboratif; dan
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan dalam rangka penatagunaan tanah.



Tabel 3.11 Urusan Pertanahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PERTANAHAN			644.715.076		640.071.853	100,00	99,28			
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pengaduan Sengketa tanah yang ditangani	100	persen	345.371.854	100,00	343.319.217	100,00	99,41		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penangan sengketa tanah garapan	8	dokumen	345.371.854	8	343.319.217	100,00	99,41		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemkot	100	persen	246.354.946	100,00	245.010.231	100,00	99,45		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	1	dokumen	246.354.946	1	245.010.231	100,00	99,45		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas APL yang diberikan izin penguasaan	100	persen	52.988.276	100,00	51.742.405	100,00	97,65		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin membuka tanah	3	lokasi	52.988.276	3	51.742.405	100,00	97,65		

5. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi Kota Bontang yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

Sesuai dengan pencapaian misi pembangunan tersebut salah satu indikator sasaran strategis daerah yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari, indikator kinerja yang ditetapkan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2022 indikator ini telah mencapai 67,96 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 65,33.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 10 program yang diimplementasikan dalam 16 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.44.900.735.840,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.41.794.003.228,- atau 93,08%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 98,15%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.12 urusan lingkungan hidup.

2) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kota Bontang belum memiliki laboratorium lingkungan yang layak dan berakreditasi;
- Penanganan sampah yang belum optimal serta usia TPA yang hampir mendekati akhir;
- Kualitas air limbah terutama dari usaha kecil menengah masih belum terpantau;
- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan belum optimal.



b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup antara lain:

- Menyusun perencanaan dan pembangunan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
- Menyusun perencanaan dan pembangunan/ perluasan TPA serta peremajaan armada pengangkut sampah dan sarana prasarana pengelolaan TPA;
- Sosialisasi kepada pengusaha kecil menengah untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan menjaga kualitas air limbah perlu terus ditingkatkan;
- Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat khususnya terkait perubahan konsep pengelolaan persampahan perlu terus ditingkatkan.



Tabel 3.12 Urusan Lingkungan Hidup
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			44.900.735.840		41.794.003.228	98,15	93,08				
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	16.091.799.395	100,00	14.416.693.254	100,00	89,59			
	Dinas Lingkungan Hidup		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	1.830.000	100	1.830.000	100,00	100,00			
	Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	8.826.749.156	100	8.297.389.467	100,00	94,00			
	Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	235.000.000	100	225.000.000	100,00	95,74			
	Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.545.443.578	100	1.468.624.743	100,00	95,03			
	Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.156.217.060	100	1.072.648.556	100,00	92,77			
	Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	4.326.559.601	100	3.351.200.488	100,00	77,46			
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	persen	363.373.550	100,00	320.596.000	100,00	88,23			
	Dinas Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kajian KLHS	1	kali	363.373.550	1	320.596.000	100,00	88,23			
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	83	persen	346.980.610	85,00	305.060.614	102,41	87,92			
	Dinas Lingkungan Hidup		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	93	persen	327.970.610	73	287.050.614	78,49	87,52			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota										
	Dinas Lingkungan Hidup		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Cakupan pemulihan	100	persen	19.010.000	100	18.010.000	100,00	94,74		
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	32	persen	10.891.783.356	26,60	10.463.088.134	83,13	96,06		
	Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas pengelolaan Kehati	46,56	ha	10.891.783.356	46,56	10.463.088.134	100,00	96,06		
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100	persen	7.222.500	100,00	4.288.200	100,00	59,37		
	Dinas Lingkungan Hidup		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas	1	laporan	7.222.500	1	4.288.200	100,00	59,37		
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	100	persen	131.486.327	100,00	115.837.400	100,00	88,10		
	Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penghargaan yang diberikan	4	jenis	131.486.327	4	115.837.400	100,00	88,10		
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan kasus	100	persen	25.990.886	100,00	10.829.155	100,00	41,67		
	Dinas Lingkungan Hidup		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian pengaduan kasus	100	persen	25.990.886	100	10.829.155	100,00	41,67		
	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100	persen	17.042.099.216	99,65	16.157.610.471	99,65	94,81		
	Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah	100	persen	17.042.099.216	99,65	16.157.610.471	99,65	94,81		

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 memiliki sasaran strategis yaitu tertib administrasi pendudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.11.419.221.736,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.11.105.844.088,- atau 97,26%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.13 urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan/bila tidak ada keperluan (misal akta kematian, surat pindah).

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- Upaya yang dapat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan adalah semakin menggerakkan dukungan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Selain itu dapat juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, media massa, sekolah-sekolah, dan juga dilakukan sosialisasi pada kegiatan PKK.



**Tabel 3.13 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.419.221.738		11.105.844.088	100,00	97,26		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	9.124.591.290	100,00	8.884.294.526	100,00	97,37			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.688.812.379	100	6.592.848.966	100,00	98,57			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	245.928.575	100	245.476.500	100,00	99,82			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	476.872.202	100	431.443.897	100,00	90,47			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	455.397.504	100	453.372.050	100,00	99,56			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.013.378.080	100	949.253.629	100,00	93,67			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	244.202.550	100	211.899.484	100,00	86,77			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	0,99	persen	2.282.598.799	0,99	2.209.551.062	100,00	96,80			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terlaksananya kegiatan pendaftaran kependudukan	100	persen	2.282.598.799	100	2.209.551.062	100,00	96,80			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi Adminduk	100	persen	12.031.649	100,00	11.998.500	100,00	99,72			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	persen	3.232.002	100	3.219.000	100,00	99,60			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	persen	8.799.647	100	8.779.500	100,00	99,77			

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama yang akan diwujudkan adalah melalui proses stimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan. Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Lembaga masyarakat dan masyarakat dimaksud mencakup peran serta swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 1 program yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.1.120.730.139,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.1.050.625.586,- atau 93,74%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.14 urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Meningkatkan efektivitas peran lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk menjadi stimulator dalam peningkatan partisipasi masyarakat.



Tabel 3.14 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1.120.730.139		1.050.625.586	100,00	93,74			
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100	persen	1.120.730.139	100,00	1.050.625.586	100,00	93,74		
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	3	jenis	1.120.730.139	3	1.050.625.586	100,00	93,74		

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu fokus layanan urusan wajib Pemerintah non pelayanan dasar dalam mencapai tujuan strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang berdaya saing dan sejahtera melalui penguatan, pembinaan, peningkatan kapasitas serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan kualitas layanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 8 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.4.209.775.594,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.3.673.582.992,- atau 87,26%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 122,74%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.15 urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Belum tersusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar di Kota Bontang.
- Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Lomba Pengelola KB Teladan dan hari Puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas).
- Kurangnya Tenaga Penyuluh KB untuk penggerakan KB kepada masyarakat.
- Kurangnya tenaga terlatih (Tenaga Kesehatan/Bidan) dalam pelayanan KB.
- Pelaksanaan delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting belum maksimal dan belum tepat waktu.
- Belum optimalnya peran TPK dalam pendampingan dan penurunan angka stunting di Kota Bontang.



- Kurangnya peran Kecamatan, Kelurahan serta kurang aktifnya tenaga kesehatan dalam membina dan mendampingi TPK.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, pembentukan Pokja GDPK, melakukan monev dan sosialisasi.
- Melakukan sosialisasi kepada TPK dan menginformasikan jadwal terlebih dahulu dan melakukan konfirmasi kehadiran peserta pelatihan, lomba dan hari puncak Harganas.
- Mengajukan usulan penambahan/pengadaan tenaga penyuluh KB kepada Pusat.
- Perlu adanya penambahan anggaran untuk pelatihan bagi tenaga Kesehatan/Bidan dalam pelayanan KB (Pelatihan Contraceptive/CTU).
- Perlu adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
- Perlu adanya penguatan dan motivasi kepada Tim Pendamping Keluarga dalam upaya percepatan dan penurunan stunting.
- Perlu adanya penguatan peran Kecamatan, Kelurahan serta tenaga kesehatan dalam membina dan mendampingi TPK.



**Tabel 3.15 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.209.775.594		3.673.582.992	122,74	87,26			
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	persen	237.624.312	1,65	198.726.362	82,50	83,63		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	100	persen	70.728.600	100	58.555.100	100,00	82,79		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	166.895.712	100	140.171.262	100,00	83,99		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	70	persen	1.824.994.290	57,00	1.794.304.474	81,43	98,32		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		100	persen	308.267.740	90	268.535.120	90,00	87,11		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	persen	72.000.000	100	72.000.000	100,00	100,00		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	100	persen	1.375.726.550	100	1.385.450.554	100,00	100,71		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam		100	persen	69.000.000	100	68.318.800	100,00	99,01		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	70	persen	2.147.156.992	143,00	1.680.552.156	204,29	78,27		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	persen	2.079.363.492	80	1.617.404.656	80,00	77,78	Kurang aktifnya tenaga kesehatan dalam mendampingi tim pendamping keluarga (TPK) sehingga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas (berupa transport pendamping)	Menggerakan kembali dan memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan akan pentingnya melakukan pendampingan kepada TPK
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	persen	67.793.500	100	63.147.500	100,00	93,15		

9. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub-urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayaran.

Pentingnya penyelenggaraan perhubungan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan demikian urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan sub-urusan dimaksud yang lokasinya dalam kabupaten/kota atau yang manfaatnya hanya dalam kabupaten/kota, atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.21.635.469.602,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.19.882.685.500,- atau 91,90%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 111,54%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.16 urusan Perhubungan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- APILL dan fasilitasi lintas angkutan jalan (LLAJ) sudah banyak yang tidak layak; dan
- Terbatasnya sarana pendukung operasional lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- Revitalisasi APILL dan fasilitasi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi;
- Pengadaan mobil operasional pemeliharaan kelengkapan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).



Tabel 3.16 Urusan Perhubungan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PERHUBUNGAN			21.635.469.602		19.882.685.500	111,54	91,90			
	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	14.355.272.185	100,00	12.892.563.670	100,00	89,81		
	Dinas Perhubungan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	3.215.500	100	2.920.000	100,00	90,81		
	Dinas Perhubungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	7.161.515.673	100	6.793.504.982	100,00	94,86		
	Dinas Perhubungan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.419.293.535	100	1.255.233.200	100,00	88,44		
	Dinas Perhubungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	815.784.933	100	801.052.819	100,00	98,19		
	Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	3.327.226.970	100	3.026.335.381	100,00	90,96		
	Dinas Perhubungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	1.628.235.574	100	1.013.517.288	100,00	62,25		
	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	63,00	persen	7.280.197.417	77,54	6.990.121.830	123,08	96,02		
	Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100	persen	7.100.235.182	100	6.812.214.750	100,00	95,94		
	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan pengelolaan fasilitas parkir	100	persen	179.962.235	100	177.907.080	100,00	98,86		

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; serta
3. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 2 program yang diimplementasikan dalam 8 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.19.630.707.134,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.18.983.528.322,- atau 96,70%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 123,01%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.17 urusan Komunikasi dan Informatika.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Belum optimalnya penyebaran informasi publik melalui kanal resmi pemerintah;
- Belum maksimalnya keterisian data PPID di masing-masing Perangkat Daerah;
- Belum maksimalnya kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 15 kelurahan; dan
- Belum optimalnya integrasi layanan Pemerintah Kota Bontang.



b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi publik melalui kanal resmi pemerintah;
- Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terkait pentingnya keterisian data di PPID sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat di 15 Kelurahan secara berkala; dan
- Pembangunan SuperApp sebagai satu sistem layanan Pemerintah Kota Bontang yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.



Tabel 3.17 Urusan Komunikasi dan Informatika
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			19.630.707.134		18.983.528.322	123,01	96,70			
	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhanlayanan penunjangurusan pemerintahandaerah	100	persen	7.750.579.662	100,00	7.547.777.617	100,00	97,38		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	5.039.775.093	100	4.950.067.999	100,00	98,22		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	139.282.000	100	64.177.000	100,00	46,08		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	850.782.401	12	834.691.716	12,00	98,11		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.266.599.168	100	1.260.808.641	100,00	99,54		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	454.141.000	100	438.032.261	100,00	96,45		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	47,88	persen	3.397.836.066	72,49	3.282.399.993	151,40	96,60		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai STRAKOM dan SOP yang Telah Ditetapkan	100	persen	3.397.836.066	100	3.282.399.993	100,00	96,60		
	Dinas Komunikasi dan Informatika			1.2 Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Daerah yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	20	persen		20		100,00			
	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	31	persen	8.482.291.406	40,00	8.153.350.712	129,03	96,12		
	Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	80,64	persen		90,00		111,61			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
				disediakan oleh Dinas Kominfo									
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Persentase Penerapan Sistem Elektronik Dalam Layanan Publik	100	persen	8.482.291.406	100	8.153.350.712	100,00	96,12		
	Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	persen		100		100,00			

11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Koperasi dan UMKM dititik beratkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kelembagaan koperasi sebagai wadah dan wahana meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi harus mampu meningkatkan kinerjanya baik aspek manajemen, peningkatan SDM pengurus dan peningkatan permodalan, melalui pemupukan modal sendiri.

Disamping koperasi perlu menjalin kerjasama dan networking dengan sentra-sentra produksi dan usaha kecil menengah sebagai mitra usaha untuk saling mendukung dan bekerjasama. Berkenaan dengan hal tersebut koperasi berupaya mampu dapat berperan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan.

1) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan

Pada tahun 2022, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.30.443.507.601,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.26.988.386.748,- atau 96,70%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 123,01%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.18 urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.
- Belum optimalnya daya saing produk UMKM
- Kurangnya pemasaran produk UMKM

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Melakukan monitoring dan pendampingan baik itu koperasi maupun pelaku UKM utk peningkatan kualitas dan daya saing baik SDM, kelembagaan dan produksi.
- Pendampingan berkelanjutan pelaku usaha dan memantau peningkatan omzet pelaku usaha binaan.



Tabel 3.18 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			30.443.507.601		26.988.386.748	89,72	88,65				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	25.529.673.739	100,00	22.272.461.762	100,00	87,24			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	500.000	100	500.000	100,00	100,00			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	12.363.943.163	100	9.673.291.836	100,00	78,24			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.301.616.545	100	1.245.360.004	100,00	95,68			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.871.427.071	100	1.807.959.453	100,00	96,61			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	779.000.000	100	779.000.000	100,00	100,00			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	8.474.182.960	100	8.052.720.929	100,00	95,03			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	739.004.000	100	713.629.540	100,00	96,57			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	64,1	persen	21.092.208	54,93	16.007.660	85,69	75,89	1. Jumlah koperasi yang RAT (37)/jumlah koperasi aktif (71)=54,30. 2. Capaian program tidak tercapai karena tidak	Perlu pendampingan bagi pengurus /pengawas yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan RAT	



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	100	persen	21.092.208	100	16.007.660	100,00	75,89		patuhnya koperasi terhadap UU no. 25 tentang perkoperasian, walaupun sudah dihimbau melalui surat, apabila tidak melaksanakan RAT selama 3 kali berturut-turut maka akan ditinjau badan usahanya.		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	40	persen	10.000.000	42,25	8.827.260	105,63	88,27		Dari 68 KSP/USP baru 30 KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	Mendorong agar KSP/USP agar dapat tepat waktu RAT tahun buku 2020 sehingga dapat di nilai kesehatannya	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian	30	koperasi	10.000.000	30	8.827.260	100,00	88,27				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	84,34	Persen	404.200.000	84,34	401.495.492	100,00	99,33				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus dan Pengawas Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38,4	persen	404.200.000	84,34	401.495.492	219,63	99,33				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	2,21	persen	500.000.040	1,04	448.299.000	46,99	89,66				



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,17	persen	500.000.040	0,58	448.299.000	49,31	89,66		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	0,5	persen	3.978.541.614	12,62	3.841.295.574	100,00	96,55		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase capaian atas peningkatan asset dan omset pelaku usaha mikro	5	persen	3.978.541.614	5	3.841.295.574	100,00	96,55		

12. Urusan Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah meningkatkan fasilitasi dan pelayanan publik bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kebijakan penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut sasaran strategis yang perlu disusun melalui pelaksanaan program-program pembangunan adalah meningkatnya daya saing investasi di Kota Bontang.

Pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan penanaman modal antara lain meningkatnya daya saing investasi daerah dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 11 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.12.349.984.256,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.11.715.783.152,- atau 94,86%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 109,29%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.19 urusan penanaman modal.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna meningkatkan investasi
- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajiban menyapikan LKPM
- Belum teridentifikasinya data potensi daerah
- Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan perizinan
- Belum optimalnya promosi investasi
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten
- Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan pegawasan perizinan dan akuntabilitas dapat lebih terjamin.



b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal antara lain:

- Menyusun strategi promosi penanaman modal
- Monitoring dan koordinasi dengan pihak penanam modal/investor
- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada perusahaan
- Melakukan pendampingan/fasilitasi investor baik yang baru ataupun yang masih mengalami kesulitan/kendala dilapangan
- Disusunnya peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota
- Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan perizinan



Tabel 3.19 Urusan Penanaman Modal
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN PENANAMAN MODAL				12.349.984.256		11.715.783.152	109,29	94,86			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhanlayanan penunjangurusan pemerintahandaerah	100	persen	10.093.607.917	100,00	9.548.942.648	100,00	94,60			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.561.528.832	100	6.144.184.203	100,00	93,64			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	222.840.000	100	206.691.478	100,00	92,75			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.029.464.845	12	1.018.596.216	12,00	98,94			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	1.968.492.540	100	1.911.052.617	100,00	97,08			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	311.281.700	100	268.418.134	100,00	86,23			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	4.150.000	Juta Rp	309.521.607	1.763.829	295.257.532	42,50	95,39	Nilai realisasi investasi sampai dengan triwulan III		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun	1	dokumen	210.312.607	1	206.303.976	100,00	98,09			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	1	dokumen	99.209.000	1	88.953.556	100,00	89,66			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2	investor	605.144.500	2	586.608.473	100,00	96,94			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2	dokumen 605.144.500	2	586.608.473	100,00	96,94	2 Investor yang difasilitasi (PT.Kima Makassar dan PT. Dzam Starindo)		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	87,5	nilai 197.715.000	87,40	185.416.787	99,89	93,78			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	3	dokumen 197.715.000	3	185.416.787	100,00	93,78			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	37,5	persen 506.117.932	80,00	463.775.715	213,33	91,63			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	3	dokumen 506.117.932	3	463.775.715	100,00	91,63			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	100	persen 637.877.300	100	635.781.997	100,00	99,67			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data perizinan dan non perizinan	1	dokumen 637.877.300	1	635.781.997	100,00	99,67			

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Sejalan dengan upaya menuju Kota Bontang yang lebih Hebat dan Beradab diperlukan strategi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan kepemudaan yang berfungsi melakukan penyadaran serta memunculkan potensi kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan. Sementara tujuan pembangunan bidang olahraga dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta menumbuhkan jiwa sportivitas dan disiplin sebagai usaha dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan khususnya milik daerah.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 4 program yang diimplementasikan dalam 14 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.35.606.748.504,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.32.967.014.273,- atau 92,59%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 127,52%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.20 urusan kepemudaan dan olahraga.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Sarana dan prasarana olahraga yang ada masih harus ditingkatkan
- Belum adanya sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
- Masih banyak pelaku olahraga yang belum tersertifikasi dan berkualifikasi sesuai standar

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:



- Dilakukan perencanaan sarana prasarana untuk menunjang prestasi atlet.
- Perlu di bentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) untuk meningkatkan tidak hanya minat pemuda dan pelajar dalam olahraga tetapi juga dapat meningkatkan atlet berprestasi.
- Perlu dianggarkan untuk sertifikasi khususnya bagi pelaku olahraga.



Tabel 3.20 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penuhannya layanan penunjangurusan pemerintahdaerah	100	persen	14.551.103.648	100,00	14.132.689.006	100,00	97,12		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	93.404.000	5	92.556.600	5,00	99,09		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.273.026.355	100	6.004.475.641	100,00	95,72		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.518.546.546	100	1.492.636.798	100,00	98,29		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.256.434.984	100	1.251.190.456	100,00	99,58		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	3.318.379.827	100	3.257.930.888	100,00	98,18		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	2.091.311.936	100	2.033.898.623	100,00	97,25		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100	persen	5.358.924.906	100,00	4.486.976.870	100,00	83,73		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	65	orang	3.672.617.178	65	2.935.627.564	100,00	79,93		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keanggotaan Organisasi Pemuda	164	orang	1.686.307.728	198	1.551.349.306	120,73	92,00		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	29,06	persen	15.208.323.706	61,05	13.893.481.246	210,08	91,35			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Prestasi Olahraga	6	unit	827.901.126	6	690.424.766	100,00	83,39			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Event Kejuaraan keolahragaan yang di ikuti	4	event	5.703.342.221	4	5.633.860.161	100,00	98,78			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabor yang dibina	45	cabang olahraga	247.907.500	45	217.889.746	100,00	87,89			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2	organisasi	7.224.999.059	2	6.746.026.087	100,00	93,37			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.204.173.800	5	605.280.486	5,00	50,27			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100	persen	488.396.244	100,00	453.867.151	100,00	92,93			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Anggota Organisasi Kepramukaan	12	cabang kwartir pramuka	488.396.244	12	453.867.151	100,00	92,93			

14. Urusan Statistik

Urusan Statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Statistik dilaksanakan melalui 1 program yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.248.343.200,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.237119.000,- atau 95,48%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.21 urusan statistik.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Data statistik sektoral yang tersedia belum memenuhi standar Satu Data Indonesia; dan
- Belum tersedianya dukungan integrasi sistem informasi data yang berkualitas.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi adalah:

- Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan Satu Data Indonesia dengan perangkat daerah terkait;
- Meningkatkan kolaborasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan;
- Mengusulkan formasi sumber daya manusia statistisi di seluruh perangkat daerah; dan
- Mengembangkan aplikasi sistem informasi satu data Kota Bontang.



Tabel 3.21 Urusan Statistik
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN STATISTIK			248.343.200		237.119.000	100,00	95,48			
	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	persen 248.343.200	100,00	237.119.000	100,00	95,48			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	persen	100,00		100,00				
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	100	persen 248.343.200	100	237.119.000	100,00	95,48			

15. Urusan Persandian

Urusan Persandian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Definisi dari istilah ‘sandi’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rahasia atau kode, sehingga istilah ‘persandian’ secara umum dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan suatu sistem kerahasiaan. Namun pengertian tentang persandian dewasa ini pada intinya dapat dikatakan hanya mencakup 3 (tiga) hal kegiatan, yakni: (i) penyandian, (ii) pembukaan sandi, dan (iii) analisis sandi. Kegiatan utama persandian adalah mengenkripsi dan mendekripsi suatu data. Enkripsi adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak dikehendaki. Sebaliknya, dekripsi adalah kegiatan membuka enkripsi dari suatu data sehingga dapat diketahui substansi informasinya. Dengan demikian, persandian adalah suatu kegiatan pengamanan informasi.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 program yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.994.182.136,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.765.323.752,- atau 76,98%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 79,34%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.22 urusan persandian.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya penerapan keamanan informasi;
- Masih rendahnya kolaborasi dalam keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Belum memadainya sarana dan prasarana *Security Operations Center (SOC)*
- Belum memadainya kapasitas SDM di bidang persandian.



b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi adalah:

- Sosialisasi penerapan keamanan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah;
- Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Menyusun analisa kebutuhan sarana dan prasarana SOC;
- Mengusulkan tambahan formasi SDM dan mengadakan pelatihan SDM terkait persandian.

**Tabel 3.22 Urusan Persandian****Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN PERSANDIAN			994.182.136		765.323.752	79,34	76,98				
	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	46,51	tingkat	994.182.136	36,90	765.323.752	79,34	76,98	Jumlah nilai perarea keamanan informasi (238)/jumlah area penilaian (645)*100 capaian program tidak tercapai karena kurangnya SDM dan Infrastruktur sapsras dibidang persandian untuk pengamanan informasi di Kota Bontang		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	100	persen	994.182.136	100	765.323.752	100,00	76,98			

16. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan Urusan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan: 1) pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya di dalam wilayah kabupaten/kota; 2) pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, dan pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dalam perkembangannya juga berperan untuk membangun kebudayaan baik sebagai tradisi kehidupan masyarakat yang perlu dilindungi dan dilestarikan maupun sebagai karya yang memiliki daya tarik bagi pengembangan pariwisata daerah.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 program yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.9.703.122.988,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.9.251.830.434,- atau 95,35%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.23 urusan kebudayaan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Tingkat terlaksananya kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Bontang pada tahun 2022, mencapai 80 persen dari target kinerja yang ditetapkan 100 persen. Hal ini dipengaruhi karena dalam pelaksanaannya kegiatan erau dan pesta laut, menyesuaikan kebutuhan realisasi pada saat kegiatan.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang sudah ditetapkan serta melakukan koordinasi / komunikasi sehingga dapat melestarikan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya.



Tabel 3.23 Urusan Kebudayaan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN KEBUDAYAAN				9.703.122.988		9.251.830.434	100,00	95,35			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100	persen	8.394.327.892	100,00	8.191.875.986	100,00	97,59			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan masyarakat Kota Bontang yang dikelola	2	kebudayaan	753.708.481	2	649.927.079	100,00	86,23			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	10	kesenian	1.331.100.455	10	1.298.486.880	100,00	97,55			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	2	lembaga	6.309.518.956	2	6.243.462.027	100,00	98,95			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	100	persen	1.308.795.096	100,00	1.059.954.448	100,00	80,99			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina	35	kesenian	1.308.795.096	35	1.059.954.448	100,00	80,99			

17. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan: 1) pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota; dan 2) pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan perpustakaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pendidikan, dimaksudkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan meningkatkan literasi masyarakat yang dapat mendorong peningkatan kualitas manusia masyarakat Kota Bontang.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 program yang diimplementasikan dalam 6 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.11.121.888.101,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.10.485.374.315,- atau 94,28%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 147,24%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.24 urusan perpustakaan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mengingat layanan yang dibuka setiap hari kerja, malam hari dan layanan sabtu minggu. Sehingga diperlukan tenaga tambahan untuk dapat melayani masyarakat Kota Bontang.
- Masih kurangnya anggaran untuk pelaksanaan urusan Perpustakaan yang berimbas pada kurang optimalnya pelayanan perpustakaan.
- Layanan Perpustakaan Keliling belum dapat menjangkau ke seluruh Kota Bontang dikarenakan kendaraan yang sebagai Perpustakaan Keliling hanya terdapat 2 unit dan juga tenaga SDM yang sangat terbatas. Sehingga tidak semua permintaan adanya Perpustakaan Keliling dapat diakomodir.
- Masih kurangnya kesadaran Perangkat daerah dan Perpustakaan Sekolah untuk meningkatkan pelayanan terkait perpustakaan. Dinas Perpustakaan telah melakukan pembinaan ke perpustakaan sekolah, Kelurahan dan Kecamatan. Dari 3 kecamatan dan 15 Kelurahan di Kota Bontang hanya 5 Kelurahan yang memiliki anggaran untuk meningkatkan layanan

perpustakaan di lokus tersebut.

- Sesuai dengan undang-undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 23 ayat 6 disampaikan bahwa sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah. Akan tetapi saat ini pelaksanaan amanat tersebut belum dilaksanakan secara maksimal sehingga program dan layanan perpustakaan sekolah tidak berjalan secara maksimal.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Beberapa langkah diambil agar pelayanan perpustakaan tetap berjalan meskipun masih kurangnya anggaran, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan dalam kolaborasi program Literasi di Kota Bontang untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan.
- Melakukan pengusulan untuk penambahan tenaga perpustakaan dan pustakawan melalui formasi CPNS dan PPPK.
- Mengadakan lomba perpustakaan Kecamatan/Kelurahan dan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kesadaran dari perpustakaan Kelurahan/Kecamatan dan perpustakaan sekolah.
- Menambahkan kegiatan inklusi sosial

**Tabel 3.24 Urusan Perpustakaan****Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN PERPUSTAKAAN				11.121.888.101		10.485.374.315	147,24	94,28			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	9.743.193.277	100,00	9.147.116.524	100,00	93,88			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.001.531.817	100	5.522.019.032	100,00	92,01			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	814.847.528	100	781.437.439	100,00	95,90			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	2.002.065.600	100	1.927.279.370	100,00	96,26			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	924.748.332	100	916.380.683	100,00	99,10			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpustakaan	35.000	orang	1.378.694.824	68.065	1.338.257.791	194,47	97,07			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	11	Bahan Pustaka	1.043.270.524	11	1.029.378.745	100,00	98,67			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1	orang	335.424.300	1	308.879.046	100,00	92,09			

18. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan Urusan kearsipan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan: 1) pengelolaan arsip dinamis Pemerintah daerah; dan 2) pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah daerah, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota; dan 3) pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 2 program yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.910.243.438,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.904.172.472,- atau 99,33%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 138,33%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.25 urusan kearsipan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Permasalahan pada urusan kearsipan secara umum adalah pemahaman mengenai pengelolaan kearsipan masih belum baik, yang berakibat pada kurang optimalnya pengelolaan arsip daerah.
- Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian.
- Belum terbangunnya Depo Arsip di Kota Bontang dimana hal ini mempengaruhi kinerja kearsipan dikarenakan belum adanya tempat untuk penarikan data permanen dari Perangkat Daerah. Hingga saat ini pembangunan Depo Arsip belum selesai karena kurangnya anggaran.
- Belum terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip. Pelaksanaan fumigasi seharusnya dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk memelihara arsip.
- Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar OPD;
- Keterbatasan arsiparis di LKD dan OPD;
- Sarpras Kearsipan baik di LKD maupun di OPD kurang memadai.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah

- Dilakukannya edukasi kepada pengelola kearsipan pada perangkat daerah, melalui sosialisasi dan pelatihan dalam rangka mendorong optimalisasi pengelolaan arsip daerah.
- Pembangunan depo arsip akan kembali dianggarkan pada tahun 2024 untuk kelanjutan pembangunan tahap selanjutnya.
- Perlunya dilakukan diklat struktural kearsipan dan peningkatan kapasitas arsiparis dan fungsional penyeteraan untuk peningkatan kapasitas pegawai.
- Perlu dilakukan pelatihan untuk tenaga arsiparis di masing-masing Perangkat Daerah.
- Diselenggarakannya lomba kearsipan untuk seluruh Perangkat Daerah guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya.



Tabel 3.25 Urusan Kearsipan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN KEARSIPAN			910.243.438		904.172.472	99,33	138,33			
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	50	persen	900.251.427	73,33	894.227.472	146,67	99,33		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	5	perangkat daerah	286.839.500	5	284.097.832	100,00	99,04		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	1	perangkat daerah	10.944.400	1	10.918.000	100,00	99,76		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola simpul JIKN	30	perangkat daerah	602.467.527	30	599.211.640	100,00	99,46		
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	10	persen	9.992.011	13,00	9.945.000	130,00	99,53		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang di autentikasi	3	perangkat daerah	9.992.011	4	9.945.000	133,33	99,53		

3.1.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 5 (lima) urusan dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan melibatkan serta memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat berbasis perikanan dengan pendekatan produk perikanan kepada masyarakat melalui pengenalan teknologi, diversifikasi olahan serta pemasaran produk perikanan. Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 urusan kelautan dan perikanan menjadi bagian dalam pencapaian misi Bontang berkelanjutan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Sebagai salah satu sector ekonomi daerah, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produktifitas sektor perikanan di Kota Bontang.

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diimplementasikan melalui pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 6 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.8.284.570.404,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.7.813.406.762,- atau 94,31%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 108,91%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.26 urusan kelautan dan perikanan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Banyaknya Kelompok Pembudidaya Ikan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan.
- Keterbatasan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pemantauan Usaha Budidaya
- Keterbatasan SDM tentang Persyaratan atau Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran



- Belum Memadainya Sarana Prasana Penunjang Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
- Terbatasnya kewenangan pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan wilayah laut, khususnya terkait dengan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan.
- Peningkatan SDM baik aparatur maupun Pelaku Usaha bidang perikanan
- Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
- Pengenalan dan Pelatihan Diversifikasi olahan hasil Perikanan
- Melakukan koordinasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan dukungan program dari dinas terkait dilingkungan Provinsi Kaltim.



**Tabel 3.26 Urusan Kelautan dan Perikanan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	19.743,7	ton	3.508.027.339	21.915,8	3.300.587.865	111,00	94,09		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	10	kelompok	2.890.743.989	10	2.760.611.362	100,00	95,50		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100	persen	617.283.350	100	539.976.503	100,00	87,48		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3000	ton	3.487.676.177	3.471,45	3.255.267.847	115,72	93,34		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Balai Benih Ikan	12	bulan	2.960.145.189	12	2.759.858.940	100,00	93,23		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian			Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang di bina	10	kelompok		10		100,00			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang disediakan	17	kelompok	527.530.988	17	495.408.907	100,00	93,91		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian			Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	17	jenis		17		100,00			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	22	persen	1.288.866.888	22,00	1.257.551.050	100,00	97,57		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil sektor perikanan	10	Unit usaha	549.922.681	10	529.580.000	100,00	96,30		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	22	persen	738.944.207	22	727.971.050	100,00	98,52		

2. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong sektor pariwisata yang diharapkan dapat berdampak terhadap perkembangan sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, sektor jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang.

Pengembangan pariwisata Kota Bontang telah ditetapkan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Adapun sasaran utamanya adalah meningkatkan daya saing sektor pariwisata menyongsong pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Berdasarkan data kunjungan wisata, jumlah wisatawan di Kota Bontang mengalami peningkatan dari 169.853 tahun 2021 menjadi 271.617 ditahun 2022.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 4 program yang diimplementasikan dalam 5 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.3.737.401.624,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.3.206.580.291,- atau 85,80%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 107,89%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.27 urusan pariwisata.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Belum ditetapkannya regulasi mengenai retribusi bidang pariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap pengelolaan kawasan/ ODTW yang sebagian berada diwilayah perairan Kota Bontang.
- Masih kurangnya informasi ke pelaku ekraf tentang petingnya HAKI bagi perlindungan produk pelaku ekraf.
- Masih kurangnya SDM yang secara spesifik di bidang Pariwisata



b. Upaya Mengatasi Masalah

- Melakukan penyusunan kajian tentang retribusi daerah urusan pariwisata sebagai dasar dan masukkan dalam penyusunan peraturan tentang retribusi daerah bidang pariwisata.
- Melakukan koordinasi, khususnya ke provinsi tentang perijinan pengelolaan kawasan wisata di wilayah perairan Kota Bontang.
- Meningkatkan penyebaran informasi dan kegiatan sosialisasi ke pelaku Usaha Ekraf tentang pentingnya HAKI.
- Diperlukan unit/bidang khusus yang menangani pengembangan ekraf



Tabel 3.27 Urusan Pariwisata
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkatat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
			URUSAN PARIWISATA			3.737.401.624		3.206.580.291	107,89	85,80				
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	60	persen	1.245.928.815	72,00	1.039.361.640	120,00	83,42			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan Strategis yang d kelola oleh kab / kota	3	odtw	1.154.511.565	3	1.039.361.640	100,00	90,03			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Dikelola Kabupaten / Kota	3	odtw	91.417.250	3	79.754.600	100,00	87,24			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	236.349	orang	584.418.863	271.617	454.196.874	114,92	77,72			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	236.349	kunjungan	584.418.863	271.617	454.196.874	114,92	77,72			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	0,3	persen	8.510.000	0,15	800.000	50,00	9,40	Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait HAKI ke pelaku usaha ekraf		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kratif	1	dokumen	8.510.000	1	800.000	100,00	9,40	uang tidak terserap karena pendaftar HAKI hanya 2 pelaku ekraf (masing2 400rb)		
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	20	persen	1.898.543.946	40,00	1.712.221.777	200,00	90,19			
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata			Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	22	persen		12,00		54,55				
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang di tingkatkan kapasitasnya	160	org	1.898.543.946	600	1.712.221.777	375,00	90,19			

3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan Pertanian dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

Sejalan dengan semakin terbatasnya lahan pertanian prioritas penyelenggaraan urusan pertanian sebagai pendukung kebijakan ketahanan pangan daerah, pelaksanaan program-program bidang pertanian diarahkan pada pengembangan urban farming. Hal ini telah ditetapkan sebagai sasaran yang di sinergikan dengan pelaksanaan program stimulant RT.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Pertanian dilaksanakan melalui 5 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.5.689.786.580,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.5.492.709.163,- atau 96,54%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.28 urusan pertanian.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Adanya penyakit dan hama pada tanaman yang disebabkan oleh faktor cuaca
- Pengembangan tanaman hortikultura di lahan tidur mengalami penurunan produksi disebabkan faktor iklim (banjir).
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur penyuluh (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) POPT
- Adanya penyakit hewan dalam hal ini Penyakit Mulut Dan Kuku(PMK) yang sedang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia dan kota bontang pada khususnya yang berimbas pada pertambahan populasi dan pembatasan lalu lintas ternak dari luar kota bontang.
- Pengalokasian anggaran untuk Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota masih minim

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian antara lain:



- Pembinaan kepada petani serta pemberian sarana dan prasarana pertanian seperti racun/pestisida pengendali hama dan penyakit tanaman
- Perlunya penanganan banjir dengan menyediakan daerah resapan air dan normalisasi sungai.
- Anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan SDM aparatur khususnya para penyuluh POPT.
- Melakukan pengendalian Penyakit Hewan (PMK) dengan melakukan edukasi, sanitasi atau desinfeksi pada daerah yang sudah atau belum terserang serta melakukan vaksinasi terhadap penyakit hewan lebih ditingkatkan



Tabel 3.28 Urusan Pertanian
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PERTANIAN			5.689.786.580		5.492.709.163	100,00	96,54			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	40	persen	2.000.329.460	40,00	1.916.517.473	100,00	95,81		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60	persen	967.468.126	60	934.999.823	100,00	96,64		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	117.803.391	100	107.477.200	100,00	91,23		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		█	█	915.057.943	1.112	874.040.450	█	95,52		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	40	persen	1.457.216.054	40,00	1.448.016.765	100,00	99,37		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	persen	1.457.216.054	100	1.448.016.765	100,00	99,37		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100	persen	912.937.792	100,00	864.824.301	100,00	94,73		
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian			Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	53,33	persen		53,33		100,00			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penjaminan kesehatan hewan	100	persen	509.132.510	100	488.452.548	100,00	95,94		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100	persen	278.806.731	100	278.103.331	100,00	99,75			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan hewan	100	persen	124.998.551	100	98.268.422	100,00	78,62			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100	persen	99.678.894	100,00	97.739.400	100,00	98,05			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100	persen	99.678.894	100	97.739.400	100,00	98,05			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100	persen	1.219.624.380	100,00	1.165.611.224	100,00	95,57			
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	persen	1.219.624.380	100	1.165.611.224	100,00	95,57			

4. Urusan Perdagangan

Perdagangan mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi pada mayoritas masyarakat Kota Bontang. Kondisi pasar dapat dijadikan sebagai indikator kondisi perekonomian daerah. Tingkat perputaran uang, daya beli masyarakat, kondisi harga, ketersediaan stok adalah beberapa parameter kondisi perekonomian daerah yang mampu dilihat dengan memperhatikan kondisi pasar sebagai pusat transaksi jual beli konvensional di masyarakat. Karena perkembangan pasar non konvensional (pasar online) dewasa ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Terlebih setelah adanya pandemi Covid 19, tren pasar online sangat naik daun karena adanya pembatasan sosial sebagai salah satu protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Keadaan pembatasan sosial dengan berbagai skala mengakibatkan sebagian besar memanfaatkan pasar online diberbagai media sosial.

Dalam sistem perdagangan selain ketersediaan infrastruktur sarana pemasaran dalam bentuk pasar tradisional (pasar yang dibangun dengan dana pemerintah dan di dalamnya terjadi proses tawar menawar) dan toko modern (proses jual beli tidak ada tawar menawar, harga sudah tercantum, sistem lebih modern dan pembeli melayani sendiri) juga perlu diperhatikan adalah bagaimana terwujud stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Bontang.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.7.211.010.504,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.7.007.636.886,- atau 97,18%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 99,36%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.29 urusan perdagangan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Masih rendahnya daya saing usaha perdagangan masyarakat Dibandingkan dengan toko-toko modern/waralaba.
- Sarana dan Prasarana di Pasar yang masih kurang, seperti di Pasar Rawa Indah perlu pengadaan Lift yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang berjualan di Luar Los Pasardan Trotoar jalan.



- Sarana dan Prasarana Unit Metrologi Legal masih dibawah standar, belum ada kendaraan untuk mengangkut alat standar sekitar 6 ton, dan Ruang Volume dan Ruang massa belum memadai.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Mendorong pelaku usaha perdagangan memanfaatkan e-commerce
- Pengadaan Lift Pasar Rawa Indah
- Pembangunan Gedung Metrologi Legal



Tabel 3.29 Urusan Perdagangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			URUSAN PERDAGANGAN			7.211.010.504		7.007.636.886	99,36	97,18			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perizinan	26,79	persen	361.635.000	100,00	357.807.580	373,27	98,94		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	26,42	persen	361.635.000	100	357.807.580	100,00	98,94		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100	persen	6.391.810.124	100,00	6.210.735.896	100,00	97,17		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	4	unit	4.630.944.850	4	4.481.728.480	100,00	96,78		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	118	orang	1.760.865.274	118	1.729.007.416	100,00	98,19		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	41	persen	457.565.380	40,21	439.093.410	98,07	95,96		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTTP	41	persen	457.565.380	40,21	439.093.410	98,07	95,96		

3.1.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan tugas unsur pendukung urusan Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah, meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah, meningkatnya harmonisasi kebijakan perekonomian daerah, terwujudnya pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai unsur pendukung urusan Pemerintah, Sekretariat Daerah berupaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Potensi tersebut perlu dikaji dan dikembangkan secara optimal sehingga menjadi modal dasar bagi Pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan tugas dari Sekretariat DPRD adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pada tahun 2022, unsur pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan melalui 5 program yang diimplementasikan dalam 36 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.199.859.384.215,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.179.032.107.695,- atau 89,58%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100,30%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.30 unsur pendukung urusan pemerintahan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Pelayanan publik di Kota Bontang belum maksimal karena pelayanan publik Pemerintah Kota Bontang masih dilakukan secara parsial/sektoral belum terpadu. Meningkatnya nilai SKM masih belum terlalu signifikan meskipun terjadi kenaikan. Hasil survei Tahun 2022 Pemerintah Kota Bontang bekerja sama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) serta Sekolah

Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang, diperoleh nilai SKM Pemerintah Kota Bontang sebesar 86.14 dengan mutu layanan B. Terjadi peningkatan nilai SKM apabila dibandingkan dengan nilai SKM di Tahun 2021, dimana nilai SKM Pemerintah Kota Bontang di Tahun 2021 adalah 84.37 dengan mutu layanan B.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan salah satunya adalah memaksimalkan fungsi pada mall pelayanan publik yang akan meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Kota Bontang dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan upaya intensif untuk memberikan informasi, penjelasan, dan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan standar pelayanan yang berlaku. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara konvensional (flyer, brosur dan banner) ataupun secara digital dengan memanfaatkan media sosial dan website.



Tabel 3.30 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Unsur Pendukung			199.859.384.215		179.032.107.695	100,30	89,58			
			SEKRETARIAT DAERAH			126.535.419.214		115.828.788.988	100,61	91,54			
	Sekretariat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (85,50)	Nilai (persen) 82.709.010.134	88,61	74.532.563.253	103,64	90,11			
	Sekretariat Daerah			Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100	persen	100,00		100,00				
	Sekretariat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	416.596.046	100	413.845.983	100,00	99,34		
	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	23.654.525.513	100	21.062.485.268	100,00	89,04		
	Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	410.606.554	100	408.473.372	100,00	99,48		
	Sekretariat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	10.412.239.358	100	9.092.874.061	100,00	87,33		
	Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	7.386.364.339	100	7.109.667.571	100,00	96,25		
	Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	26.485.944.147	100	23.978.958.016	100,00	90,53		
	Sekretariat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	4.623.843.900	100	4.164.137.463	100,00	90,06		
	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2	orang	993.975.594	2	938.381.924	100,00	94,41		
	Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	30	jenis	3.223.110.950	30	3.091.543.207	100,00	95,92		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	13	kegiatan	511.506.150	13	385.339.826	100,00	75,33			
	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	776	kegiatan	4.590.297.583	776	3.886.856.562	100,00	84,68			
	Sekretariat Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	100	persen	42.439.947.640	100,00	39.950.033.675	100,00	94,13			
	Sekretariat Daerah			Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100	persen		100,00		100,00				
	Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	1	kebijakan	1.562.478.868	1	1.431.898.520	100,00	91,64			
	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5	kebijakan	38.140.608.500	5	35.968.720.216	100,00	94,31			
	Sekretariat Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan prodak hukum yang diharmonisasi	50	kebijakan	1.350.289.722	50	1.218.404.820	100,00	90,23			
	Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	10	mou	1.386.570.550	10	1.331.010.119	100,00	95,99			
	Sekretariat Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	100	persen	1.386.461.440	100,00	1.346.192.060	100,00	97,10			
	Sekretariat Daerah			Persentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	100	persen		100,00		100,00				
	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	3	kebijakan	417.209.381	3	412.855.660	100,00	98,96			
	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16	prioritas	224.471.496	16	208.998.277	100,00	93,11			
	Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	4	layanan	538.782.018	4	528.708.848	100,00	98,13			
	Sekretariat Daerah		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	3	kebijakan	205.998.545	3	195.629.275	100,00	94,97			
			SEKRETARIAT DPRD				73.323.965.001		63.203.318.707	100,00	86,20			
	Sekretariat DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	50.459.722.501	100,00	46.905.280.194	100,00	92,96			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
	Sekretariat DPRD		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	320.472.150	100	309.170.969	100,00	96,47		
	Sekretariat DPRD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	6.056.850.186	100	5.392.813.869	100,00	89,04		
	Sekretariat DPRD		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.953.520.405	100	1.773.351.050	100,00	90,78		
	Sekretariat DPRD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	8.183.346.120	100	7.118.497.109	100,00	86,99		
	Sekretariat DPRD		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	685.407.299	100	658.675.652	100,00	96,10		
	Sekretariat DPRD		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	8.560.588.240	100	7.788.417.593	100,00	90,98		
	Sekretariat DPRD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	2.996.695.526	100	2.799.332.478	100,00	93,41		
	Sekretariat DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan	100	persen	19.000.787.926	100	18.786.355.888	100,00	98,87		
	Sekretariat DPRD		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi	100	persen	2.702.054.649	100	2.278.665.586	100,00	84,33		
	Sekretariat DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran	100	persen	22.864.242.500	100,00	16.298.038.513	100,00	71,28		
	Sekretariat DPRD			Cakupan layanan tugas fungsi legislasi	100	persen		100,00		100,00			
	Sekretariat DPRD			Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan	100	persen		100,00		100,00			
	Sekretariat DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan	100	persen	1.509.087.500	100	255.772.250	100,00	16,95		
	Sekretariat DPRD		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kebijakan yang dibahas	100	persen	604.207.500	100	320.957.617	100,00	53,12		
	Sekretariat DPRD		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	100	persen	245.675.000	100	136.009.360	100,00	55,36		
	Sekretariat DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	persen	4.978.840.000	100	4.135.916.000	100,00	83,07		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
	Sekretariat DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.988.473.250	100	1.550.723.427	100,00	77,99			
	Sekretariat DPRD		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	█	100	persen	2.553.000	100	1.045.000	100,00	40,93			
	Sekretariat DPRD		Pembahasan Kerja Sama Daerah	█	100	persen	25.386.250	100	15.675.000	100,00	61,75			
	Sekretariat DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD	█	100	persen	13.510.020.000	100	9.881.939.859	100,00	73,15			

3.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah Kota Bontang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Bontang pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak tercapai, namun pelaksanaan administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Bontang tahun 2022 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapelitbang menetapkan indikator sasaran dengan perhitungan persentase tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Bontang pada tiap tahunnya. Pada tahun 2022 indikator tersebut ditargetkan dapat mencapai nilai 98,3%, namun hingga akhir tahun 2022 capaian indikator tersebut tercapai sebesar 95,92% atau tingkat realiasi indikator sasaran pembangunan mencapai 97,58%.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pada tahun 2022, Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.14.575.818.044,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.13.420.311.476,- atau 92,27%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 104,70%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.31 urusan perencanaan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Permasalahan

- Dalam proses implementasi Perencanaan ke dalam Penganggaran masih ditemukan Program yang tidak direncanakan sebelumnya dalam RPJMD Kota Bontang tahun



2021-2026. Program tersebut bukan merupakan program yang mendesak ataupun perintah dari Pemerintah Pusat.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pencapaian visi misi Kota Bontang tahun 2021-2026 maka disepakati dan ditegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan harus mengacu pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Maka Program yang tidak terdapat pada RPJMD tidak dapat dianggarkan dalam belanja daerah.



**Tabel 3.31 Urusan Perencanaan
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Urusan PERENCANAAN			14.575.818.044		13.420.311.476	104,70	92,07			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	12.315.728.292	100,00	11.326.480.080	100,00	91,97		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	7.317.078.738	100	6.551.551.121	100,00	89,54		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	504.330.615	100	470.918.704	100,00	93,37		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	2.891.330.369	100	2.797.509.058	100,00	96,76		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	516.342.728	100	484.230.346	100,00	93,78		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	657.912.992	100	622.786.863	100,00	94,66		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	428.732.850	100	399.483.988	100,00	93,18		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	82	persen	1.317.766.202	85,60	1.208.115.316	104,39	91,68		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3	dokumen	692.334.902	3	630.845.281	100,00	91,12		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	3200	data	220.602.700	█	174.994.710	█	79,33		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	9	dokumen	404.828.600	9	402.275.325	100,00	99,37		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	90	persen	942.323.550	98,75	885.716.080	109,72	93,99			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	21	Perangkat Daerah	475.993.850	21	434.471.890	100,00	91,28			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	11	Perangkat Daerah	77.528.650	11	73.587.400	100,00	94,92			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	6	Perangkat Daerah	388.801.050	6	377.656.790	100,00	97,13			

2. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatnya kepatuhan pajak.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, Urusan Keuangan dilaksanakan melalui 5 program yang diimplementasikan dalam 21 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.75.839.383.633,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.47.619.334.245,- atau 62,79%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.32 urusan keuangan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Permasalahan

- Kurangnya koordinasi dan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- Kurangnya kompetensi SDM yang mengelola keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pendapatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- Perlu mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah terkait penertiban/kekayaan aset milik daerah
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
- Terjadi penurunan realisasi PAD di tahun 2022 sebesar 29,01% dimana realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 23,08%. Hal ini disebabkan karena adanya mata obyek pajak yang mengalami penurunan nilai. Adapun penyebab penurunan nilai dari beberapa obyek pajak adalah sebagai berikut.
- Pajak penerangan jalan untuk industry ditiadakan dari Mahkamah Konstitusi
- IMB perubahan regulasi menjadi PBG menurun karena aturan semakin rumit terkait gambar
- Pelayanan Pelabuhan dimana sebelumnya dinaungi oleh Pelindo dialihkan ke Perusda sehingga turun drastis
- Masih banyaknya Piutang Pajak yang belum tertagihkan



- Adanya perubahan regulasi terkait kebijakan pendapatan

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan antara lain:

- Menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah atas pentingnya LKPD sebagai bagian tidak terpisah dalam proses pengelolaan keuangan.
- Melakukan pembinaan, pemantapan dan pemutakhiran dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dibidang pengelolaan keuangan.
- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam penertiban kekayaan/aset milik daerah
- Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak daerah serta melakukan jemput bola ke masyarakat atau wajib pajak
- Melakukan peningkatan sosialisasi melalui media elektronik maupun masyarakat terkait perpajakan
- Dilaksanakan pemutakhiran data wajib pajak
- Membuat inovasi untuk peningkatan potensi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi
- Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan regulasi baru
- Melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi terbaru



Tabel 3.32 Urusan Keuangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			KEUANGAN			75.839.383.633		47.619.334.245	100,00	62,79			
			Badan Pendapatan Daerah			22.643.933.511		20.265.109.776	100,00	89,49			
	Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Bapenda)	100	persen	17.576.540.314	100,00	16.034.915.024	100,00	91,23		
	Badan Pendapatan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	18.145.000	100	18.145.000	100,00	100,00		
	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	12.318.794.284	100	10.989.387.224	100,00	89,21		
	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	132.300.000	100	65.777.226	100,00	49,72		
	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	2.065.651.018	100	1.954.782.158	100,00	94,63		
	Badan Pendapatan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	200.870.572	100	196.939.000	100,00	98,04		
	Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	2.392.882.000	100	2.370.501.339	100,00	99,06		
	Badan Pendapatan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	447.897.440	100	439.383.077	100,00	98,10		
	Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD	100	persen	5.067.393.197	100,00	4.230.194.752	100,00	83,48		
	Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Bulan	12	bulan	5.067.393.197	12	4.230.194.752	100,00	83,48		
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				53.195.450.122		27.354.224.469	100,00	51,42		
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (BPKAD)	100	persen	14.873.412.007	100,00	14.377.713.798	100,00	96,67		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
			DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	16.130.000	100	16.130.000	100,00	100,00			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	8.221.546.944	100	7.911.777.852	100,00	96,23			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	204.020.000	100	202.939.300	100,00	99,47			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Kepegawaian	100	persen	366.864.000	100	364.338.382	100,00	99,31			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	2.452.614.272	100	2.338.123.044	100,00	95,33			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	60.530.625	100	59.909.500	100,00	98,97			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	2.654.196.616	100	2.614.771.243	100,00	98,51			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	897.509.550	100	869.724.477	100,00	96,90			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	100	persen	35.678.200.276	100,00	10.442.690.136	100,00	29,27			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik	31	PD		31		100,00				
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan APBD yang tepat Waktu	10	dokumen	3.623.726.273	10	3.214.492.967	100,00	88,71			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan Keuangan	31	opd	513.438.010	31	469.789.225	100,00	91,50			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	31	opd	4.006.032.834	31	3.973.121.244	100,00	99,18			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	8	kegiatan	27.535.003.159	5	2.785.286.700	62,50	10,12			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	100	persen	2.643.837.839	100,00	2.533.820.535	100,00	95,84			
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang	31	opd	2.643.837.839	31	2.533.820.535	100,00	95,84			

3. Urusan Kepegawaian

Unsur penunjang bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mengarah pada pemenuhan urusan kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang melalui sitem merit.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, Urusan Kepegawaian dilaksanakan melalui 2 program yang diimplementasikan dalam 11 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.13.449.710.487,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.11.991.451.560,- atau 89,16%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 101,75%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.33 urusan kepegawaian.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Masih belum disahkannya beberapa draft Perwali, diantaranya tentang :
 - Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Indikator kinerja individu dalam SKP belum sepenuhnya mengacu pada Indikator Kinerja Individu yang merupakan turunan dari kinerja organisasi;
- Masih terdapat layanan kepegawaian yang belum menggunakan teknologi informatika;
- Data pegawai tidak seluruhnya update, masih terdapat kesalahan data/data tidak sesuai;



- Masih terdapat pegawai yang belum melakukan update data secara lengkap dan benar, sehingga data kepegawaian belum seluruhnya ter update;
- Masih terdapat pelanggaran disiplin oleh ASN;
- Masih diperlukannya peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Intens melakukan koordinasi dan koordinasi ke Bagian Hukum;
- Melakukan sosialisasi dan asistensi mengenai tata cara penyusunan SKP yang mengacu pada indikator kinerja individu dan selaras dengan indikator kinerja organisasi;
- Optimalisasi layanan kepegawaian berbasis penggunaan teknologi informatika;
- Melakukan sosialisasi berkala kepada ASN, untuk update data pegawai pada aplikasi e-takah/My SAPK/SIASN;
- Peningkatan kompetensi dan monev capaian kinerja admin data pegawai pada perangkat daerah secara periodik;
- Melakukan monitoring dan pendekatan secara langsung ke perangkat daerah terkait penegakan disiplin ASN;
- Memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai aturan yang berlaku;
- Membuka jaringan dan memfasilitasi kerjasama Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi dan penyelenggaran pendidikan formal bagi ASN.



**Tabel 3.33 Urusan Kepegawaian
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			KEPEGAWAIAN			13.449.710.487		11.995.891.560	101,75	89,19			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	11.415.523.790	100,00	10.292.790.487	100,00	90,20		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	3.800.000	100	2.600.000	100,00	68,42		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	8.224.348.534	100	7.258.585.982	100,00	88,26		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	702.117.050	100	683.297.390	100,00	97,32		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	973.591.759	100	954.490.414	100,00	98,04		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	758.444.203	100	707.726.220	100,00	93,31		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	321.560.642	100	311.893.254	100,00	96,99		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	431.661.602	100	378.637.227	100,00	87,72		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kinerja Layanan Kepegawaian	100	persen	2.034.186.697	100,00	1.698.661.073	100,00	83,51		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik	95	persen		100,00		105,26			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan		Pengadaan, Pemberhentian dan	Jumlah kegiatan layanan pengadaan,	4	layanan	461.009.197	4	345.429.248	100,00	74,93		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
	Sumber Daya Manusia		Informasi Kepegawaian ASN	pemberhentian dan informasi ASN									
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN	3	layanan	683.525.000	3	644.734.442	100,00	94,32		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	12	orang	439.690.000	12	300.626.409	100,00	68,37		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	2853	orang	449.962.500	2.853	407.870.974	100,00	90,65		

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang bidang pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mengarah pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, Urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui 1 program yang diimplementasikan dalam 2 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.4.098.466.050,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.3.803.038.334,- atau 92,79%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 134,95%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.34 urusan Pendidikan dan pelatihan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Belum terstandarisasinya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal dengan baik, sehingga belum bisa dihitung untuk pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai sebesar 20 JP per tahun.
- Belum adanya dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai.
- Belum termonitornya pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun bagi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan perangkat daerah;
- Belum disahkan draft Perwali Sistem Terpadu Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Menyusun standarisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal.
- Perlu segera dilakukan penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai.
- Melakukan monitoring pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun bagi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan perangkat daerah melalui asistensi pengumpulan data pengembangan kompetensi;



- Membuat juknis terkait coaching/mentoring, sebagai salah satu bagian dari pengembangan kompetensi ASN; (sama dengan upaya pertama)
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi GERBANG JAYA;
- Berkoordinasi secara intens dengan Bagian Hukum terkait draft Perwali Sistem Terpadu Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.



**Tabel 3.34 Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4.098.466.050		3.803.038.334	134,95	92,79			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	20	persen	4.098.466.050	26,99	3.803.038.334	134,95	92,79		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	291	orang	1.954.580.050	634	1.771.590.464	217,87	90,64		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	222	orang	2.143.886.000	168	2.031.447.870	75,68	94,76		

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan mengembangkan inovasi daerah. Pada tahun 2022, Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan mencapai 76,47%, melampaui target yang ditetapkan senilai 75%. Di samping itu, urusan Penelitian juga menangani program inovasi daerah. Pada tahun 2022, persentase keberlanjutan inovasi daerah hanya mencapai 86,24%, di bawah target yang ingin dicapai senilai 90,6%.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui 1 program yang diimplementasikan dalam 2 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.1.291.512.100,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.1.207.170.092,- atau 93,47%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 98,57%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.35 urusan penelitian dan pengembangan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Permasalahan

- Sebagian hasil kelitbangan belum ditindaklanjuti karena belum dianggap prioritas pada 5 tahun terakhir sehingga belum dianggarkan untuk pelaksanaannya. Selain itu, beberapa kajian Feasibility Study juga tidak ditindaklanjuti karena adanya perubahan kebijakan sehingga hasil FS tidak relevan lagi dengan kebutuhan pembangunan.
- Jejaring inovasi daerah untuk replikasi internal belum berjalan optimal sehingga keberlangsungan inovasi tidak terjaga dan lebih fokus untuk membuat yang baru dan meninggalkan yang ada sebelumnya.
- Untuk pelaporan inovasi dalam kegiatan IGA, bukti inovasi yang dimiliki inovator tidak rapi dan tidak semua tersedia.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Direncanakan pembentukan forum kelitbangan yang dapat membantu penyusunan perencanaan kajian dan perencanaan tindak lanjut kajian tersebut. Forum ini juga akan ditunjang dengan aplikasi kelitbangan yang digunakan untuk proses pengawasan kajian dan tindak lanjutnya.



- Dilakukan koordinasi lebih intens tingkat kota dan koordinasi dengan TAPD untuk menjaga keberlangsungan inovasi
- Telah dilaksanakan bimtek dengan mengingatkan kembali perlunya penyusunan bukti-bukti dokumen inovasi yang akan diunggah ke aplikasi IGA.
- Berdasarkan kajian kelembagaan yang telah dilaksanakan, perlu adanya pembentukan Bidang Penelitian agar dapat mengampu pelaksanaan tugas penelitian dan inovasi.



**Tabel 3.35 Urusan Penelitian
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.291.512.100		1.207.170.092	98,57	93,47			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	75	persen	1.291.512.100	76,47	1.207.170.092	101,96	93,47		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			Persentase keberlanjutan inovasi daerah	90,6	persen		86,24		95,19			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	4	kelitbangan	869.613.500	4	803.042.510	100,00	92,34		
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	150	daerah	421.898.600	109	404.127.582	72,67	95,79	Hasil verifikasi dari usulan inovasi perangkat daerah menemukan beberapa usulan tidak termasuk kategori inovasi	

3.1.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjalankan unsur pengawasan urusan pemerintahan adalah Inspektorat dengan tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting dalam manajemen birokrasi. Peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Hal ini dilakukan melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP adalah melakukan pengawasan intern atau audit intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Bontang dalam rangka meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan yang selaras dengan salah satu misi Kota Bontang yaitu " Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan" dengan Tujuan Kota Bontang yaitu " Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab" melalui Sasaran Kota Bontang yaitu " Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif", melaksanakan terobosan dengan mengutamakan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan,

pendampingan dan asistensi serta program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

1) **Capaian pelaksanaan program dan kegiatan**

Pada tahun 2022, Urusan Pengawasan dilaksanakan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.12.924.826.992,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.11.874.091.087,- atau 91,87%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 124,18%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.36 unsur pengawasan.

2) **Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah**

a. **Permasalahan**

- Kegiatan pengawasan intern yang ditetapkan dalam Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai jadwal;
- Masih terdapat kesenjangan kompetensi (*competency gap*) antara ruang lingkup kegiatan pengawasan intern terhadap ketersediaan jumlah dan keahlian SDM pengawasan serta masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung tugas pengawasan. Hal ini menyulitkan dalam penyusunan *teammate* yang ideal sesuai dengan ruang lingkup pengawasan intern yang akan dilaksanakan.

b. **Upaya Mengatasi Masalah**

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan salah satunya:

- Inspektorat Daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pemantauan atas penyelesaian kegiatan audit/pemeriksaan berkala yang telah ditetapkan dalam RPT;
- Inspektorat Daerah telah menyusun Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) serta secara terjadwal melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (*inhouse training*) untuk menambah kompetensi APIP pada beberapa kegiatan pengawasan intern. Selain itu, dalam rangka penguatan SDM APIP, terdapat penambahan SDM yang berasal dari alokasi STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) sebanyak 20 pegawai dan Pengadaan Umum CPNS sebanyak 2 pegawai. Adapun upaya ke depan untuk pemenuhan kecukupan anggaran



Pengawasan diantaranya pemenuhan Diklat APIP serta Sarana dan Prasarana, maka melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran Pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total Belanja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan).



**Tabel 3.36 Urusan Pengawasan
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			INSPEKTORAT DAERAH			12.924.826.992		11.874.091.087	124,18	91,87			
	Inspektorat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	11.316.844.242	100,00	10.302.589.552	100,00	91,04		
	Inspektorat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	9.587.215.213	100	8.596.373.745	100,00	89,66		
	Inspektorat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	327.506.000	100	318.272.119	100,00	97,18		
	Inspektorat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	869.601.837	100	862.949.317	100,00	99,23		
	Inspektorat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	55.680.000	100	55.625.000	100,00	99,90		
	Inspektorat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	171.475.192	100	166.669.981	100,00	97,20		
	Inspektorat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	305.366.000	100	302.699.390	100,00	99,13		
	Inspektorat Daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	70	persen	1.086.779.250	100,00	1.078.632.397	142,86	99,25		
	Inspektorat Daerah		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah	220	obinas	987.839.250	406	982.538.797	184,55	99,46		
	Inspektorat Daerah		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti	5	kasus	98.940.000	5	96.093.600	100,00	97,12		
	Inspektorat Daerah		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	100	persen	521.203.500	100,00	492.869.138	100,00	94,56		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan / Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
	Inspektorat Daerah			Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	65	persen	100,00		153,85				
	Inspektorat Daerah		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1	kebijakan	50.843.500	7	44.837.500	700,00	88,19		
	Inspektorat Daerah		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6	kegiatan	470.360.000	6	448.031.638	100,00	95,25		

3.1.6 Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota dan kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan. Serta berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, untuk unsur kewilayahan ini meliputi kecamatan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, Unsur Kewilayahan dilaksanakan melalui 15 program yang diimplementasikan dalam 43 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.130.693.333.618,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.126.330.425.661,- atau 96,66%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100,58%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.37 unsur kewilayahan.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana perkantoran
- Perlunya peningkatan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
- Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di kecamatan dan kelurahan

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Mengembangkan metode/cara inventarisasi sarana prasarana perkantoran agar lebih optimal
- Mendorong SDM agar meningkatkan kompetensi dan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana
- Menjalani komunikasi yang intensif antar personil di kecamatan dan kelurahan agar dapat bekerjasama dengan baik



**Tabel 3.37 Unsur Kewilayahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Kewilayahan**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			BIDANG KEWILAYAHAN			130.693.333.618		126.330.424.661	100,58	96,66			
			KECAMATAN BONTANG UTARA			52.501.498.938		51.343.617.083	100,00	97,79			
	Kecamatan Bontang Utara		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	25.462.397.704	100,00	24.714.503.103	100,00	97,06		
	Kecamatan Bontang Utara		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	18.957.533.474	100	18.278.842.816	100,00	96,42		
	Kecamatan Bontang Utara		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	158.265.996	100	153.901.927	100,00	97,24		
	Kecamatan Bontang Utara		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.162.034.124	100	1.139.629.422	100,00	98,07		
	Kecamatan Bontang Utara		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	179.065.332	100	174.397.000	100,00	97,39		
	Kecamatan Bontang Utara		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	4.726.405.567	100	4.703.224.780	100,00	99,51		
	Kecamatan Bontang Utara		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	279.093.211	100	264.507.158	100,00	94,77		
	Kecamatan Bontang Utara		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95	persen	6.585.105.886	95,00	6.399.292.727	100,00	97,18		
	Kecamatan Bontang Utara			Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95	persen		95,00		100,00			
	Kecamatan Bontang Utara		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	3	koordinasi	482.714.770	3	472.895.427	100,00	97,97		
	Kecamatan Bontang Utara		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah Urusan	7	urusan	6.095.491.116	7	5.919.497.300	100,00	97,11		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
	Kecamatan Bontang Utara		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	6	kali	6.900.000	6	6.900.000	100,00	100,00		
	Kecamatan Bontang Utara		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	persen	18.287.715.421	100,00	18.083.141.121	100,00	98,88		
	Kecamatan Bontang Utara		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12	unsur	7.547.595.369	12	7.474.083.848	100,00	99,03		
	Kecamatan Bontang Utara		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	lembaga	10.740.120.052	3	10.609.057.273	100,00	98,78		
	Kecamatan Bontang Utara		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100	persen	1.578.931.609	100,00	1.561.020.014	100,00	98,87		
	Kecamatan Bontang Utara		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3	lembaga	1.424.611.609	3	1.409.031.990	100,00	98,91		
	Kecamatan Bontang Utara		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1	kegiatan	154.320.000	1	151.988.024	100,00	98,49		
	Kecamatan Bontang Utara		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100	persen	587.348.318	100,00	585.660.118	100,00	99,71		
	Kecamatan Bontang Utara		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2	kegiatan	587.348.318	2	585.660.118	100,00	99,71		
	Kecamatan Bontang Selatan		KECAMATAN BONTANG SELATAN				48.014.181.085		45.876.918.090	101,75	95,55		
	Kecamatan Bontang Selatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	25.340.519.149	100,00	24.075.119.222	100,00	95,01		
	Kecamatan Bontang Selatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	3.396.592	100	2.769.900	100,00	81,55		
	Kecamatan Bontang Selatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan	100	persen	17.963.364.513	100	17.027.660.292	100,00	94,79		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
				laporan keuangan perangkat daerah									
	Kecamatan Bontang Selatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	215.000.000	100	205.000.000	100,00	95,35		
	Kecamatan Bontang Selatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.320.086.660	100	1.309.775.951	100,00	99,22		
	Kecamatan Bontang Selatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan barang pengadaan barang milik daerah	100	persen	512.805.711	100	510.705.619	100,00	99,59		
	Kecamatan Bontang Selatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	4.513.519.422	100	4.249.394.219	100,00	94,15		
	Kecamatan Bontang Selatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	812.346.251	100	769.813.241	100,00	94,76		
	Kecamatan Bontang Selatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95	persen	7.438.223.155	100,00	7.214.494.237	105,26	96,99		
	Kecamatan Bontang Selatan			Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95	persen		100,00		105,26			
	Kecamatan Bontang Selatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	4	subjek	537.617.185	4	527.120.850	100,00	98,05		
	Kecamatan Bontang Selatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	5	urusan	6.891.613.470	5	6.678.380.887	100,00	96,91		
	Kecamatan Bontang Selatan		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah objek koordinasi	6	objek	8.992.500	6	8.992.500	100,00	100,00		
	Kecamatan Bontang Selatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	persen	14.800.977.703	100,00	14.171.564.811	100,00	95,75		
	Kecamatan Bontang Selatan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12	unsur	4.364.211.870	12	4.284.366.215	100,00	98,17		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
	Kecamatan Bontang Selatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3	lembaga	10.436.765.833	3	9.887.198.596	100,00	94,73		
	Kecamatan Bontang Selatan		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan)	100	persen	181.097.002	100,00	179.881.820	100,00	99,33		
	Kecamatan Bontang Selatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1	kegiatan	144.000.000	1	143.000.000	100,00	99,31		
	Kecamatan Bontang Selatan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	2	perda/pe rkada	37.097.002	2	36.881.820	100,00	99,42		
	Kecamatan Bontang Selatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	persen	253.364.076	100,00	235.858.000	100,00	93,09		
	Kecamatan Bontang Selatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	kegiatan	253.364.076	2	235.858.000	100,00	93,09		
	Kecamatan Bontang Barat		KECAMATAN BONTANG BARAT				30.177.653.595		29.109.889.488	100,00	96,46		
	Kecamatan Bontang Barat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	17.050.664.373	100,00	16.456.327.151	100,00	96,51		
	Kecamatan Bontang Barat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	3.396.200	100	3.387.346	100,00	99,74		
	Kecamatan Bontang Barat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	10.562.138.398	100	10.141.117.694	100,00	96,01		
	Kecamatan Bontang Barat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	495.406.468	100	477.707.621	100,00	96,43		
	Kecamatan Bontang Barat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.111.577.190	100	1.085.923.378	100,00	97,69		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
	Kecamatan Bontang Barat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	110.671.092	100	105.981.882	100,00	95,76			
	Kecamatan Bontang Barat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	4.142.977.244	100	4.022.182.864	100,00	97,08			
	Kecamatan Bontang Barat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	624.497.781	100	620.026.366	100,00	99,28			
	Kecamatan Bontang Barat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95	persen	3.809.732.516	95,00	3.634.405.106	100,00	95,40			
	Kecamatan Bontang Barat			Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95	persen		95,00		100,00	#DIV/0!			
	Kecamatan Bontang Barat		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2	kegiatan	487.628.370	2	472.847.732	100,00	96,97			
	Kecamatan Bontang Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3	kegiatan	3.279.631.646	3	3.119.084.874	100,00	95,10			
	Kecamatan Bontang Barat		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	kegiatan	42.472.500	1	42.472.500	100,00	100,00			
	Kecamatan Bontang Barat		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	persen	9.039.891.821	100,00	8.755.355.559	100,00	96,85			
	Kecamatan Bontang Barat		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	kegiatan	3.309.736.377	3	3.212.067.057	100,00	97,05			
	Kecamatan Bontang Barat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	kegiatan	5.730.155.444	2	5.543.288.502	100,00	96,74			
	Kecamatan Bontang Barat		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat)	100	persen	136.662.235	100,00	135.951.650	100,00	99,48			



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	
	Kecamatan Bontang Barat		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	kegiatan	136.662.235	1	135.951.650	100,00	99,48			
	Kecamatan Bontang Barat		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat)	100	persen	140.702.650	100,00	127.850.022	100,00	90,87			
	Kecamatan Bontang Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2	kegiatan	140.702.650	2	127.850.022	100,00	90,87			

3.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Urusan kesatuan bangsa dan politik diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan pada meningkatnya kondusifitas wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bakesbangpol menetapkan sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan masyarakat, dengan 2 indikator sasaran yaitu persentase penyelesaian konflik dan persentase cakupan pendidikan politik masyarakat yang melampaui target tahun 2022 dengan nilai 57,1% dan 92%.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022, Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.11.486.673.400,-. Berdasarkan laporan realisasi keuangan hingga akhir desember 2022 realisasi sebesar Rp.10.865.649.003,- atau 94,59%, serta rata-rata tingkat realisasi kinerja urusan sebesar 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.38 unsur pemerintahan umum.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- Perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran kas mengakibatkan beberapa aktivitas yang telah direncanakan harus dibatalkan karena waktu yang tepat untuk pelaksanaan telah lewat.
- Perubahan kebijakan yang tiba-tiba terkait kegiatan pembinaan Paskibraka menyebabkan ketidakcocokan pada penganggaran dan pembagian tugas untuk kegiatan tersebut.

b. Upaya Mengatasi Masalah

- Anggaran yang telah dianggarkan untuk aktivitas yang telah dibatalkan dialihkan untuk pelaksanaan aktivitas lain yang turut mendukung capaian target kegiatan.
- Bakesbangpol segera melakukan koordinasi dengan TAPD untuk pembahasan anggaran kegiatan Paskibraka dan koordinasi dengan pihak yang terkait dan berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Paskibraka.



**Tabel 3.38 Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik
Capaian Program dan Kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum**

No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan /Program/Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10.881.948.507		10.403.627.009	100,00	95,60			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	7.723.113.997	100,00	7.453.066.953	100,00	96,50		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	persen	23.081.400	100	20.627.000	100,00	89,37		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100	persen	4.595.801.103	100	4.471.332.635	100,00	97,29		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	100	persen	248.390.767	100	202.178.400	100,00	81,40		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100	persen	1.617.958.127	100	1.579.507.893	100,00	97,62		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100	persen	265.690.000	100	265.558.000	100,00	99,95		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100	persen	691.435.600	100	652.074.241	100,00	94,31		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	persen	280.757.000	100	261.788.784	100,00	93,24		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	36,00	persen	1.322.817.057	36,00	1.272.688.449	100,00	96,21		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah pelaksanaan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	7	kebijakan	1.322.817.057	7	1.272.688.449	100,00	96,21		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	61	persen	910.637.515	61,00	826.501.400	100,00	90,76		



No	Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran APBD Kota Bontang (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Urusan / Program/ Kegiatan (%)		Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11
			ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2	kebijakan	910.637.515	2	826.501.400	100,00	90,76		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	50	persen	366.912.299	50,00	329.582.579	100,00	89,83		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2	kebijakan	366.912.299	2	329.582.579	100,00	89,83		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	73	persen	604.724.893	73,00	462.021.994	100,00	76,40		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4	kebijakan	604.724.893	4	462.021.994	100,00	76,40		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik	100	persen	558.467.639	100,00	521.787.628	100,00	93,43		
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5	kebijakan	558.467.639	5	521.787.628	100,00	93,43		

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.39
Kebijakan Strategis Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Dalam rangka mendukung pelaku ekonomi yang membutuhkan dana sehingga roda perekonomian bergerak dan mendorong pembangunan ekonomi
3	Penanggulangan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Menurunkan potensi terjadinya hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga seseorang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya baik jasmani dan rohani secara memadai dan wajar.
4	Pengembangan keolahragaan sebagai bagian dalam rangka meningkatkan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan	Meningkatkan Kesehatan, kebugaran, prestasi dan menanamkan nilai-nilai



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	kualitas hidup manusia baik jasmani, rohani dan sosial.	Keolahragaan	moral ahlak, sportivitas, disiplin serta memperererta persaudaraan dan kesatuan.
5	Perubahan APBD tahun anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022	Perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang di jabarkan dalam kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang
6	Pelayanan dan perlindungan sosial	Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rantang Kasih	Program rantang kasih adalah program pemberian paket makanan siap santap kepada lanjut usia terlantar, miskin dan tanpa keluarga.
7	Peningkatan pendapatan asli daerah	Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kota Bontang serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
8	RKPD Kota Bontang Tahun 2022	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	1) Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan umum anggaran



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
			pendapatan dan belanja daerah (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)
9	Mendukung program prioritas wali kota dalam bidang pendidikan	Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Perlengkapan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar	Pengadaan perlengkapan sekolah dengan memberdayakan pelaku usaha mikro di Kota Bontang
10	Tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pengoptimalan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
11	Membudayakan gemar membaca	Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat
12	Informasi publik	Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan kerja sama penyebaran informasi publik melalui media massa di lingkungan pemerintah	Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers maka mempermudah penyebaran informasi publik kepada masyarakat



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		daerah	

3.3 Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2022 terdapat beberapa catatan strategis berupa rekomendasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat catatan dan rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.40
Tindak lanjut rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Pemerintah Kota Bontang agar menyampaikan Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2021 kepada Tim Penyusun LKPJ Walikota terkait penyajian laporan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota di Tahun 2021, khususnya pada catatan Strategis DPRD di Bidang Perencanaan (pada halaman 19).	Telah diperbaiki dan disampaikan hasil dokumen LKPJ tahun 2021 sesuai dengan rekomendasi DPRD	Memperbaiki dan melengkapi muatan dokumen LKPJ tahu 2021
2	Pemerintah Kota Bontang agar lebih serius dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan melaksanakan optimalisasi pada sumber-sumber pendapatan potensial daerah dan segera menyelesaikan penyusunan peraturan daerah tentang penggabungan antara perda pajak dan retribusi sesuai amanat undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi dalam Peningkatan Kapasitas Fiskal di Tahun 2022 yaitu <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pada sektor wisata dan UMKM. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD) Pemutakhiran Data wajib pajak secara bertahap Optimalisasi kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan Validasi Data. Optimalisasi peningkatan retribusi melalui pemanfaatan aset daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitasi pajak daerah dan kompetensi SDM. Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2022 melalui Bapenda telah Menyusun draft Naskah Penjelasan dan Raperda Pajak dan Retribusi. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Bontang melakukan kajian tarif retribusi di tahun 2023 Masih dalam pembahasan tingkat eksekutif dan menunggu terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3	Pemerintah Kota Bontang agar lebih cermat dalam menentukan target pendapatan di tahun 2023. Dalam penentuan target pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Bontang tahun 2021 hanya memakai angka minimal, sementara masih banyak potensi pendapatan yang bisa dikembangkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kota Bontang di Tahun 2022 telah menentukan target pendapatan berdasarkan Pertumbuhan ekonomi (4,2 %), Inflasi (2,7%) dan Komitmen Pemerintah Daerah Kota Bontang (2%).2. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan target pendapatan pajak dan retribusi daerah lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya	Meningkatkan potensi-potensi pendapatan asli daerah dengan melakukan evaluasi penetapan tarif retribusi daerah berdasarkan potensi.
4	Perusda AUJ, BME dan BPR hingga tahun 2022 belum memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Kota Bontang. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang diminta memaksimalkan kinerja BUMD tersebut agar memberikan kontribusi PAD pada tahun berikutnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada tahun 2022 perusda PT. BME memberikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp.1.155.631.993 dengan pembagian kepada Pemerintah Kota Bontang sebesar RP.896.575.673,- selebihnya dibagikan kepada pemegang saham lainnya.2. Mengoptimalkan pembinaan BUMD sesuai Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembinaan BUMD3. Sebagai upaya peningkatan status PT. BPR Bontang sejahtera dan PT. LBB pada tahun 2023 telah dianggarkan kegiatan:<ol style="list-style-type: none">a. penyusunan naskah akademis peningkatan status PT. BPR Bontang sejahtera dan PT. LBBb. penyusunan naskah akademis perubahan Perda PDAM, AUJ dan BME	Meningkatkan produktifitas Perusda dan kontribusinya terhadap APBD
5	Pemerintah Kota Bontang agar segera memanfaatkan dan memfungsikan Rumah Sakit Tipe D sesuai dengan tujuan pembangunan Rumah Sakit tersebut.	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah dilakukan kajian akademis ulang dengan UNAIR dengan rekomendasi tidak layak dioperasikan menjadi RS type D. Namun demikian untuk dapat dioperasikan sebagai RS type D diperlukan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana sebagai berikut: penyediaan lahan parkir, pemenuhan rekayasa lalu lintas, penempatan IGD harus dilantai dasar dan pemenuhan sapras lainnya termasuk SDM	Melakukan tahapan ulang sesuai dengan ketentuan pendirian RS sehingga gedung RS type D dapat difungsikan sesuai perencanaan awal



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sesuai dengan Legal Opini Kejaksaan yang menyatakan bahwa RSUD Type D harus difungsikan sebagaimana perencanaan awal 3. Telah dibuat perencanaan pembebasan lahan dan pada tahun 2023 dianggarkan appraisal untuk pembebasan lahan 4. Rencana APBD perubahan 2023 akan diajukan anggaran pembebasan lahan bila anggaran memungkinkan 	
6	<p>Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar melakukan perbaikan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan di Kawasan Industri dan Kawasan Perkantoran di Bontang Lestari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 dilaksanakan pemeliharaan jalan urip sumarjo 2. Rekonstruksi jalan soekarno hatta (2022) 3. Rekonstruksi jalan soekarno hatta (bankeu 2023) 8,25 milyar 4. Bankeu rekonstruksi peningkatan jalan 2023 (target 2,4 km dengan anggaran 30 m) 	<p>Memastikan jalan dikawasan Industri dan Kawasan Perkantoran di Bontang Lestari diperbaiki dan meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, sehingga layanan transportasi tidak terhambat dan aman bagi pengguna jalan</p>
7	<p>Pemerintah Kota Bontang agar mengurangi pemakaian air bawah tanah (deep well) dan menjajaki kerjasama penggunaan air permukaan dari Bendungan Marangkayu Kutai Kartanegara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan pembangunan SPAM regional KUKAR-BONTANG (bendungan Marangkayu dan SPAM regional KUTIM-BONTANG (ex tambang indominco sebagai alternatif untuk penyediaan air minum di Kota Bontang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyelesaikan penyusunan dokumen FS, DED, AMDAL dan LARAP 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan dokumen FS dan DED SPAM regional KUTIM-BONTANG
8	<p>Pemerintah Kota Bontang agar segera merealisasikan kegiatan fisik yang telah direncanakan, dan melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 telah dilakukan rapat percepatan pelaksanaan pelelangan 2. Melaksanakan monitoring secara berkala melalui forum radalok terhadap pelaksanaan kegiatan fisik terkait 	<p>Meningkatkan realisasi kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dan menindaklanjuti penyelesaian kegiatan pembangunan yang belum tuntas dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya.</p>



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
9	Pemerintah Kota Bontang agar segera melaksanakan program pemberian perlengkapan sekolah gratis yang hingga saat ini belum direalisasikan.	Telah dilaksanakan pemberian perlengkapan sekolah gratis (seragam, tas dan Sepatu) pada tahun 2022 untuk siswa kelas 1 sd negeri dan swasta dan kelas 7 smp smp negeri dan swasta dengan jumlah penerima sebagai berikut: 1. SD 3456 siswa 2. SMP 2954 siswa	1. Membantu orang tua siswa yang anaknya baru beranjak ke jenjang sd dan smp untuk memenuhi perlengkapan sekolahnya. 2. Realisasi program pemberian perlengkapan sekolah gratis
10	Pemerintah Kota Bontang melalui Perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, agar segera menyelesaikan proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah, supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.	Hingga tahun 2022 telah dilaksanakan sertifikasi asset tanah milik pemerintah daerah sebanyak 104 bidang dari 200 bidang tanah atau telah terealisasi sebesar 52%	Seluruh tanah pemerintah Kota Bontang tersertifikasi (terdaftar)
11	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan agar segera menyelesaikan Peraturan Walikota terkait Prasarana dan Sarana Utilitas Umum.	Terkait dengan perwali tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum sebagai petunjuk Teknis atas perda tentang penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas, DPKPP sudah membuat Draft Perwali.	Perda tentang penyerahan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum sudah selesai dibahas antara tim asistensi DPRD dengan Tim asistensi Pemerintah Kota Bontang, namun belum diparipurnakan dan diluncurkan tahun 2023 setelah perda dimaksud di tetapkan akan ditindaklanjuti dengan Penerbitan Perwali.
12	Pemerintah Kota Bontang agar memfasilitasi prasarana dan sarana di kawasan buffer zone di RT 07 Berbas Pantai.	kegiatan peningkatan jalan di RT.07 telah dianggarkan didalam APBD tahun 2023.	Agar jalan tidak becek dan dapat dilalui kendaraan karena kondisi saat ini jalan belum dicor
13	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu melaksanakan pendataan penerima bantuan sosial yang tepat dan akurat supaya program pemberdayaan sosial berjalan dengan maksimal.	1. Pada tahun 2022 dilaksanakan verifikasi validasi data penerima program bantuan social sebanyak 39126 jiwa dari data tersebut terdapat penurunan/tidak layak menerima program sebanyak 574 jiwa	Untuk tepat sasaran penerima program



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		2. Telah melakukan verifikasi validasi DTKS dengan lokus kecamatan botang barat sebanyak 2328 jiwa dari data tersebut sebanyak 1504 jiwa telah selesai. Yang masih dalam tahap konfirmasi: <ol style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan 539 Pidah 267 Meninggal 12 Tidak mau didata 6 jiwa 	
14	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi agar meningkatkan pengelolaan E-Gov dan melanjutkan pemasangan WIFI gratis di titik area publik, serta melakukan pengaturan WIFI gratis pada penggunaan konten tertentu yang tidak mengandung edukasi pada anak didik.	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2022 pelaksanaan program wifi gratis telah memasang 450 titik, ditahun 2023 ditambah sebanyak 115 titik sehingga saat ini telah terpasang 565 titik melakukan filtering konten negative melalui DNS pihak ketiga yang disediakan oleh openDNS 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jangkauan layanan program wifi gratis pemblokiran konten negative seperti situs judi, situs dewasa, situs dengan malware/program yang mencurigakan yang dapat mencuri informasi pribadi dari pengguna perangkat
15	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informasi perlu membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengaturan media yang bekerja sama dengan pemerintah.	Telah mengeluarkan perwali nomor 23 tahun 2022 tentang pedopmana pelaksanaan Kerjasama penyebarluasan informasi public melalui media masa dilingkungan pemerintah kota bontang	Untuk mendapatkan standar harga terkait pelaksanaan Kerjasama dengan media masa dalam penyebarluasn informasi dilingkungan pemerintah kota bontang.
16	Pemerintah Kota Bontang agar membuat kajian tentang pemanfaatan Tempat Pelelangan ikan dan Balai Benih ikan sebagai tempat pariwisata untuk memaksimalkan produktivitas dan peningkatan perekonomian sebagai sumber pendapatan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan dilakukan peyusunan kajian pengembangan BBI Penyusunann kajian pemanfaatan TPI untuk peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah akan dilakukan pada tahun anggaran 2023. 	Mengembangkan fungsi BBI dan TPI untuk dijadikan objek pariwisata
17	Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Lingkungan Hidup agar melaksanakan pengawasan yang intensif dan upaya tindak lanjut terhadap hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2021 terdapat 1 perusahaan dengan peringkat proper berwarna merah dari tahun sebelumnya sebanyak 3 perusahaan. Pada tahun 2022 telah 	Agar perusahaan tersebut meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat memperoleh peringkat



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	di daerah (properda) yang masih berwarna merah.	melakukan pembinaan terhadap Perusahaan yang mendapat peringkat kinerja proper berwarna merah (nilai berkisar 21-40) sejumlah 1 perusahaan yakni PT. SAMATOR GAS INDUSTRI	kinerja biru (nilai berkisar 41-70)
18	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan agar meningkatkan pendapatan melalui retribusi parkir, dan segera membangun gedung uji KIR.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 dinas perhubungan telah melakukan pengelolaan 15 titik parkir, selanjutnya pada tahun 2023 ada penambahan 2 titik parkir yakni di jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Hasanuddin. 2. Telah dilaksanakan pembangunan Gedung Uji KIR oleh Dinas PUPR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan 2. Peningkatan PAD dari sumber retribusi parkir 3. Operasionalisasi pelayanan uji KIR di Bontang Lestari akan disiapkan dalam perubahan APBD tahun 2023
19	Pemerintah Kota Bontang agar membuat kajian tentang pembentukan UPT Penerangan dan UPT Parkir dalam rangka pelayanan dan peningkatan PAD.	Akan dilakukan koordinasi dengan bagian organisasi untuk persyaratan pembentukan UPT penerangan jalan dan UPT parkir	Untuk mendapatkan rekomendasi pembentukan UPT penerangan jalan dan UPT parkir
20	Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan kepada masyarakat yang secara tidak langsung telah membayar pajak penerangan jalan sebesar kurang lebih 33 M/tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah meningkatkan pemeliharaan fasilitas Penerangan Jalan lingkungan Tahun Anggaran 2022 dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Bontang dengan jumlah tiang lampu 982 titik 2. Dinas Perhubungan melakukan penambahan penerangan lampu jalan sebanyak 65 titik tersebar di jalan-jalan utama sesuai dengan kewenangannya 	Meningkatkan pelayanan penerangan jalan baik pada jalan-jalan utama maupun jalan kawasan permukiman
21	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan agar mengevaluasi kembali penggunaan jalan umum dan pelabuhan untuk angkutan barang terutama alur angkutan bahan peledak oleh PT. KNI.	Akan melakukan evaluasi penggunaan jalan umum dan pelabuhan untuk angkutan barang terutama alur angkutan bahan peledak oleh PT. KNI tersebut dengan melibatkan tim dan forum LLAJ	Rekomendasi atau kesepakatan tentang kebijakan penggunaan jalan umum.
22	Pemerintah Kota Bontang melalui Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan	1. Pada tahun 2022 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp. 140.000.000 ke kas daerah yang merupakan	1. Mengupayakan pengembalian dana bergulir yang disalurkan terakhir



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Perindustrian agar segera menyelesaikan pengembalian dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat, dan meningkatkan penataan sarana distribusi perdagangan khususnya di Pasar Taman Rawa Indah dan Pasar Citra Mas Loktuan.	<p>hasil penagihan terhadap 157 orang dengan nilai tunggakan 1,8 Milyar.</p> <p>2. Adapun Program swkelola sebesar 200 juta (macet), terdiri dari 18 orang belum dapat ditagih kembali</p> <p>3. Permasalahan tidak adanya jaminan pinjaman, sehingga kesulitan dalam proses penagihan, banyak terjadi perubahan alamat peminjam.</p> <p>4. Pada tahun 2022 pasar taman citra loktuan dilakukan kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan atap pasar b. Pembuatan kanopi c. Pemasangan railing tangga d. Pembangunan Akses jalan keluar e. Pembuatan taman pasar <p>5. Pada pasar rawa indah telah dilakukan perbaikan lantai keramik</p>	<p>pada tahun 2008</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana pasar</p>
23	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar membuat masterplan tentang investasi di Kawasan industri dan segera menyelesaikan peraturan walikota tentang percepatan pelaksanaan investasi dan perijinan.	<p>1. Akan Mengusulkan anggaran penyusunan Masterplan Investasi di Kawasan Industri pada tahun anggaran 2024</p> <p>2. Akan Mengajukan usulan draft peraturan Wali Kota Bontang tentang pelaksanaan investasi dan Perizinan di tahun 2024 setelah disusun Peraturan Daerah tentang Insentif Kemudahan Berusaha di Kota Bontang</p>	<p>1. Penyediaan Data Potensi Investasi di Kawasan industri Bontang untuk dipromosikan kepada Investor.</p> <p>2. Ketertiban dalam pelaksanaan investasi dan Perizinan di Kota Bontang</p>
24	Pemerintah Kota Bontang agar membuat Peraturan Walikota tentang kewajiban pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi secara berkala.	Akan Mengajukan usulan draft peraturan Wali Kota Bontang tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di tahun 2024	Ketertiban dan ketaatan dalam realisasi investasi di Kota Bontang
25	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata agar meningkatkan pendapatan	Tahun 2022 telah diajukan surat permohonan penyusunan kajian akademis untuk retribusi sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata dan	Meningkatkan potensi retribusi dari pemanfaatan aset olah raga dan objek wisata



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	melalui retribusi daerah sektor pariwisata.	akan dilaksanakan pada tahun 2023	
26	Pemerintah Kota Bontang agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Pansus Banjir terhadap penanganan banjir di Kota Bontang.	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tim pansus banjir sebagai berikut: 1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 2. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 3. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 5. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 6. Pembangunan Pintu Air 7. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai 8. Normalisasi/Restorasi Sungai	1. Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan yang Saling Terintegrasi (Primer, Sekunder dan Tersier) untuk Mengalirkan Air dan Mengurangi Genangan Air 2. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan yang Saling Terintegrasi (Primer, Sekunder dan Tersier) untuk Mengalirkan Air dan Mengurangi Genangan Air 3. Merehab Sebagian dan/atau Seluruh Konstruksi Saluran Drainase Existing Berdasarkan Kelayakan, Umur Layan dan Pertimbangan Lainnya 4. Menyusun Rencana Induk Penanggulangan Banjir, Sistem Drainase Perkotaan dan Perencanaan Teknis sebagai Perdoman, Referensi untuk Program Penanggulangan Banjir Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang 5. Menyusun Dokumen Teknis dan Perencanaan Teknis Pendukung yang Diperlukan pada saat Pra dan Pasca Konstruksi Bangunan Keairan 6. Bangunan Penunjang untuk Mengatur dan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			Mengatur Debit Air pada Tiap Alirannya 7. Sebagai Tanggul/Barikade Akibat Luapan Air Sungai, Mengurangi Kawasan Banjir di Sekitar Bantaran Sungai dan Sekitarnya Akibat Luapan Sungai, Mengurangi Tebing Sungai yang Berpotensi Mengalami Longsor dan Kerusakan 8. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Saluran Drainase secara Berkala serta Mengembalikan Kapasitas Tampung Sungai dan Saluran Darinase
27	Pemerintah Kota Bontang agar menganggarkan dan menindaklanjuti upaya hukum terkait status wilayah Kampung Sidrap.	Pada tahun 2023 telah dianggarkan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk tindaklanjuti upaya hukum di tingkat MK berupa <i>Judicial Review</i>	Untuk menegaskan batas wilayah Kota Bontang yang terkait dengan Kampung Sidrap agar permasalahan tapal batas mendapatkan kepastian hukum
28	Pemerintah Kota Bontang agar dapat merencanakan dan menganggarkan program prioritas pembangunan daerah disemua perangkat daerah dan mengurangi program yang bersifat seremonial.	Prioritas pembangunan pada tahun 2022 telah disusun dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah dan target kinerja pembangunan yang harus dicapai di tahun 2022. Hal ini juga dilaksanakan dengan melakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang	Meningkatkan pemahaman belanja pembangunan sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
29	Pemerintah Kota Bontang agar meninjau kembali tentang penyertaan modal Bankaltimtara yang dinilai setiap tahun mengalami penurunan deviden dan belum memberikan kontribusi PAD yang signifikan.	Pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank KaltimTara	Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah di bank katimtara



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
30	Pemerintah Kota Bontang agar melakukan penataan pegawai ASN dengan memperhatikan kesesuaian antara kualifikasi individu dan kualifikasi jabatan yang akan diduduki berdasarkan dengan kompetensi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kota Bontang telah menyusun draft Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pola karier ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Pola karier dimaksud didasarkan pada Sistem Merit yang diantaranya mempertimbangkan penempatan jabatan dan pemberoan tugas berdasarkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta kualifikasi pendidikan. Disamping hal tersebut perlu pula dipertimbangkan pengembangan kemampuan dan wasasan ASN melalui <i>tour of duty</i> (pengayaan pengalaman pada tempat tugas yang berbeda).2. Saat ini Pemerintah Kota Bontang telah mendapatkan predikat Baik pada penilaian Sistem Merit dan mendapatkan penghargaan Meritokrasi Award dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang memiliki komitmen dan telah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan Sistem Merit pada pembinaan dan pengembangan pola karier ASN.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan semangat ASN untuk berkinerja secara profesional2. Mendorong ASN untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi3. Terciptanya efektifitas Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintah Daerah
31	Pemerintah Kota Bontang agar menjamin Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pasca diberlakukannya aturan penghapusan tenaga kontrak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Kota Bontang akan terus berjuang mempertahankan kelangsungan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) untuk dapat terus mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.2. Pemerintah Kota Bontang akan terus aktif melalui APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) untuk secara bersama-sama menyampaikan usulan revisi	Jumlah pegawai yang mencukupi akan mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui dukungan pegawai Non ASN (TKD)



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>kebijakan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini KEMENPAN RB.</p> <p>3. Membuka alternatif keberlangsungan TKD melalui pola <i>outsourcing</i>.</p> <p>4. Membuka kesempatan melalui seleksi penerimaan ASN formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PPPK yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yang mayoritas diikuti oleh TKD Kota Bontang. Pada tahun 2022, pendaftar TKD yang lolos memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi PPPK berjumlah 901 orang dari jumlah total peserta 1197 orang atau setara 75,27%.</p>	



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dan kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk dilaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonstrasi.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bontang tidak mendapatkan program dan kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun program dan kegiatan yang alokasi anggarannya dari Pemerintah Pusat adalah: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), DBH sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti serta DHB Perikanan yang keseluruhannya menjadi satu kesatuan batang tubuh APBD Kota Bontang Tahun 2022. Demikian pula alokasi bantuan dari pemerintah Provinsi dianggarkan melalui pos bantuan keuangan Provinsi Kalimantan timur juga menjadi satu kesatuan dalam APBD. Pada keseluruhan alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kaltim adalah kewenangan Pemerintah Kota Bontang yang dimintakan/diusulkan pembiayaannya melalui sumber-sumber anggaran dimaksud.

BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DAN PRESTASI/PENGHARGAAN

5.1 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak dibetuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara sualtias maupun kuantitas.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerja sama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembanguna daerah.

Tabel berikut menunjukkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan pihak ketiga maupun kerjasama dalam bentuk corporate social resposnility (CSR) tahun 2022 :

Tabel 5.1
Bantuan Perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility 2022

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2022
1.	Badak LNG	<ul style="list-style-type: none">- Infrastruktur (TPS3R Berebas Tengah, Pinjam Pakai Mobil Mitrabinaan, Bantuan Infrastruktur rumah ibadah, sarana pendidikan)- Charity (tanggap bencana, dukungan kegiatan pemerintahan dan masyarakat, mitra TNK, Bantuan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial budaya)- Capacity Building (beasiswa BESCA, Cooperative Education program, pelatihan untuk masyarakat, sertifiakt juru las migas- Community empowerment (salin swara, saung pandu, kampung masdarling, selangan city, UMKM Pesisir, Wisata Berbasis Masyarakat)- Terdapat 5 program bedah pesantren dan 3 bedah rumah bekerjasama dengan YAUMIL Badan LNG



No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2022
		- Bantuan CSR Skala Nasional dan Internasional
2.	PT. Pupuk Kaltim	- Pendanaan UMK - Kegiatan Pengembangan UMK - Program Comdev PKT (Guntung ecocultural sport, inovasi olahan kitosan dari limbah cangkang rajungan, konservasi dan diverifikasi mangrove telok bangko, tempat pengelolah sampah terpadu - Kampung digital - Pertanian berkelanjutan dan terpadu - Kilau samudera (konservasi taman laut dan sarana media terumbu karang)
3.	PT. Kaltim Industrial Estate	- KIE peduli Bumi dalam Rangka World ozone day - KIE peduli ibu hamil dan anak - Penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang - Sosialisasi pemadam kebakaran untuk masyarakat buffer zone - Program pinjam pakai lahan KIE
4.	PT. Kaltim Daya Mandiri	- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat - Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat - Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat - Program peningkatan kualitas lingkungan hidup
5.	PT. Kaltim Parna Industri	- Peduli kesehatan (Program germas, gerakan cegah stunting (gegas), bantuan penanggulangan covid 19) - Peduli pendidikan (pembinaan sekolah berwawasan lingkungan, germas go to school, pekan ilmiah remaja Bontang, pembinaan sekolah sehat, kunjungan industri, program community development PT. KPI) - Peduli lingkungan (Kampung minim sampah (kamis), hutan wana khatulistiwa, sekolah berwawasan lingkungan, penanaman pohon, penanganan bencana banjir, kemitraan dengan TNK) - Sosial kemasyarakatan ekonomi (pembinaan UMKM, program pengelolaan kompos, bantuan untuk masyarakat, perayaan HUT RI bersama warga, pengembangan pariwisata, bantuan tas untuk bansos)
6.	PT. Kaltim Methanol Industri	- Bank sampah buncis unik (bank sampah dan urban farming-vertical culture) - Sanggul Ibu



No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2022
		<ul style="list-style-type: none">- KMI Peduli (bantuan oksigen, bantuan sembako, bantuan alat medis)- Raja Ruri dan bedah rumah (pekarangan hijau rumahku asri)- Keanekaragaman hayati (taman methanol dan penanaman mangrove)- Program UMKM, Kampung Inggris, Stunting, Kebencanaan, proklamasi dan kesehatan gigi dan mulut
7.	PT. Indominco Mandiri	<ul style="list-style-type: none">- SPAM Regional Sistem Void IMM- Komitmen Kerjasama terkait program peningkatan minat baca di Kota Bontang (Stand pameran BOMBALIGA MoU Program Peningkatan minat baca di Kota Bontang)- Pembangunan gapura taman literasi- Pilot project perusahaan bersih narkoba (bersinar)- Program pendidikan (beasiswa unggulan desa)- CSR Program Kesehatan (peningkatan pelayanan kesehatan area pesisir)- CSR Program Sosial (dukungan ketahanan pangan dan bantuan sosial)- Program infrastruktur (jalan lingkar tambang)- Program lingkungan (pengelolaan sampah)- Program pendapatan riil (panen rumput laut kelompok nelayan dan pengembangan pertanian padi)
8.	PT. Pamapersada Nusantara	<ul style="list-style-type: none">- Program peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat- Program sosial, budaya dan agama- Program pendidikan, peningkatan keterampilan dan kursus- Program lingkungan- Program kesehatan dan gizi masyarakat
9.	PT. Kaltim Nitrate Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- Program perlindungan anak melalui pengembangan rumah kreatif anak - Mahira (Rumah ibadah ramah anak)- Perahu kertas (perlindungan, pemenuhan dan kreativitas anak penyandang disabilitas)- Hunting De Sun (Pencegahan stunting dengan scaling up nutrition)- Program bidang lingkungan (laskar taman nasional kutai)
10	Bankaltimtara	<ul style="list-style-type: none">- Bantuan dump truk pengelolaan sampah ke dinas lingkungan hidup- Edukasi para pelaku usaha UMKM, Bentor bontang kuala dan RT se Kota Bontang terkait literasi keuangan dan pengelolanya

No.	Nama Perusahaan	Realisasi Program CSR Tahun 2022
		- Kegiatan pasar rawah indah siap qris menuju era digitalisasi dan kegiatan sosialisasi bagai seluruh sekolah di kota Bontang

Sumber : Bagian administrasi pembangunan setda Kota Bontang tahun 2022

5.2 Penghargaan/Prestasi Kota Bontang Tahun 2022

Pada tahun 2022 Kota Bontang memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut:

1. Penghargaan panji keberhasilan pembangunan

Pemerintah Kota Bontang meraih 6 panji keberhasilan pembangunan terbaik 1 diantaranya, bidang pencegahan korupsi, bidang smart city kabupaten/kota, bidanga pembangunan kesehatan kategori kota, bidang kepemudaan, bidang perpustakaan dan pembangunan kegemaran membaca, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.



2. Penghargaan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur sebagai terbaik III

Pemerintah Kota Bontang mendapatkan penghargaan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022 provinsi kaltim sebagai terbaik III, setelah Balikpapan dan Samarinda. Penghargaan diterima Wali Kota Bontang di acara Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim di Lamin Etam Pendopo Kantor Gubernur Kaltim.



3. Penghargaan Peduli Tata Ruang Terbaik 1 Kategori Pemerintah Kota

Direktorat Jenderal Tata Ruang sebagai pengampu tugas dalam bidang penyelenggaraan penataan ruang secara resmi menyerahkan penghargaan Menteri ATR/Kepala BPN kepada Pemerintah Kota Bontang sebagai daerah dengan Penataan Ruang Terbaik I Tahun 2021 Kategori Pemerintah Daerah Kota. Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Farid Hidayat kepada Wali Kota Bontang di Jakarta.



4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pemerintah Kota Bontang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Timur untuk yang kedelapan kalinya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang Tahun 2021.



5. Penghargaan Kota Dengan Ketahanan Pangan Terbaik Ke II Se-Kalimantan Timur Tahun 2022

Kota Bontang dinobatkan sebagai kota dengan ketahanan pangan terbaik kedua (II) se-Kalimantan Timur (Kaltim). Perolehan nilai yang dicapai Bontang yakni 84,64. Penghargaan itu diberikan Gubernur Kaltim Isran Noor pada 30 Mei 2022, kemudian terima oleh Wakil Wali Kota Bontang.



6. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Predikat NINDYA

Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sebagai Kota Layak Anak (KLA) 2022 kategori Nindya. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini digelar pada Jumat, 22 Juli 2022 ini di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Prestasi ini berhasil dipertahankan Bontang sejak 2015 lalu. Mulai dari perolehan kategori Pratama, tiga kali perolehan kategori Madya serta dengan tahun ini genap meraih dua kali predikat Nindya.



7. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2022

Sebagai wujud apresiasi dan terima kasih atas layanan kepegawaian yang diberikan oleh instansi pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan Anugrah BKN Award Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Bontang. Penghargaan prestisius ini diberikan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Haria Wibisana kepada Wakil Wali Kota Bontang Hj Najirah, SE didampingi Kepala BKPSDM Kota Bontang Bapak Sudi Priyanto, di aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (25/8/2022). Pada kesempatan tersebut Pemkot Bontang berhasil meraih 2 Kategori Penghargaan BKN Award 2022 sekaligus, yaitu kategori Penilaian Kompetensi dan Implementasi Manajemen ASN terbaik



8. Penghargaan PROKLIM 2022 (Program Kampung Iklim)

Wali Kota Bontang Basri Rase terima Trophy Program Kampung Iklim (Proklim) Utama tahun 2022 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta, Trophy Proklim Utama tersebut merupakan penghargaan yang diperoleh oleh Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara



9. Penghargaan BHUMANDALA AWARD 2022

Kota Bontang tahun 2022 ini berhasil mendapatkan penghargaan terbaik dari kategori ‘Simpul Jaringan Terbaik’, dan dianugerahkan dengan Bhumandala Kanaka serta Bhumandala Kencana. Penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial Daerah Kota Bontang, berada di bawah naungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Penyelenggaraan Bhumandala Award 2022 yang digelar di Jakarta pada Jumat (25/11/2022), dihadiri dan diterima langsung oleh Walikota



10. Penghargaan Penganugerahan KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022 Provinsi Kaltim

Pemerintah Kota Bontang meraih empat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur 2022, pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Hotel Grand Senyuir Samarinda, Rabu (14/12/2022). Kota Bontang berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi di 4 nominasi yang berbeda, kategori Instansi Vertikal terbaik II, penyelenggara pemilu terbaik III, kategori pemerintah Kota terbaik II, dan predikat pemerintah kota informatif.



BAB VI PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 yang disusun sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2022 dan berdasarkan realisasi APBD Kota Bontang Tahun 2022.

Berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang ditetapkan serta gambaran permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan dimaksud. Terhadap permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2022 menjadi masukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.

Selain melalui pelaksanaan program dan kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Wali Kota Bontang kepada DPRD Kota Bontang secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2022 pada prinsipnya juga merupakan bagian dari kerjasama dan partisipasi aktif seluruh komponen pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat Kota Bontang pada umumnya. Pemerintah Kota Bontang menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Bontang yang terus-menerus memberikan dukungan bagi terciptanya suasana yang kondusif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib dan lancar sesuai dengan tahapan dan target-target yang ditetapkan.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Bontang membuka selebar-lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna penyelenggaraan pembangunan di masa akan datang yang lebih baik.



Demikian penyampaian LKPJ Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 ini, diiringi dengan harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Bontang. Semoga Allah memberkati kita semua.

Bontang, Maret 2023
Walikota Bontang

Basri Rase, S.IP